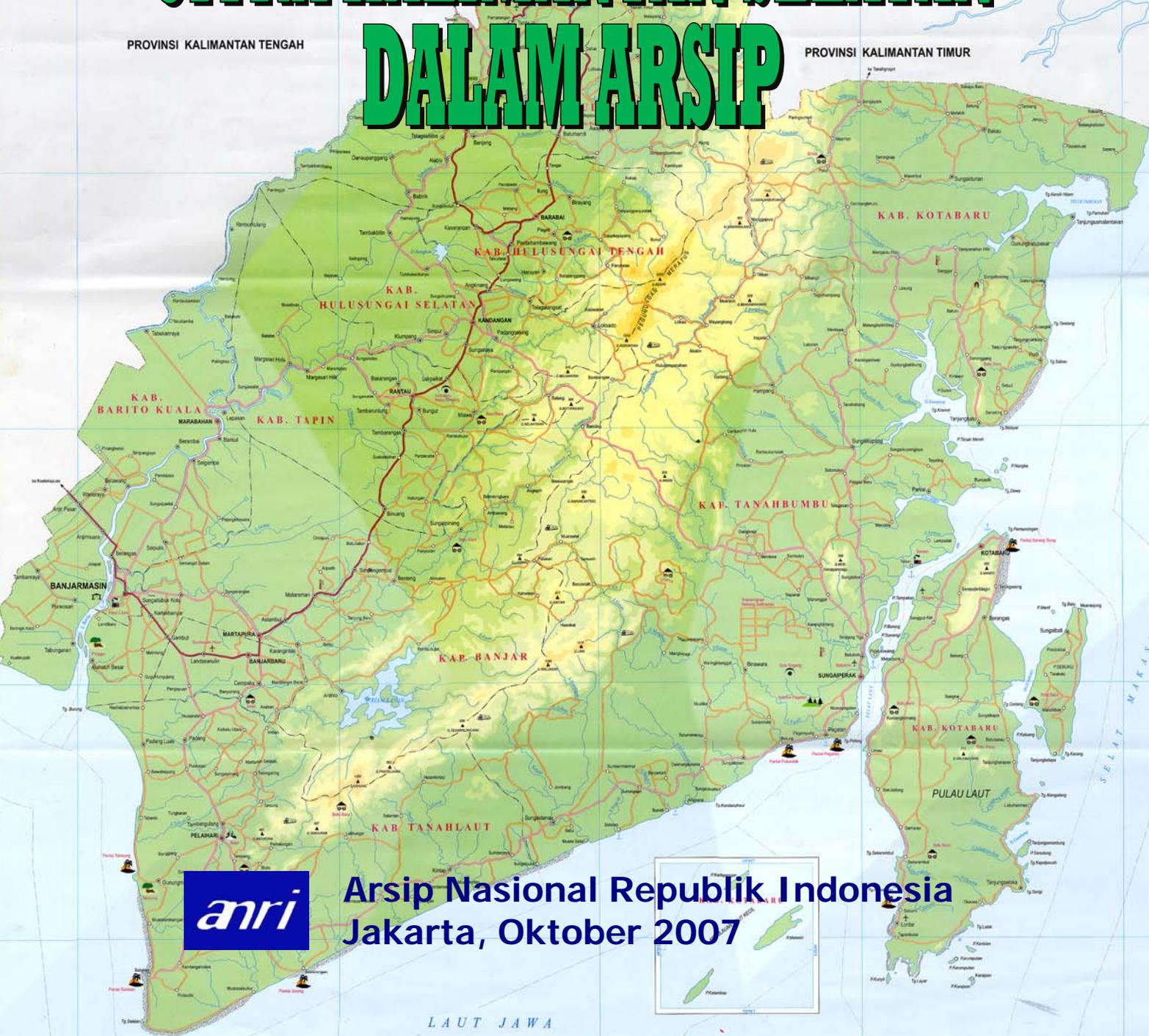


CITRA KALIMANTAN SELATAN DALAM ARSIP

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, Oktober 2007

SKALA 1 : 400.000

Proyeksi : Transverse Mercator

LEGENDA :

KOTA	Kota Provinsi	PERAIRAN	Sungai	Sisa	Sisa
Kota Kabupaten/Kota	Sungai	Sungai	Taman Wisata	Tambang	Pengelolaan Minyak
Kota Kecamatan	Sungai Karang	Sungai Karang	Perngasan Dangkal	Perikanan	Perikanan
Kota Lain	Pasar	Pasar	Museum	BANJARBARU	BANJARBARU
PERHUBUNGAN	Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Batas Administrasi	Batas Provinsi
Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Batas Kabupaten/Kota	Batas Kabupaten/Kota	Batas Kabupaten/Kota

KEBUNYI :

1. Atlas Selandi Daya Nasional BAKOSURTNALAM, skala 1 : 1.000.000 Tahun 1985
2. Atlas Geologi Indonesia (Skala 1 : 250.000) Tahun 1975
3. Peta Rupa Bumi Indonesia BAKOSURTNALAM, skala 1 : 250.000 Tahun 1985
4. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000 Tahun 1985
5. Topografi Peta Dasar skala 1 : 500.000 Tahun 1972

DIKORING DAN DITERIMA OLEH :

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional melalui Proyek Atlas Kalimantan dan Kepulauan Riau, Agustus 2006

Data Digital berskala pada Peta Dasar BAKOSURTNALAM, oleh Peta Jakarta Supra dan, di CitraSat, The 3D-DEM, dan 3D-DEM, The Free, 1975-1985, email : info@datacenter.go.id

KETINGGIAN DALAM METER

0-200
200-400
400-600
600-800
800-1000
1000-1200
1200-1400
1400-1600
1600-1800
1800-2000



CITRA KALIMANTAN SELATAN DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, Oktober 2007

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Salah satu bagian khasanah arsip yang telah berada di Arsip Nasional Republik Indonesia, adalah berbagai rekaman peristiwa sejarah dan fenomena yang menggambarkan dinamika Propinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penting dalam sejarah panjang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalimantan Selatan walaupun secara resmi baru menjadi propinsi pada tahun 1956 (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956) namun sejarah keberadaan dan peranannya melebihi seabad keberadaannya sebagai propinsi. Sebelum tahun 1956, Banjarmasin merupakan pusat kegiatan pemerintahan Propinsi Kalimantan. Sejak disyehkannya Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 tanggal 29 November 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Banjarmasin menjadi ibukota Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu propinsi, juga dibentuk dalam tradisi dan suasana kebatinan Indonesia sebagai bangsa pejuang. **Perang Banjar** dengan **Pangeran Antasari** sebagai pemimpin perlawanan antara tahun 1859-1905 yang

melibatkan seluruh unsur masyarakat Kalimantan Selatan adalah salah satu bukti bahwa masyarakat Kalimantan Selatan adalah bangsa pejuang. Bahkan pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI, masyarakat Kalimantan Selatan membentuk suatu gerakan dengan nama **Persatuan Rakyat Indonesia (PRI)**. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Kalimantan Selatan mempunyai andil dan peran yang besar dalam Kemerdekaan Indonesia.

Kalimantan Selatan selain mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, juga memiliki latar budaya dan adat istiadat yang mengakar pada tradisi budaya yang begitu beragam. Dengan letak geografis yang memiliki alam yang menakjubkan menjadikan Kalimantan Selatan merupakan salah satu aset bangsa Indonesia dan menjadi tujuan wisata budaya unggulan. Tradisi budaya Islam yang mengakar sejak berdirinya Kerajaan Banjar pada abad ke-16 memberi corak sendiri dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Juga tradisi masyarakat Dayak dalam lingkungan keluarga di Kalimantan Selatan memberi corak kekayaan dan keragaman budaya dan menjadikan budaya unggulan di Kalimantan Selatan.

Industri pertambangan dengan tradisi masyarakat pendulang intan merupakan aset penting lain yang dimiliki Propinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatanlah yang dengan segala keikhlasannya menyumbangkan permata terbesar yang oleh Bung Karno diberi nama **Tristars**. *Tristar* dari Kalimantan Selatan ini merupakan permata terbesar kedua setelah **Koh-i Nur** dari India.

Pengungkapan sejarah Kalimantan Selatan dengan berdasarkan arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan menyadarkan kembali kesadaran masyarakat Kalimantan Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya terhadap nilai-nilai perjuangan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Inilah salah satu tujuan dari program **Citra Daerah** yang sekarang sedang dikembangkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjadikan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan

mencegah disintegrasi bangsa. Data dan fakta yang terkandung dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, Oktober 2007

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul_____	i
Sambutan Kepala ANRI_____	iii
Daftar Isi_____	vi
Lambang Propinsi Kalimantan Selatan_____	vii
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang_____	2
B. Letak Geografis_____	3
C. Periode Pra Sejarah_____	4
D. Periode Kerajaan_____	5
E. Periode Perkembangan Agama Islam_____	6
F. Periode Kolonial_____	8
G. Periode Perlawanan Bersenjata_____	9
H. Periode Pergerakan Nasional dan Pendudukan Jepang_____	11
I. Periode Republik Indonesia_____	12
J. Administrasi Pemerintahan dan Perkembangan Wilayah_____	15
K. Kalimantan Selatan dalam Khasanah Arsip_____	17
Daftar Pustaka_____	20
CITRA KALIMANTAN SELATAN DALAM ARSIP _____	21
Geografis_____	22
Pemerintahan_____	26
Politik dan Keamanan_____	46
Perekonomian_____	60
Hukum_____	68
Pertambangan_____	73
Perindustrian_____	77
Transportasi_____	84
Transmigrasi dan Kependudukan_____	98
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan_____	104
Bangunan_____	113
Keagamaan_____	122
Pendidikan dan Kebudayaan_____	128
Kesehatan_____	137
DAFTAR ARSIP _____	140
PENUTUP _____	157



Lambang Propinsi Kalimantan Selatan

Pendahuluan

CITRA KALIMANTAN SELATAN DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangunkan pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya

penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program Citra Daerah, yaitu penyerahan hasil alihmedia (berupa *hard copy* dan *soft copy*) dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Propinsi di Indonesia. Salah satu Propinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2007 ini adalah Propinsi Kalimantan Selatan .

Arsip mengenai Kalimantan Selatan yang diserahkan mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC)* sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan pada periode tersebut. **Citra Kalimantan Selatan Dalam Arsip** ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. LETAK GEOGRAFIS

Letak geografis Kalimantan Selatan berada pada $1^{\circ} 21' \text{ LS}$ – $4^{\circ} 10' \text{ LS}$ dan $114^{\circ} 19' \text{ BT}$ – $116^{\circ} 33' \text{ BT}$. Wilayah Kalimantan Selatan bagian utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, di bagian selatan dengan Laut Jawa, di sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar.

Kalimantan Selatan adalah daerah yang letak geografisnya relatif strategis dan merupakan daerah yang subur. Kawasan tengah membentang Pegunungan Meratus dari selatan ke utara dan membelah wilayah menjadi dua bagian yaitu

bagian timur dan barat yang keadaan alamnya berbeda. Paparan dataran rendah terdapat di sepanjang pantai barat dan timur serta di daerah aliran sungai-sungai besar dan di Pulau Laut. Kalimantan Selatan memiliki dua macam rawa yakni rawa pasang surut dan rawa nonpasang surut. Rawa pasang surut terhampar mulai dari muara sungai Barito sampai Barito Kuala yang luasnya mencapai 500.000 ha. Makin ke arah utara atau pedalaman yang letaknya lebih tinggi terdapat hutan tropika yang lebat dan rapat.

C. PERIODE PRA SEJARAH

Kalimantan Selatan termasuk daerah yang memiliki sejarah sosial tertua di Indonesia. Para ahli arkeologi menilai bahwa daerah Kalimantan Selatan memiliki potensi yang tidak kecil sumbangannya bagi perjalanan sejarah Indonesia dan kebudayaannya. Kalimantan Selatan diperkirakan mulai dihuni manusia sejak jaman *glasial* pertama ketika Paparan (Dangkalan) Sunda muncul pertama kalinya dan menjadi jembatan bagi kemungkinan terjadinya migrasi manusia dan hewan dari daratan Asia ke daratan yang sekarang menjadi Pulau Jawa. Selama empat kali jaman es dan timbulnya daratan Paparan Sunda, Kalimantan, Sumatera dan Jawa menjadi satu daratan sehingga mengakibatkan arus migrasi manusia dan hewan yang sama. Pada jaman es, sungai-sungai seperti Barito, Tabalong, Bengawan Solo, dan lain-lainnya bergabung dan bermuara ke utara Pulau Bali.

Kalimantan Selatan pertama kali dihuni oleh jenis manusia yang sama dengan yang pernah menghuni Pulau Jawa. Hipotesa ini diperkuat oleh temuan-temuan berupa kapak perimbas dan peralatan dari batu. Kapak perimbas (*chopper*) dan alat-alat batu yang ditemukan oleh arkeolog Toer Soetardjo di dasar Sungai Riam Kanan di Awang Bangkal sama dengan alat manusia purba *Pithecanthropus erectus* yang ditemukan di Jawa.

Dalam kurun waktu yang begitu lama dari jaman es pertama sampai dengan jaman es keempat, pada saat itu Pulau

Kalimantan muncul empat kali sebagai pulau yang terpisah. Dalam perkembangan selanjutnya, perubahan iklim dan lingkungan alam, isolasi yang cukup lama atau kontak terbuka dengan arus pendatang memungkinkan terjadinya hibridasi yang luas dalam segala komponen rasial yang terdapat di Kalimantan Selatan. Semua ini turut mempengaruhi perkembangan evolusi manusia terhadap arus gena, efek *Sewall Wright* dan seleksi alamnya. Evolusi arus gena, efek *Sewall Wright* terjadi dalam kurun waktu antara periode manusia *Pithecanthropus* di Sungai Riam Kanan di Pegunungan Meratus pada jaman *Pleistosin Tengah* sampai dengan akhir jaman prasejarah di Kalimantan Selatan berkembang manusia jenis *Homo Sapiens* seperti suku *Ot Ngaju*, *Maanyan*, *Lawangan*, dan suku-suku *Bukit Meratus* sampai dengan *Orang Banjar*.

D. PERIODE KERAJAAN

Para penghuni pertama Kalimantan Selatan diperkirakan terkonsentrasi di desa-desa besar di kawasan pantai sebelah barat daya kaki Pegunungan Meratus atau di sepanjang muara Sungai Barito yang lambat laun berkembang menjadi kota-kota bandar yang memiliki hubungan perdagangan laut dengan India dan Cina, di samping hubungan dagang interinsuler.

Pada abad ke-5 M, di Kalimantan Selatan telah berdiri **Kerajaan Tanjungpuri** sebagai pusat kolonisasi orang-orang Melayu yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Mereka memperkenalkan bahasa dan kebudayaan Melayu sambil berdagang dan kemudian berasimilasi dengan penduduk sekitarnya yang terdiri dari suku-suku Maanyan, Lawangan, dan Bukit Meratus.

Setelah Kerajaan Tanjungpuri, menyusul berdiri Kerajaan Hindu **Nagara Dipa** yang dibangun oleh orang-orang Jawa asal Kediri Utara. Pada abad ke-14 berdiri pula Kerajaan **Nagara Daha** yang ternyata juga memiliki unsur-unsur kebudayaan Jawa. Perkembangan kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di daerah Kalimantan Selatan sampai permulaan abad ke-17

masih kabur namun masih bisa terbaca di dalam *Hikayat Raja-raja Banjar* dan *Hikayat Kota Waringin*. Berdasarkan kedua hikayat tersebut diketahui bahwa waktu Nagara Daha dipimpin oleh **Pangeran Tumenggung**, pusat kerajaan telah berpindah dari pedalaman ke kawasan muara sungai, yang sekarang dikenal sebagai *Marabahan*. Kerajaan ini berakhir akibat serangkaian perebutan kekuasaan.

E. PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM

Pemberontakan **Pangeran Samudera** pada abad ke-16 terhadap Nagara Daha merupakan awal dimulainya periode Islam dan berakhirnya jaman Hindu. Sebagai pendiri **Kerajaan Banjar**, Pangeran Samudera segera membuka hubungan yang erat dengan para penguasa di pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan Banjar juga menjalin hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Eropa seperti Belanda dan Inggris.

Pangeran Samudera ketika kecil bernama **Raden Samudera** adalah putera dari **Puteri Galuh (Ratu Intan Sari)** puteri dari **Maharaja Sukarama** dari Kerajaan Negara Daha. Pangeran Samudera atau **Suriansyah** adalah Sultan pertama dari Kerajaan Banjar. Pangeran Samudera bergelar ***Panembahan Batu Habang*** atau **Susuhunan Batu Habang**, yang dinamakan berdasarkan warna merah (*habang*) pada batu yang menutupi makamnya di Komplek Makam Sultan Suriansyah di Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Penobatan Raden Samudera menjadi raja dengan gelar Pangeran Samudera menyebabkan peperangan dan terjadi penarikan garis demarkasi dan blokade ekonomi dari penduduk pantai terhadap penduduk pedalaman yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudera mencari bantuan militer ke berbagai wilayah pesisir Kalimantan untuk menghadapi Kerajaan Negara Daha yang secara militer lebih kuat dan penduduknya kala itu lebih padat. Bantuan yang sangat penting adalah bantuan militer dari **Kesultanan Demak** yang hanya

diberikan kalau raja dan penduduk memeluk Islam. Kesultanan Demak dan Dewan Walisanga kala itu sedang mempersiapkan aliansi strategis untuk menghadapi kekuatan kolonial Portugis yang memasuki kepulauan Nusantara dan sudah menguasai Kesultanan Malaka.

Sultan Trenggono mengirim seribu pasukan dan seorang penghulu Islam bernama **Khatib Dayan** yang bertugas mengislamkan raja Banjar dan rakyatnya. Pasukan Pangeran Samudera berhasil menembus pertahanan musuh, Pangeran Tumenggung akhirnya bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Samudera. Dengan kemenangan Pangeran Samudera dan diangkutnya rakyat Negara Daha (orang Hulu Sungai) dan penduduk Bandar Muara Bahan (orang Bakumpai) maka muncullah kota baru yaitu **Banjarmasih**, yang sebelumnya hanya sebuah desa yang berpenduduk sedikit. Pada 24 September 1526 bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 932 H, Pangeran Samudera memeluk Islam dan bergelar **Sultan Suriansyah** atau **Suryanullah** (1526-1550).

Sebagai istana Kerajaan Banjarmasin, rumah Patih dijadikan keraton, juga dibangun paseban, pagungan, sitilohor (sitihinggil), benteng, pasar dan masjid (**Masjid Sultan Suriansyah**). Muara sungai Kuin ditutupi cerucuk (trucuk) dari pohon ilayang untuk melindungi keraton dari serangan musuh.

Kerajaan Banjarmasin berkembang pesat, Sultan Suriansyah digantikan anaknya **Sultan Rahmatullah** (1550-1570), selanjutnya **Sultan Hidayatullah** (1570-1620) dan **Sultan Musta'inbillah** (1520-1620). Untuk memperkuat pertahanan terhadap musuh, Sultan Mustainbillah mengundang seorang panglima perang suku **Dayak Ngaju** beserta sepuluh orang lainnya untuk tinggal di keraton. Salah seorang dari mereka masuk Islam dan menikah dengan adik sultan, yaitu **Nyai Siti Diang Lawai** yang berasal dari kalangan suku Dayak.

F. PERIODE KOLONIAL

Bangsa Eropa menuju Kalimantan Selatan sejak awal abad ke XVII, tepatnya ketika armada Belanda dipimpin **Gillis Michaeleszoon** tiba di Banjarmasin tanggal 7 Juli 1607. Pada tahun 1612, armada Belanda datang kembali ke Banjarmasin. Armada ini menyerang Banjarmasin dari arah Pulau Kembang dan menembaki **Kuin** ibukota Kesultanan Banjar sehingga Banjar Lama atau Kampung Keraton dan sekitarnya hancur. Ibukota kerajaan kemudian dipindahkan dari Banjarmasin ke Martapura. Walaupun ibukota kerajaan telah dipindahkan tetapi aktivitas perdagangan di pelabuhan Banjarmasin tetap ramai. Nama Banjarmasin oleh Belanda diubah menjadi **Banjarmasin**.

Persekutuan Kerajaan Banjarmasin dengan Belanda semakin lama semakin dirasakan merugikan bagi kerajaan Banjarmasin. Perjanjian monopoli yang diperbaharui pada tahun 1660 dan 1661 antara Kerajaan Banjar dengan Pemerintah Kolonial tetap merugikan Kerajaan Banjar karena Belanda langsung mengangkut rempah-rempah tanpa prosedur jual beli seperti tercantum dalam perjanjian.

Perubahan politik terjadi sesudah **Sultan Tamjidillah** wafat tahun 1761 dan karena putra-putranya masih kecil digantikan oleh **Mangkubumi Pangeran Natadilaga (Susuhunan Nata Alam)**. Setelah dewasa, putra-putranya menuntut tahta namun tidak dikabulkan oleh Mangkubumi Pangeran Natadilaga sehingga mereka menggempur Pangeran Natadilaga pada tahun 1786. Menghadapi gempuran ini, Pangeran Natadilaga meminta bantuan Kompeni Belanda. Sebagai balas budi, Pangeran Natadilaga menandatangani kontrak dengan VOC tahun 1787 yang isinya antara lain memberikan seluruh wilayah Kerajaan Banjar, Bulungan, dan Kutai di Kalimantan Timur kepada VOC.

Dalam rangka melepaskan keterikatannya dengan Belanda, Pangeran Natadilaga kemudian bersekutu dengan Inggris, sehingga memaksa Belanda untuk angkat kaki dari Banjarmasin

pada tahun 1809. Pengganti Pangeran Natadilaga adalah putranya bernama **Sultan Sulaiman**.

Setelah Inggris menerima kekuasaan pendudukan Pulau Jawa pada tahun 1811, Inggris membuat kontrak dengan Kerajaan Banjar dan menempatkan residennya, **Alexander Hare** di Banjarmasin. Kekuasaan Inggris tidak terlalu lama, sebab Belanda kemudian kembali berkuasa dan memaksa Kerajaan Banjar untuk menandatangani kontrak baru dengan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Kontrak ini diperbaharui lagi pada tahun 1826 dengan **Sultan Adam Al Wasikhbillah (Al Wastiq Billah)**. Akibatnya, Kerajaan Banjar kehilangan kedaulatannya dan Kerajaan Banjar dilarang mengadakan kontak politik dengan negara ke tiga kecuali seijin Belanda. Wilayah kerajaan pun menciut dan Kerajaan Banjar tidak diijinkan mempunyai kekuatan militer sendiri, termasuk dalam pengangkatan pewaris tahta, harus mendapatkan ijin dan diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda.

G. PERIODE PERLAWAN BERSENJATA

Babak baru sejarah Kalimantan segera dimulai dengan bangkitnya rakyat untuk melawan Belanda. **Pangeran Antasari** tampil sebagai pimpinan rakyat Banjar. Tanggal 28 April 1859, **Perang Banjar** yang dipimpin oleh **Pangeran Antasari** meletus, dengan jalan merebut Benteng Pengaron milik Belanda yang dipertahankan mati-matian. Pertempuran di Benteng Pengaron ini disambut dengan pertempuran-pertempuran di berbagai medan yang tersebar di Kalimantan Selatan, yang dipimpin oleh **Kiai Demang Lehman, Haji Buyasin, Tumenggung Antaluddin, Pangeran Amrullah** dan lain-lain.

Pertempuran itu antara lain pertempuran mempertahankan Benteng Tabanio bulan Agustus 1859, pertempuran mempertahankan Benteng **Gunung Lawak** pada tanggal 29 September 1859; pertempuran mempertahankan kubu pertahanan **Munggu Tayur** pada bulan Desember 1859; pertempuran di Amawang pada tanggal 31 Maret 1860. Bahkan

Tumenggung Surapati berhasil membakar dan menenggelamkan kapal *Onrust* milik Belanda di Sungai Barito.

Sementara itu **Pangeran Hidayat** dari Kerajaan Banjarmasin makin jelas menjadi penentang Belanda dan memihak kepada perjuangan rakyat yang dipimpin oleh **Pangeran Antasari**. Penguasa Belanda menuntut supaya Pangeran Hidayat menyerah, tetapi ia menolak. Akhirnya penguasa kolonial Belanda secara resmi menghapuskan Kerajaan/Kesultanan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860. Sejak itu Kesultanan Banjar langsung diperintah oleh seorang Residen Hindia Belanda.

Perlawanan semakin meluas, kepala-kepala daerah dan para ulama ikut memberontak, memperkuat barisan. Pangeran Antasari bersama-sama Pangeran Hidayat langsung memimpin pertempuran di berbagai medan melawan pasukan kolonial Belanda. Tetapi karena persenjataan pasukan Belanda lebih lengkap dan modern, pasukan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat terus terdesak serta semakin lemah posisinya. Setelah memimpin pertempuran selama hampir tiga tahun, karena kondisi kesehatan, akhirnya Pangeran Hidayat menyerah pada tahun 1861 dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat.

Setelah Pangeran Hidayat menyerah, maka perjuangan umat Islam Banjar dipimpin sepenuhnya oleh Pangeran Antasari, baik sebagai pemimpin rakyat yang penuh dedikasi maupun sebagai pewaris Kesultanan Banjar. Untuk mengokohkan kedudukannya sebagai pemimpin perjuangan umat Islam tertinggi di Kesultanan Banjar, maka pada tanggal 14 Maret 1862, bertepatan dengan 13 Ramadhan 1278 Hijriah, dimulai dengan seruan: "**Hidup untuk Allah dan Mati untuk Allah**" Seluruh rakyat, para pejuang, para alim ulama dan para bangsawan Banjar; dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari menjadi '**Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin**'.

Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Khalifatul Mukminin dengan pasukan Belanda, berlangsung terus di berbagai medan. Pasukan Belanda yang

ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern, akhirnya berhasil mendesak pasukan Khalifah. Dan akhirnya Khalifah memindahkan benteng pertahanannya di hulu Sungai Teweh. Pada tanggal 11 Oktober 1862, **Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin (Pangeran Antasari)** wafat dan dimakamkan di Bayan Begok, Hulu Teweh.

Perang Banjar yang mulai dikobarkan oleh Pangeran Antasari pada tahun 1859 baru berakhir tahun 1905.

H. PERIODE PERGERAKAN NASIONAL DAN MASA PENDUDUKAN JEPANG

Semakin lancarnya hubungan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa berpengaruh kepada perkembangan politik di daerah Kalimantan Selatan. Begitu pula saat di Pulau Jawa tumbuh pergerakan kebangsaan pada awal abad ke-20, pengaruh perkembangan politik ini menyebar pula di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1912 di Banjarmasin berdiri cabang **Syarikat Islam (SI)**. Pada tahun 1914, Syarikat Islam telah memiliki cabang di hampir setiap kota di seluruh Kalimantan Selatan, seperti Martapura, Pleihari, Pegatan, Kotabaru, Kandangan, Rantau, Margasari, Negara, Marabahan, dan Amuntai.

Selain Syarikat Islam, partisipasi masyarakat dalam pergerakan kebangsaan juga disalurkan dalam **Nahdatul Ulama (NU)** dan organisasi nonpolitik lain seperti **Muhammadiyah**. Cabang-cabang NU dan Muhammadiyah juga hampir ada di setiap kota besar di Kalimantan Selatan. Besarnya pengaruh Muhammadiyah di Kalimantan Selatan menjadikan Banjarmasin sebagai tuan rumah **Kongres ke-25 Muhammadiyah** pada tahun 1935.

Pada pertengahan tahun 1929 di Banjarmasin terbentuk pula cabang **Partai Nasional Indonesia (PNI)**. Namun, organisasi politik ini hanya bertahan dua tahun karena mendapat tekanan dari pemerintah kolonial.

Jepang mendarat di Banjarmasin pada tanggal 10-11 Februari 1942 dan mengambil alih pemerintah dari tangan Belanda. Mulanya kedatangan Jepang diharapkan membawa perbaikan. Namun, yang terjadi adalah kebebasan rakyat semakin ditindas dan dimata-matai oleh para *kempetei* (polisi rahasia) Jepang. Keadaan ini berlanjut sampai Jepang menyerah kepada tentara Sekutu pada tahun 1945.

I. PERIODE REPUBLIK INDONESIA

Sehari sebelum Proklamasi, berdirilah sebuah organisasi dengan nama **Persatuan Rakyat Indonesia (PRI)** yang dipimpin oleh **Pangeran Ardi Kesuma** sebagai ketua dan sebagai wakilnya **A. Ruslan**. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air dan dunia internasional. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta terpilih masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, disusul dengan ditetapkannya UUD 1945.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang pertamanya pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan antara lain:

1. Daerah Indonesia dibagi dalam delapan (8) Propinsi yang dipimpin oleh gubernur. Propinsi-Propinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.
2. Propinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.
3. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

Pada hari itu juga PPKI menetapkan pembentukan departemen-departemen yang akan dipimpin oleh seorang menteri dan pemerintahan Propinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. PPKI kemudian dibubarkan dan diganti menjadi

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu presiden.

Untuk melengkapi struktur pemerintahan daerah yang sesuai dengan keadaan pemerintah pusat, maka pemerintah RI menetapkan Undang-Undang 1 tahun 1945 yang mengatur kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Dalam kerangka pelaksanaan tugasnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akan melakukan pelimpahan tanggung jawab administratif bagi semua urusan lokal pada Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Hal tersebut selain memperjelas pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, juga menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia didukung oleh daerah-daerah bekas kerajaan yang kemudian menjadi daerah otonom.

Sebagai perangkat pembantu gubernur, KNID berfungsi sebagai penghubung antara pusat dengan daerah, selain itu untuk membantu ketenteraman dan menjaga keselamatan rakyat, anggota KNID ikut aktif menyusun Badan Keamanan Rakyat (BKR) di daerahnya masing-masing. Badan ini terutama menampung mereka yang pernah mendapatkan pendidikan militer, seperti para mantan anggota Peta, Heiho dan KNIL.

Sementara itu untuk melaksanakan pemerintahan dalam suasana merdeka di Kalimantan Selatan, **Pangeran Musa** ditunjuk menjadi residen Kalimantan Selatan, dan **A. Ruslan** menjadi ketua Komite Nasional Indonesia Daerah. Meskipun pemerintahan telah terbentuk, kemerdekaan masih harus ditegakkan oleh segenap komponen bangsa mengingat Jepang yang kalah perang dengan pihak Sekutu diharuskan menjaga *status quo* di wilayah Indonesia hingga kedatangan pasukan Sekutu. Pasukan Jepang yang berada di Kalimantan Selatan yang berjumlah kurang lebih 60.000 personil melakukan berbagai upaya untuk menghambat kegiatan Pemerintah Nasional Republik Indonesia di Kalimantan Selatan. Mereka berupaya untuk meningkatkan pengawasannya atas beberapa instalasi-instalasi vital, seperti gudang-gudang senjata. Padahal persenjataan dan penguasaan berbagai instalasi tersebut sangat diperlukan oleh para pejuang di Kalimantan Selatan untuk

menopang perjuangan. Akibatnya konflik antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang tidak dapat dihindarkan.

NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang membonceng Pasukan Sekutu pada tanggal 17 September 1945 tiba di Kalimantan Selatan. Mereka menangkap para tokoh **Persatuan Rakyat Indonesia (PRI)** dan menyuruh tokoh-tokoh tersebut menandatangani pernyataan bahwa PRI bertanggungjawab atas sabotase-sabotase yang terjadi di Kalimantan Selatan. Hal ini membuat ruang gerak PRI menjadi terbatas sehingga tokoh-tokoh PRI membentuk badan perjuangan baru yang lebih radikal yang bernama **Barisan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK)**, dipimpin oleh **Hadhariyah M.** dan **A. Ruslan.**

Menyadari bahwa usaha untuk mengembalikan pemerintahan kolonialnya seperti sebelum Perang Dunia II mustahil dapat dicapai dengan kekuatan senjata, pemimpin NICA Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengambil siasat dengan mencetuskan gagasan pembentukan **Negara Federal** atau federasi di bawah naungan Kerajaan Belanda. Dengan siasat memecah belah seperti ini Belanda berharap kedudukan Republik Indonesia yang pada saat itu berpusat di Yogyakarta dapat dipersempit dan kemudian dengan mudah dapat diruntuhkan.

Untuk tujuan tersebut Van Mook mengadakan **Konferensi Malino** di Malino (Sulawesi Selatan) pada tanggal 16–22 Juni 1946, konferensi yang kedua di Pangkalpinang dan konferensi yang ketiga di Denpasar, Bali, tanggal 18–24 Desember 1946. Dalam Konferensi ini diputuskan pembentukan negara bagian yang pertama yaitu **Negara Indonesia Timur.** Belanda memang mempunyai tujuan untuk memecah persatuan bangsa Indonesia.

Usaha lain untuk meredam konflik Indonesia–Belanda adalah usulan Sekutu agar dilakukan perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda, antara lain di **Hoge Veluwe** namun perundingan ini mengalami kegagalan. Perundingan berikutnya

dilanjutkan di Linggajati, Jawa Barat dan menghasilkan naskah **Perjanjian Linggajati** yang ditandatangani 25 Maret 1947.

Berdasarkan Perjanjian Linggajati ruang gerak Pemerintah Republik Indonesia terbatas hanya Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Akibatnya organisasi-organisasi perjuangan di Kalimantan Selatan kehilangan kontak. Kalimantan Selatan kembali menjadi bagian dari **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**, ketika **Negara Indonesia Timur (NIT)** dibubarkan

J. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN WILAYAH

Kalimantan Selatan pada awalnya berbentuk kerajaan yaitu Kerajaan Banjar. Namun, pada tanggal 11 Juni 1860, Belanda mengeluarkan proklamasi penghapusan Kerajaan Banjar dan dimasukkan ke dalam wilayah *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo*. Selanjutnya, berdasarkan pembagian organik dari *Indisch Staatsblad* Nomor 199 dan 279 Tahun 1913, Kalimantan Selatan dibagi menjadi 2 afdeling, yaitu Banjarmasin dan Hulu Sungai. Masing-masing afdeling masih dibagi dalam onderafdeling. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Belanda Nomor 6 tahun 1919 tanggal 28 Mei dan berlaku 1 Juli 1919, dibentuklah *Gemeente Raad* Banjarmasin dengan anggota 13 orang terdiri dari 7 orang Belanda, 4 pribumi, dan 2 Timur Asing seperti yang dapat ditelusuri dalam *Staatsblad* Nomor 252 Tahun 1919. Tahun 1930, anggota *gemeente* diubah formasinya, lima orang Belanda, lima pribumi, dan tiga Timur Asing. Pada tahun 1938, *Gemeente Raad* Banjarmasin ditingkatkan statusnya menjadi *Stadsgemeente Raad* Banjarmasin dengan Keputusan Gubernur Jenderal yang tercantum dalam *Staatsblad* Nomor 359 Tahun 1938 tanggal 17 Juni 1938. Anggotanya tetap 13 orang, tujuh orang Belanda, empat orang pribumi dan tiga orang Timur Asing. Sebagai *burger-meester* adalah **A.R. Mulder**. Tahun 1938 juga dibentuk *Gouvernement Borneo* dengan ibukota Banjarmasin. Gubernur pertama adalah **dr. Haga**.

Pada tanggal 4 April 1950 terbit Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 137, Nomor 138, Nomor 139, Nomor 140 yang menyebutkan bahwa seluruh Kalimantan masih terdiri dari satu Propinsi. Perubahan terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Perubahan terjadi lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang menyatakan bahwa sebagian daerah Kalimantan Selatan menjadi Kalimantan Tengah. Pada tanggal 1 Januari 1957, Kalimantan Selatan secara resmi memiliki seorang gubernur pertamanya yaitu **M. Syarkawi**.

Dua tahun kemudian terbit Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang. Adapun Undang-Undang No.25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Propinsi Kalimantan Selatan diperbarui dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959.

Setelah mengalami beberapa kali pemekaran daerah kabupaten/kota, saat ini Kalimantan Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu: Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.

K. KALIMANTAN SELATAN DALAM KHASANAH ARSIP

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal bahwa arsip Kalimantan Selatan dalam program *Citra Daerah* ini

adalah khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI. Informasi yang terekam didalamnya berhubungan dengan berbagai aktivitas dan fenomena di Kalimantan Selatan. Arsip yang terekam dalam program Citra Daerah ini berasal dari arsip tekstual, arsip peta dan arsip foto yang menggambarkan berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dimulai dari Kontrak antara Sultan Tamdjidulla dan *Nederlandsch Oost Indische Compagnie* mengenai perubahan harga lada pada tanggal 10 Mei 1747 sampai dengan tahun arsip 1979 tentang pembangunan peternakan di Kalimantan Selatan.

Dalam Citra Daerah Kalimantan Selatan ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai **geografis**. Penjelasan wilayah geografis ini digambarkan melalui arsip Peta Borneo, Kapoeas (Kapuas), Banjarmasin serta peta Boemiratan (Bumiratan) dan sekitarnya.

Arsip yang berhubungan dengan **pemerintahan** dituangkan pertama dengan menampilkan arsip surat dari Sultan Adam Al Watsiq Basah bin Sulaiman Al Mu'tadi dari Kerajaan Banjar kepada pemerintah kolonial, kemudian dilanjutkan dengan arsip pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang pembentukan Propinsi Kalimantan, kemudian Surat dari Mr. Soetardjo, Sekretaris Menteri Kehakiman kepada Direktur Kabinet Presiden serta foto pelantikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Abrani Sulaeman.

Tema **politik dan keamanan** diawali dengan menampilkan surat kontrak Sultan Banjarmasin mengenai perbatasan, serta catatan sejarah pemberontakan di Banjarmasin 1859. Sedangkan arsip setelah Proklamasi Kemerdekaan RI berupa arsip organisasi gerakan rahasia Bandjar Hulu Sungai yang ingin menegakkan NKRI serta foto perjalanan Presiden Soekarno ke Banjarmasin.

Sedangkan kegiatan **perekonomian** dimulai dengan surat kontrak antara Sultan Tamdjidulla dan *Nederlandsch Oost Indische Compagnie* kemudian arsip foto, antara lain foto Pasar

Babiri, Pasar Baru Banjarmasin, dan pedagang martabak di Pasar Belintang, Martapura serta surat-surat dari Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Waperdam Ekubang) Selo Soemarjan tentang perekonomian di Kalimantan Selatan.

Dalam bidang **hukum**, kebanyakan arsip yang ditampilkan adalah arsip dalam bentuk teks, antara lain Keputusan Presiden tentang pengangkatan hakim perwira pada pengadilan tentara di Banjarmasin, Resolusi dari Badan Koordinasi Kesatuan Aksi Kalimantan Selatan untuk segera mengeluarkan UU Anti Korupsi, serta surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Ratu Jus Roostinah tentang status kekayaan dan ahli waris pahlawan nasional Pangeran Hidayatullah.

Dalam bidang **pertambangan**, arsip yang ditampilkan antara lain konsep surat Sultan Banjarmasin mengenai penggalian batubara di Riam, penggalian intan di Martapura serta surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri Pertambangan dan Gas Bumi tentang penambangan bahan galian oleh perusahaan dan rakyat.

Kegiatan **industri** diawali dengan rencana kebutuhan garam tahun 1842, kemudian foto pelantikan anggota Jajasan Karet, upacara pembukaan pabrik es di Amuntai, serta kerajinan pot dan batu bata.

Perkembangan jaringan **transportasi** digambarkan melalui berita kedatangan dan kepergian kapal-kapal di pelabuhan Banjarmasin, serta berbagai foto mengenai pemandangan sungai Martapura dan jembatannya, pelabuhan Kota Baru Pulau Laut, Pelabuhan Banjarmasin, dan stasiun kereta api Martapura, serta berbagai alat transportasi seperti gerobak lembu, perahu, dan pesawat Otter Barito.

Masalah **transmigrasi dan kependudukan**, diawali dengan surat dari Sultan Banjar kepada Raffles tentang orang Jawa yang diperbolehkan tinggal di Banjar, jumlah penduduk di Afdeeling Banjarmasin dan sekitarnya serta Ikhtisar Proyek Transmigrasi Barambai.

Aktivitas **pertanian, peternakan, dan perkebunan** lebih banyak ditampilkan dalam bentuk foto antara lain seperti foto se orang penyadap karet, peternakan sapi, kebun percobaan, serta sarana irigasi. Sedangkan arsip dalam bentuk teks antara lain mengenai laporan tentang proyek peternakan di Kalimantan Selatan.

Arsip yang berhubungan dengan **bangunan**, antara lain menampilkan foto makam Sultan Sepoe, Kantor Residen Banjarmasin, Jawatan Air Minum dan Pekerjaan Umum, Jawatan Penerangan, dan Tugu Martapura, serta Surat Keputusan DPRD mengenai pembangunan Taman Makam Syuhada Haji.

Kegiatan **keagamaan** digambarkan melalui foto-foto tempat peribadatan yang tersebar di berbagai tempat, seperti foto Masjid Nagara, Masjid Martapoera, dan Gereja Banjarmasin, serta pemandangan sekitar kedatangan jemaah haji.

Perkembangan **pendidikan dan kebudayaan**, dapat dilihat dari arsip foto *Borneo Gouvernement Muloschool* serta Perumahan dan Asrama Pelajar Mulawarman di Banjarmasin. Kemudian pidato-pidato Presiden Soekarno di Universitas Lambung Mangkurat serta kunjungan Presiden Soekarno ke SKP (Sekolah Kepandaian Putri) dan SGB (Sekolah Guru B) di Banjarmasin.

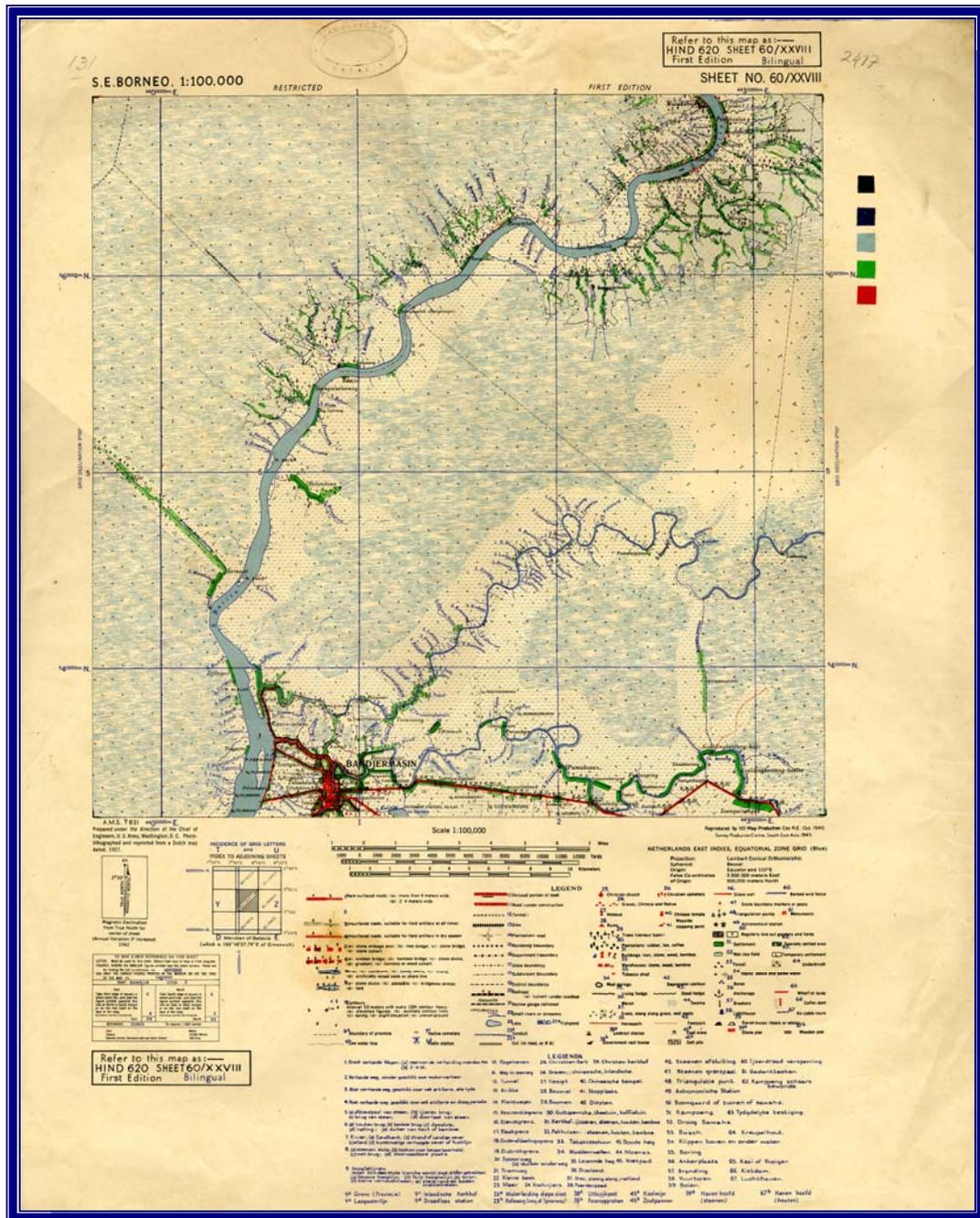
Usaha **kesehatan** tidak begitu banyak diungkapkan karena arsip yang ada terbatas, sehingga hanya sedikit yang dapat ditampilkan antara lain laporan vaksin semester II di Banjarmasin dan perlombaan bayi sehat memperingati seperempat abad gerakan wanita Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Penerangan. Republik Indonesia. ***Propinsi Kalimantan Selatan***. Jakarta, 1952.
- Kosoh, S. et.al. ***Sejarah Daerah Kalimantan Selatan***. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Musin, Emilia B. "Persetujuan Renville". ***Seminar Sejarah Nasional II***. Yogyakarta, 1970.
- Nasution, A.H. ***Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia***. Jilid II. Bandung: Angkasa, 1978.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. ***Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan***. Bandung: Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, 1997.
- Poesponegoro, Marwati D. dan Nugroho Notosusanto. ***Sejarah Nasional Indonesia VI***. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Taylor, Alastair M. ***Indonesian Independence and United Nations***. London: Stevens and Sons, 1960.
- Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. ***Profil Propinsi Republik Indonesia: Kalimantan Selatan***. Jakarta, 1992.

CITRA KALIMANTAN SELATAN DALAM ARSIP

Geografis



Peta Banjarmasin, South East Borneo (Kalimantan Tenggara) 1945.

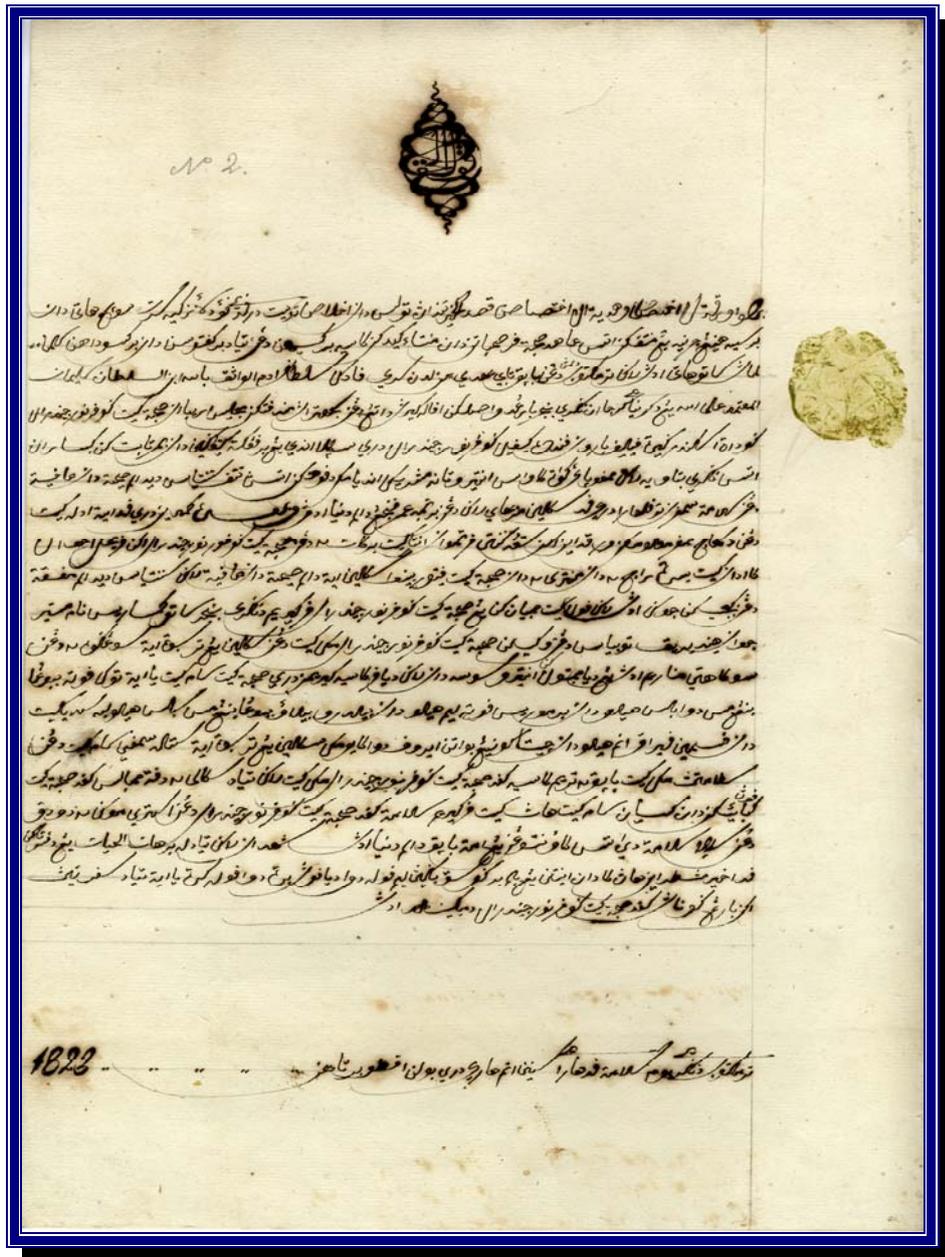
ANRI : Topografi 2417/sheet No.60/XXVIII/131



Peta Boemiratan, Binoeng, Matraman, Soengkai,
Tatakan, Pengaran, Borneo.
1946.

ANRI: Topografi 2422/sheet No. 61/XXVIII/131

Pemerintahan



Surat dari Sultan Adam Al Watsiq Billah bin Sulaiman Al Mu'tamid Allalah dari Kerajaan Banjar kepada Pemerintah Hindia Belanda mengenai ucapan terima kasih atas kiriman benang, perak, kuningan Eropa yang dibawa oleh John Hendrik Tobias, 6 Oktober 1823.

ANRI : Khusus 10 (Surat Emas)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 58 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.16 jo. No.23 bagi segenap pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan) mulai tanggal 1 Djuli 1950;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan pegawai jang namanja tertora dalam daftar terlampir dalam pangkat dan gadji berdasarkan peraturan tersebut diatas;
- Mengingat pula : Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa jang namanja tersebut dalam daftar lampiran ini, terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1950 diangkat pada djabatan sebagaimana termaktub dalam ruang 8 daftar lampiran tersebut dan kepadanja diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah, jang bersangkutan dengan djabatannja, dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

- SALINAN
1. Semesta
2. Dewan
3. Kantor
4. Kabin
5. Dewan
6. Kantor
7. Djawa
8. Kantor
9. Wakil

PET
dipergunakan

D A P T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tanggal 19 April 1951 No. 58.

No.	Nama (Tg. lahir/umur)	Djabatan	L A M A (30 Djuni 1950)			B A R U (1 Djuli 1950)					Keterangan		
			golongan dan ruang	Masa kerdjaja th. bl.	Gadji pokok	Djabatan	golongan dan ruang	Masa kerdjaja th. bl.	Gadji pokok	Gadji tambahan paralihan			
1	Dr. MURDJANI (18-7-1905).	Gubernur Kalimantan.	VI/f	18.1	R 650.- (x)	R 50.-	Gubernur Kalimantan.	VI/f	18.1	R 1095.- (Seribu sembilan puluh lima rupiah).	-	-	x) Ditambah 50% berdasarkan Per. P. R. I. No. 11 tahun 1950.

DJAKARTA, 19 April 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Sukarno
SUKARNO.
MENTERI DALAM NEGERI,
Assani
ASSANI.

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1951 tentang pengangkatan Dr. Murdjani sebagai Gubernur Kalimantan terhitung tanggal 1 Juli 1950, 19 April 1951.

ANRI : Setkab Keppres 1950-1960, 284



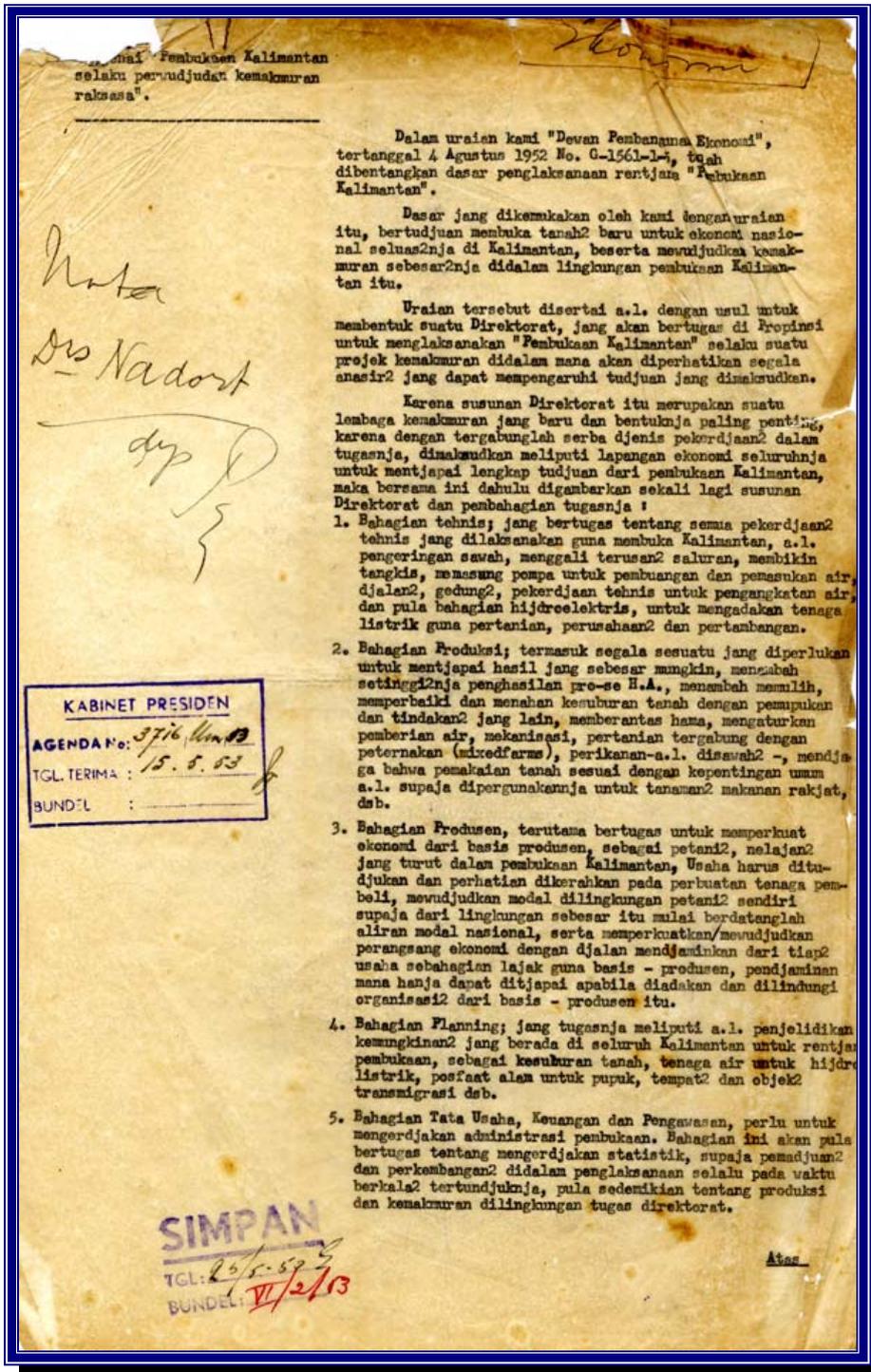
Pelantikan Residen Koordinator Kalimantan Selatan,
Zainal Abidin Gelar Sutan Komla Pontas
bertempat di Gubernuran Banjarmasin,
6 Februari 1952.

ANRI : Kempen G-1



Konferensi Pembukaan Kalimantan bertempat
di Gubernuran Banjarmasin,
24 Februari 1952.

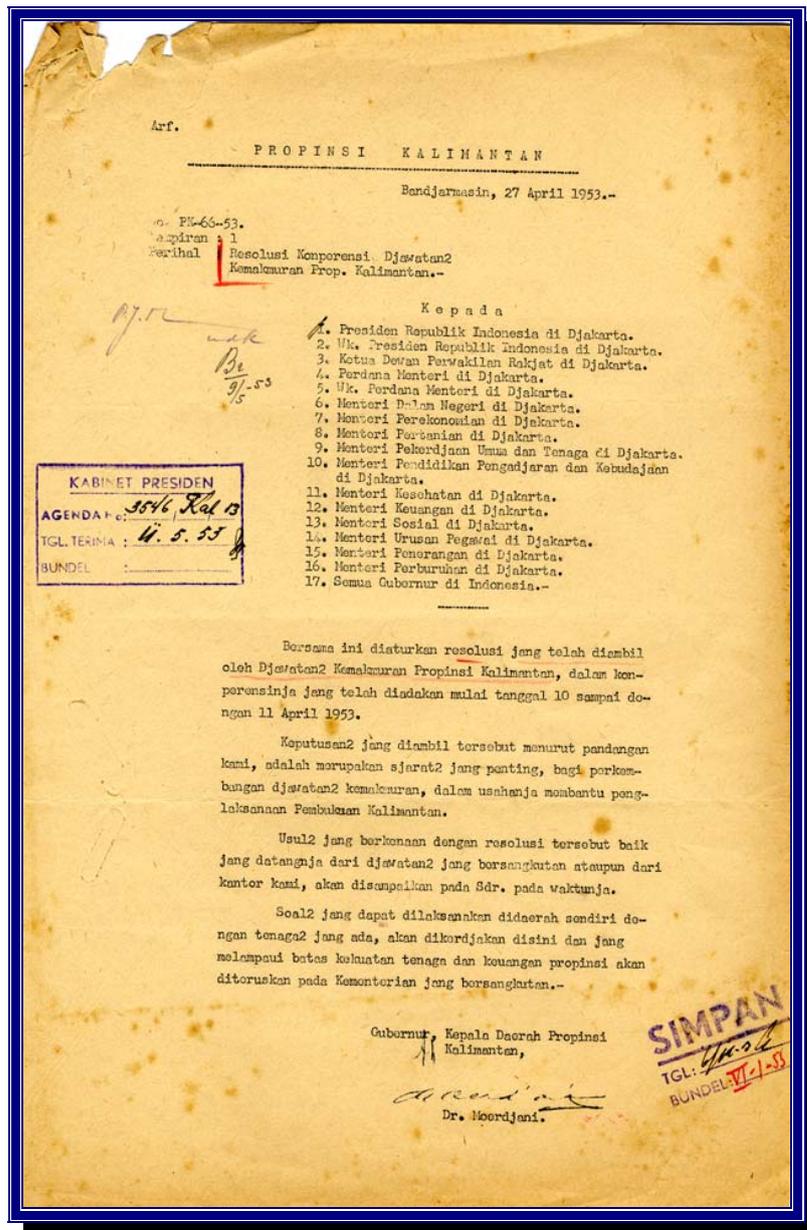
ANRI : Kempen Japenprokal, 117/2



Halaman awal dari proposal Dewan Pembangunan Ekonomi tentang pembukaan Kalimantan selaku perwujudan kemakmuran raksasa,

4 Agustus 1952.

ANRI : Kabinet Presiden 849



Surat dari Dr. Moerdjani, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan kepada Presiden tentang Resolusi Konperensi Jawatan-jawatan Kemakmuran Propinsi Kalimantan yang diadakan pada tanggal 10 – 11 April 1953 dalam usahanya membantu pelaksanaan pembukaan Kalimantan 27 April 1953.

ANRI : Kabinet Presiden 613



Jawatan Penerangan Kabupaten Kandangan, Kalimantan Selatan menggunakan penerangan secara tertulis (slogan) dalam memberikan pengertian bagaimana susunan pemerintahan daerah.

16 Juni 1952

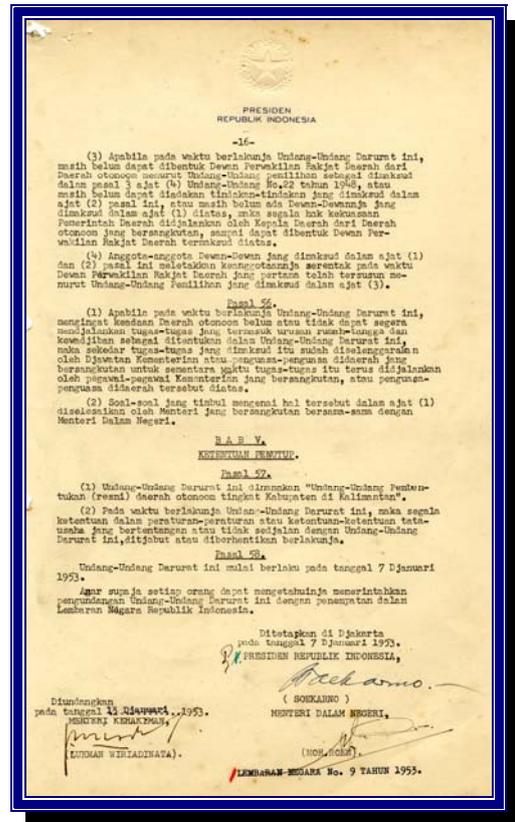
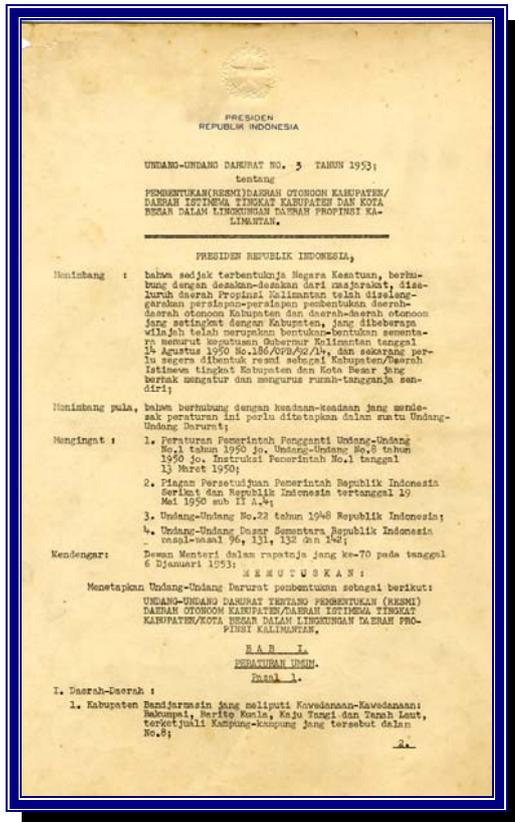
ANRI : Kempen 160652



Pertemuan Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan masyarakat Amuntai, dalam rangka kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Banjarmasin, Amuntai, Negara, Danau Panggang dan Babiri di Kalimantan Selatan

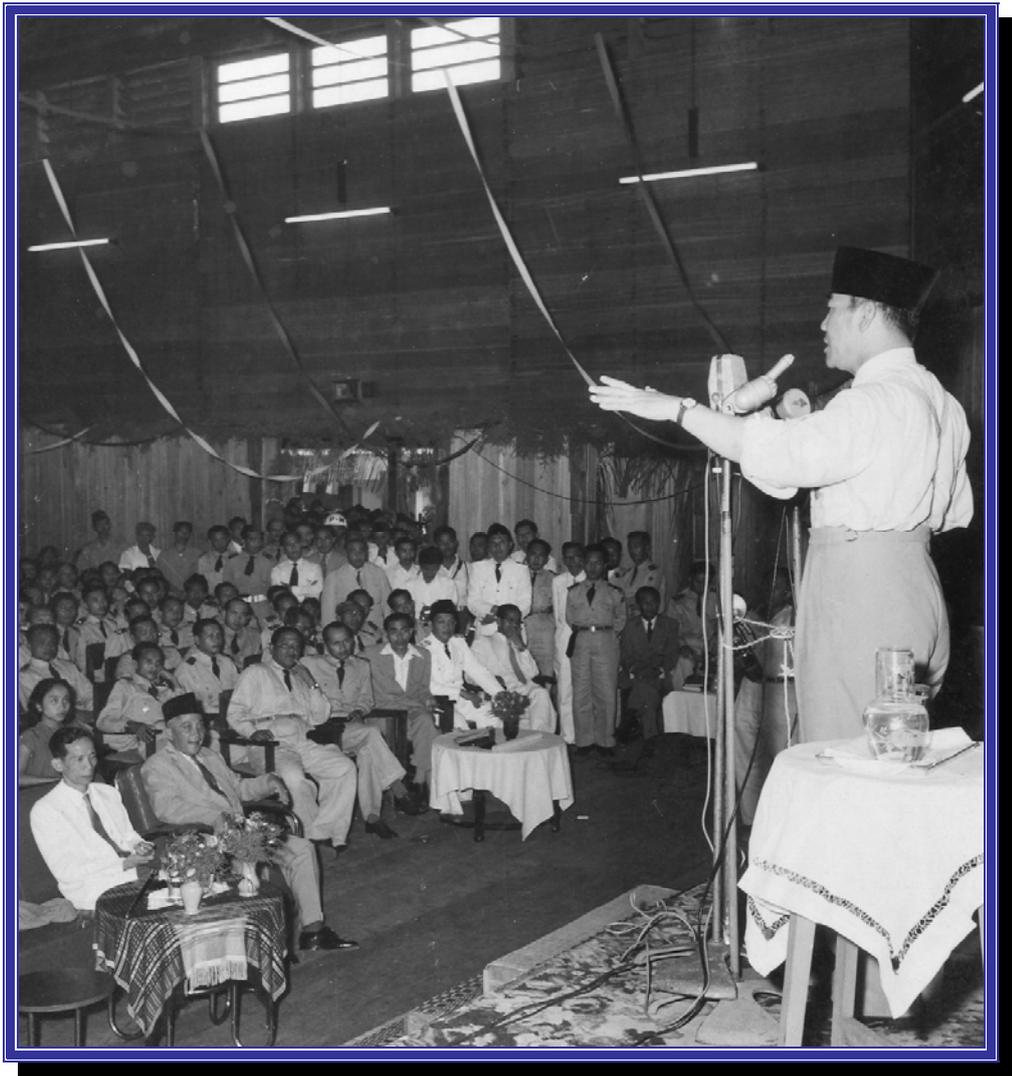
8 Juli 1952

ANRI : Kempen 520708 LL 3



Bagian awal dan akhir dari Undang Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan beserta
penjelasannya,
7 Januari 1953.

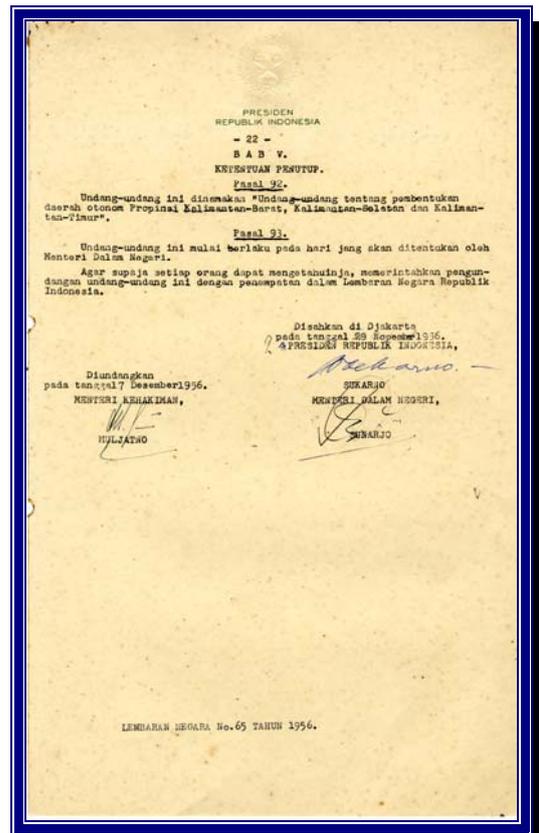
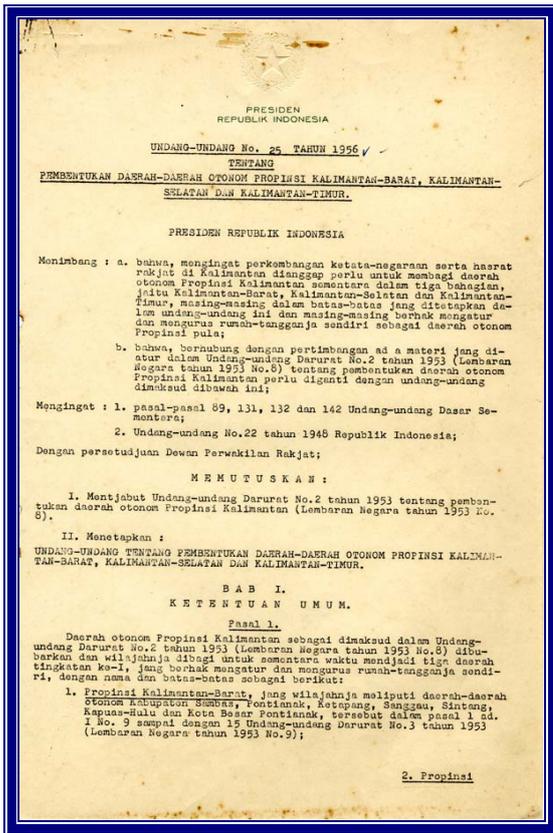
ANRI : Setkab UU Darurat 1950-1960, no. 88



Pertemuan Presiden Soekarno dengan para Pamongpraja, anggota Angkatan Perang dan Wakil-wakil Organisasi/Partai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka kunjungan Presiden ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan persatuan rakyat Indonesia.

10 Desember 1955

ANRI : Kempen 551210 LL 38



Bagian awal dan akhir dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, beserta memori penjelasan, 29 November 1956.

ANRI : Setkab UU 1950-1960 no.199

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 195 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : surat bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 27 September 1956 No. Des 53/1/49 yang mengusulkan agar pada Kota Besar Bandjarmasin diperkenankan memakai lambang Kota yang gambarnya disahkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandjarmasin tertanggal 26 Oktober 1954 No.27/DPR/I-1 yang dibetulkan pada tanggal 28 Djanuari 1955;
- Menimbang : tidak berkeberatan memperkenankan Kota Besar Bandjarmasin untuk memakai lambang, yang gambarnya dibuat sebagai dimaksud diatas;
- Mengingat : pasal 142 dan 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memperkenankan Kota Besar Bandjarmasin memakai lambang Kota yang gambarnya disahkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandjarmasin tanggal 26 Oktober 1954 No.27/DPR/I-1 yang dibetulkan pada tanggal 28 Djanuari 1955.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Arsip Negara,
5. Kota Besar Bandjarmasin.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

Sunarjo
SUNARJO

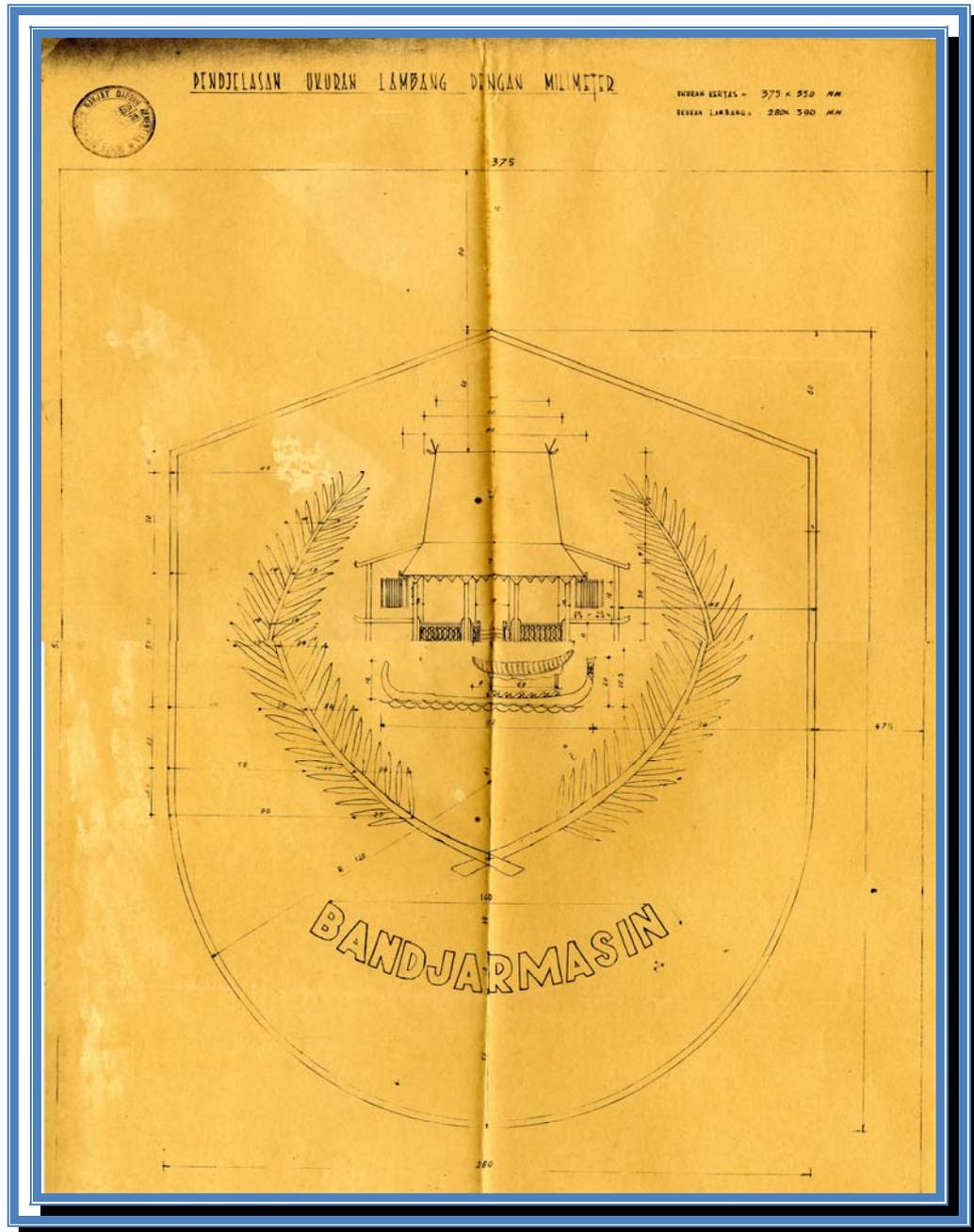
MENTERI PENDIDIKAN PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,

Sarino Mangunpranoto
SARINO MANGUNPRANOTO

Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1956 tentang Pemakaian Lambang Kota Besar Banjarmasin yang gambarnya disahkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS)

14 Desember 1956.

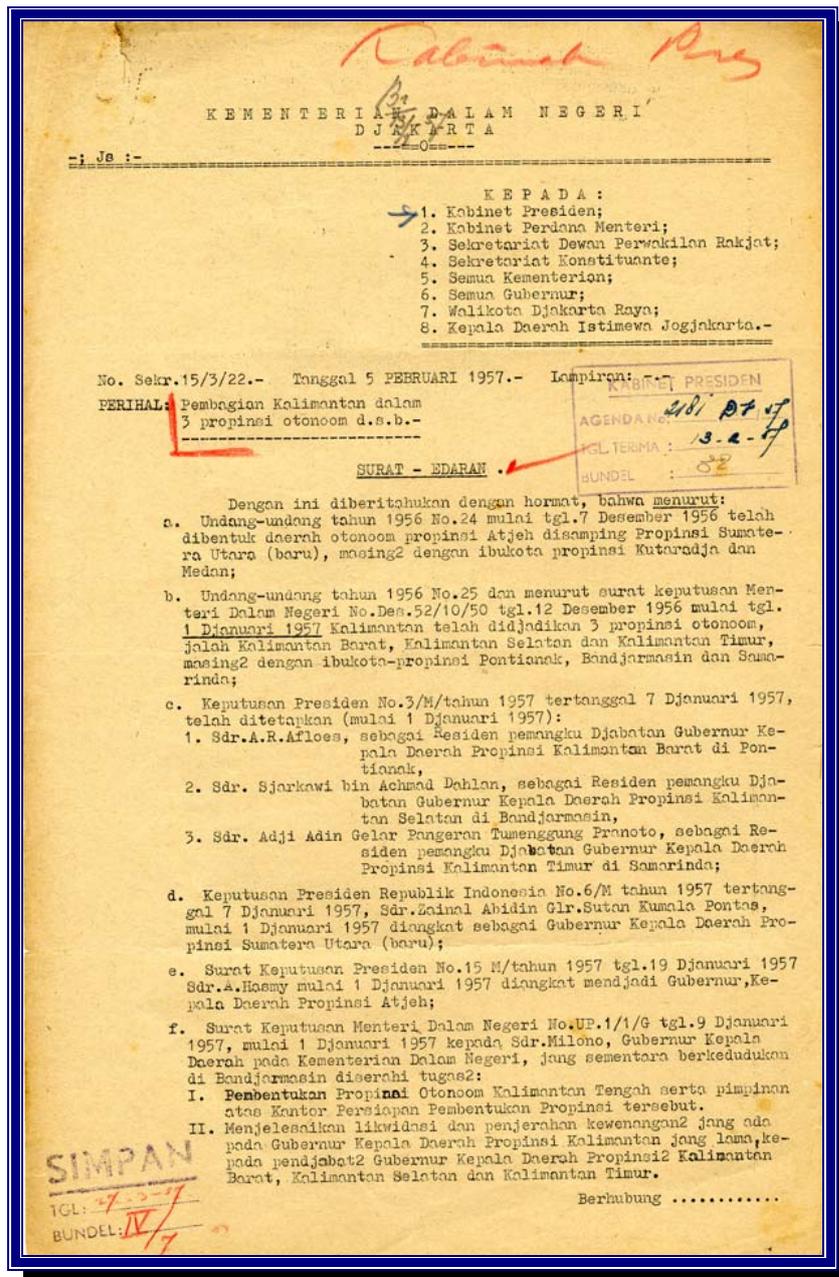
ANRI : Setkab Keppres 1950-1960, no. 1358



Lambang Kota Besar Banjarmasin yang gambarnya disahkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS)

14 Desember 1956.

ANRI : Kabinet Presiden 878



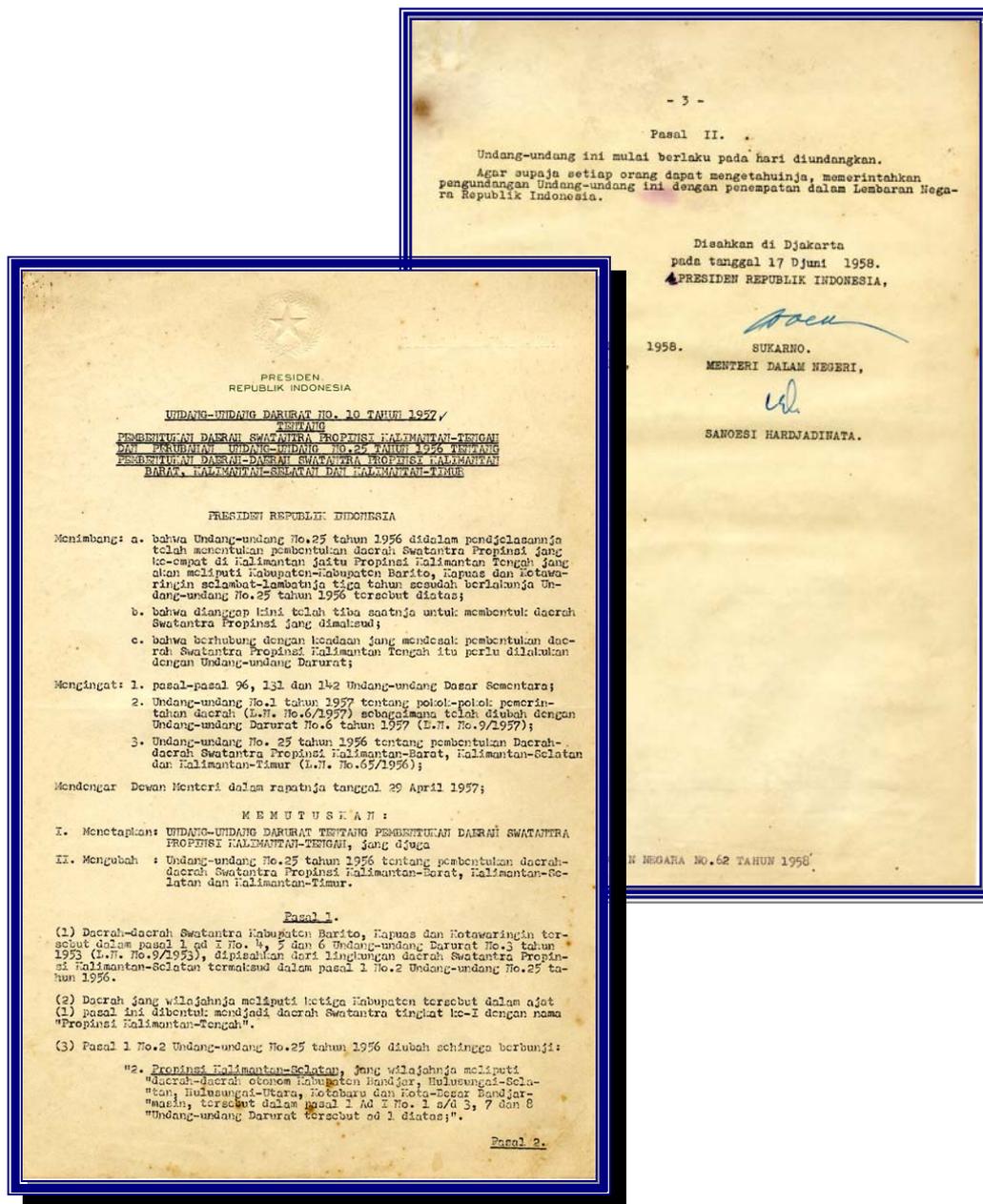
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo kepada Direktur Kabinet Presiden tentang pembagian Kalimantan dalam 3 Propinsi otonom terhitung tanggal 1 Januari 1957 dan pengangkatan Sjarkawi bin Achmad Dahlan sebagai Residen pemangku jabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 5 Februari 1957.

ANRI : Kabinet Presiden 901



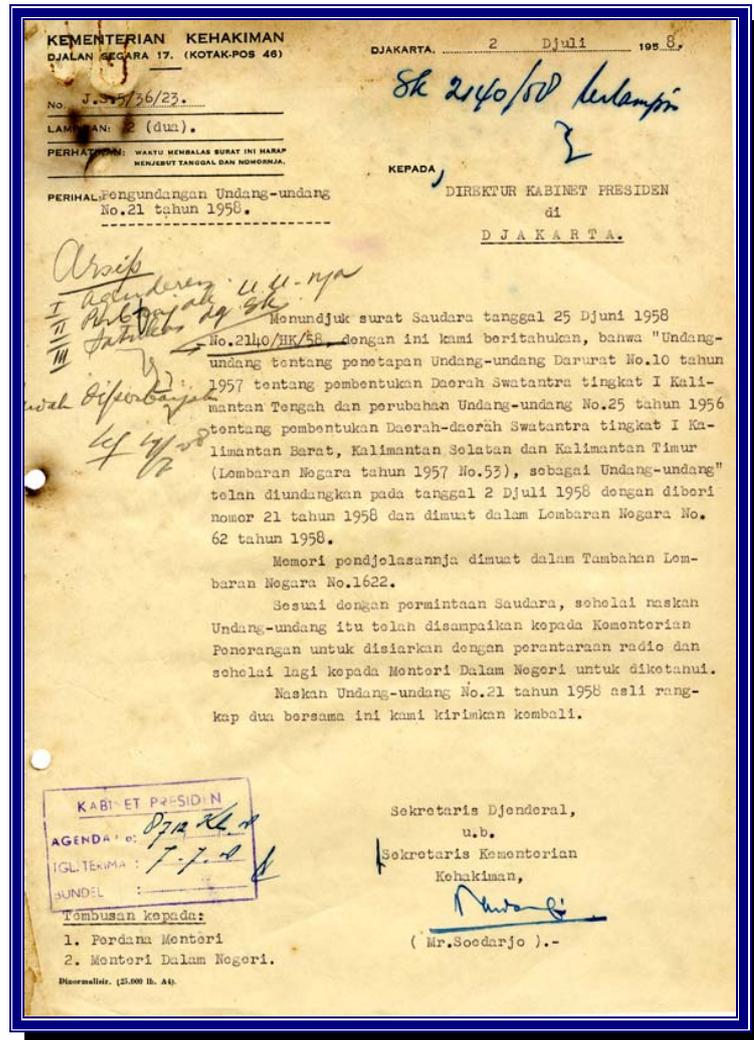
Sjarkawi bin Achmad Dahlan pemangku jabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan bersama para tamu di depan Kantor Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin,
5 Mei 1957.

ANRI : Kempen Japenprokal 10



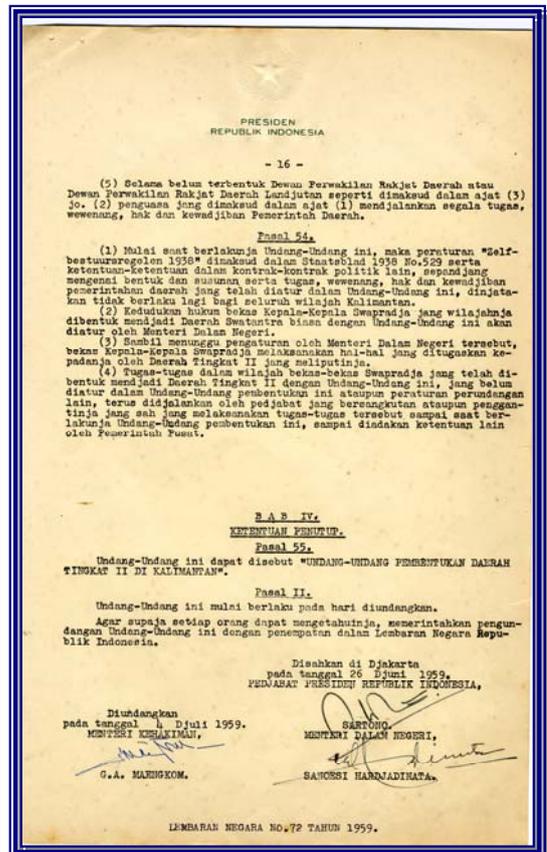
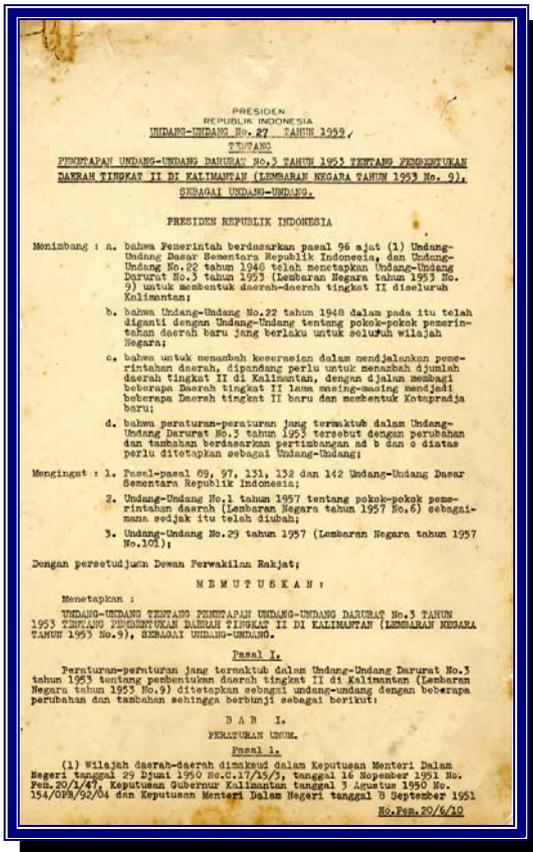
Undang Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah
dan Perubahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur, beserta penjelasannya,
7 Mei 1957.

ANRI : Setkab UU Darurat 1950-1960, no. 145



Surat dari Mr. Soedardjo Sekretaris Menteri Kehakiman kepada Direktur Kabinet Presiden tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 menjadi Undang Nomor 21 Tahun 1958 mengenai pembentukan daerah swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 2 Juli 1958.

ANRI : Kabinet Presiden 262



Bagian awal dan akhir dari Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang 26 Juni 1959.

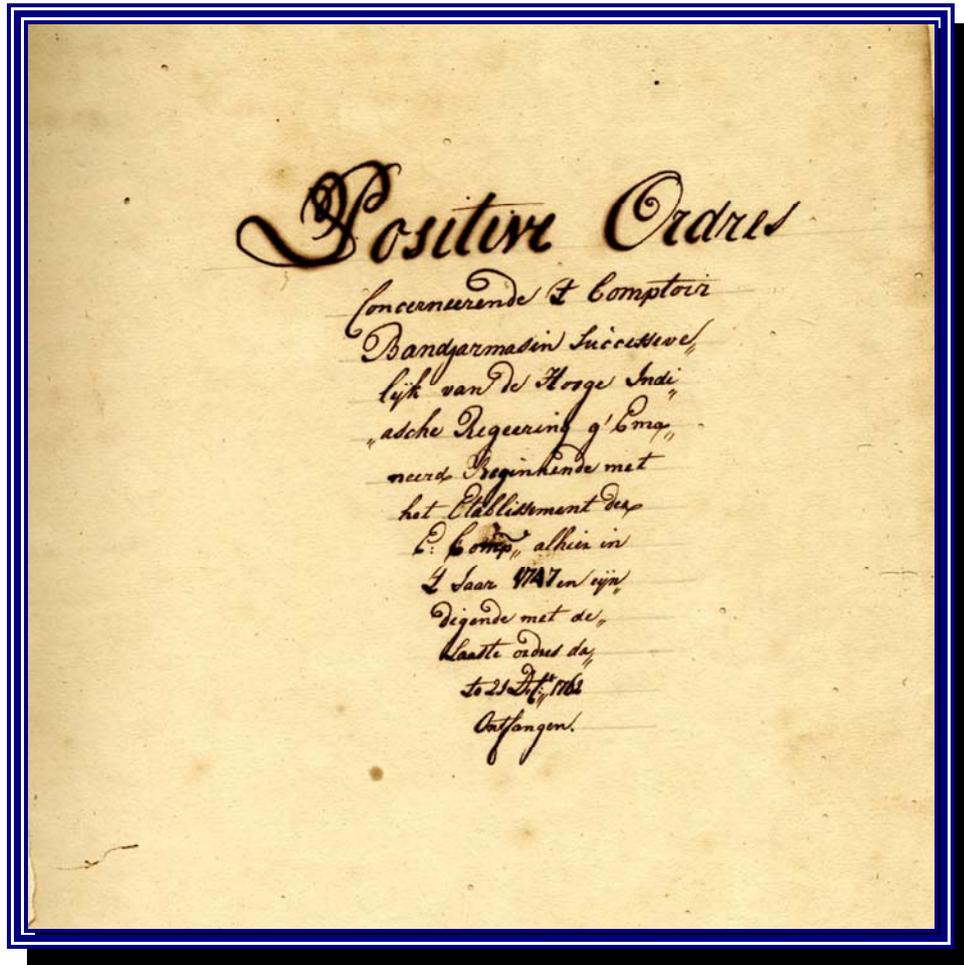
ANRI : Setkab Undang-Undang 1950-1960, no. 314



Pelantikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Abrani Sulaeman
oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Ipik Gandamana di Banjarmasin,
26 September 1963.

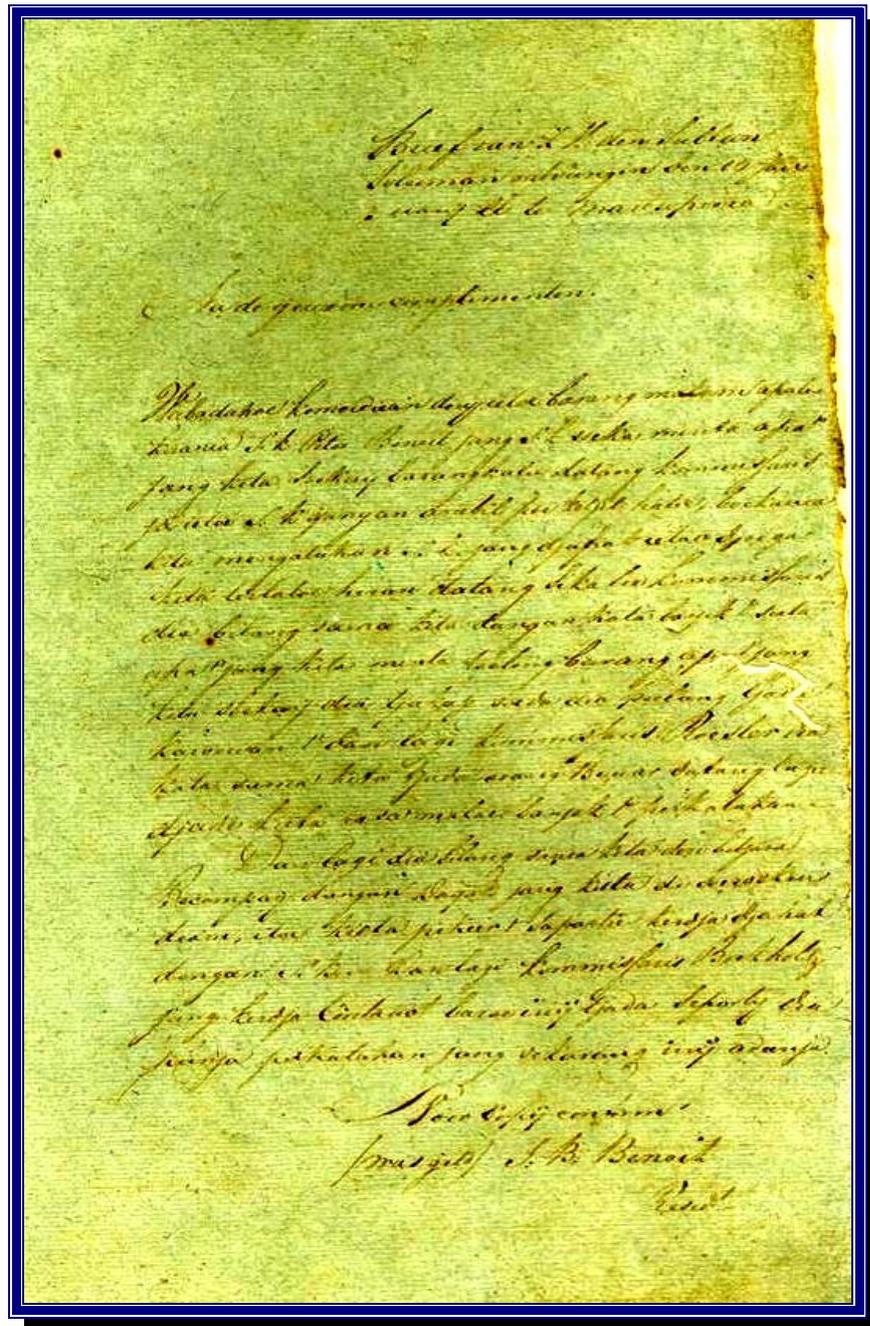
ANRI : Kempen 11978

POLITIK dan Keamanan



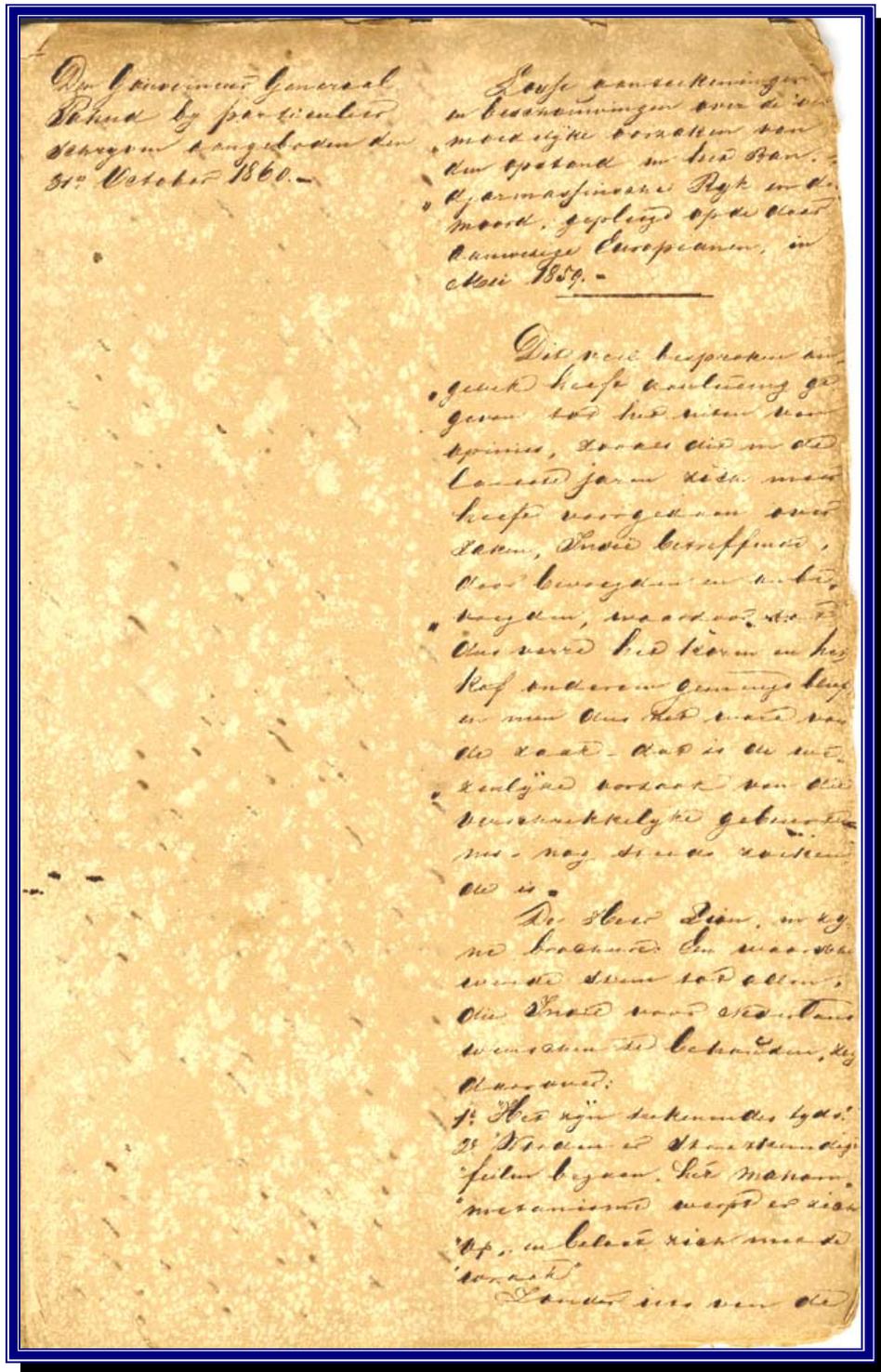
Positive Orders, perintah pimpinan tertinggi Hindia Belanda di Batavia sehubungan dengan berdirinya cabang VOC di Banjarmasin, 1742-1762.

ANRI: Borneo Zuid en Oostkust/105



Surat dari Sultan Sulaiman ditulis dalam bahasa Melayu kepada Residen Banjarmasin mengenai pembicaraan antara pihak Kompeni dan masyarakat Dayak, 1823.

ANRI : Kontrak Borneo 62



Catatan sejarah pemberontakan di Banjarmasin,
Mei 1859.

ANRI :Borneo Zuid en Oostkust 136/16



Skets Pangeran Antasari,
Pimpinan Perang Banjar 1856-1905
ANRI: P01-383



Skets Pangeran Hidajat dari Kesultanan Banjar, bersama dengan Pangeran Antasari memimpin Perang Banjar 1856-1905

ANRI: P04-391

SUSUNAN PENGURUS GERAKAN RAHASIA BANDJAR-HULUSUNGAI.

1. Nama dan tempat:
Gerakan ini bernama SJAIFULLAH (Pedang Allah) didirikan pada bulan XII tnh 1945 (setelah mengetahui Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia) berkedudukan di Harujan (Barabai).
- II. Maksud dan tujuan:
Gerakan ini bermaksud menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menentang kapitalisme dan imperialisme.
- III. Djalan untuk mencapai maksud tersebut:
1. Menginsyafkan rakyat akan kemerdekaan sebagai bangsa, dan Negara Republik Indonesia jg diproklamkan sedjak tanggal 17-Agustus 1945.
 2. Mengadakan gerakan sabotase, intimidasi, provokasi, dll.
 3. Mengadakan serangan2 gerilla terhadap pertahanan musuh, petroli, pengangkutan2 musuh, dsb.
 4. Mengadakan pemberontakan serentak terhadap kekuasaan Belanda.
- IV. Susunan pengurus:
- A. Pusat Gerakan terdiri 3 orang:
1. Hadji Hasjim bin Hadji Tuhalus Ketua.
 2. H.A. Marzuki bin Thaib Penulis.
 3. Alibaderun bin Dani..... Bandara.
- B. Usaha Keuangan dipimpin oleh:
1. Hadji Utuh bin Hadji Hasjim,.... Ketua.
 2. Adi Dardi bin H.Ahmad..... Penulis.
 3. Gezali bin Ahim..... Bandshara.
- C. Usaha perendjataan dipimpin oleh:
1. Hadji Dermawi bin H.Maris..... Ketua.
 2. Selamat bin Awa..... Penulis.
 3. Mansur bin Gulung..... Bandshara.
- D. Badan Propaganda:
1. Hadji Seid bin H.Hasjim..... Ketua.
 2. Asnawi bin Rais..... W.Ketua
 3. Dermawi bin Sarudji..... Penulis I
 4. R.Djubeidi bin H.Ludin..... " II.
 5. Achmad bin Maskur..... Bandshari I
 6. Burhan bin H.Tawan..... " II.
 7. Sahran bin Tulamak..... Pembntu Umum.
- E. Badan Pengatju dan pengumpul:
1. Hassan Basori bin Asnail..... Pemimpin (Komandan)
 2. Hamzah bin Djehri..... Pembntu (Adjuden I)
 3. Tulamak bin Rais..... " (" II).
- Keterangan:
A, B, dan C. masing2 mempunyai pembantu 20 orang, bagian D. pembantu 71 orang.
Bagian E. mempunyai pasukan bersenjata lengkap 144 orang jg terbagi atas 3 tempat atau 3 Seksi. Di kota2 dan desa2 terdapat 3-5 orang anggota jg siap menunggu perintah untuk menjalankan pengatjuan.

Berkas organisasi Gerakan Rahasia Bandjar Hulu Sungai berpusat di Harujan Barabai Kalimantan Selatan yang ingin menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desember 1945.

ANRI : Djogja Documenten 226



Presiden Soekarno saat "Rapat Raksasa" di Hulu Sungai,
14 – 15 September 1950.

ANRI : Kempen 501312



Pembukaan kursus Pengetahuan Umum Kandangan dengan peserta pemimpin dan pengurus cabang Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Sjuro Maslimin Indonesia (Masjumi), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan beberapa organisasi lainnya, 24 Februari 1951.

ANRI : Kempen 240251



Kunjungan Presiden Soekarno ke Kalimantan Selatan,
tampak para pelajar sedang menyanyikan Indonesia Raya,
10 Desember 1955.

ANRI : Kempen 551210 LL 25



nst.1231/59.

PIDATO P.J.M. PRESIDEN PADA RAPAT RAKSASA
DI BANDJARMASIN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 1959.

Saudara-Saudara, anak-anakku sekalian,

Lebih dahulu Bapak menjampaikan salam Islam: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian marilah kita memekikkan merdeka dengan suara jang gegap gempita, menggeledek, mengguntur membelah angkasa : Merdeka!

Tatkala Bapak datang disini tadi, Bapak agak terperandjat djuga tetapi keheran-heranan, sebab sebenarnja didalam programma tidak tertjantum bahwa akan diadakan rapat raksasa di Bandjarmasin. Tetapi ternjata dengan mendadak Bapak diminta berpidato dihadapan rakjat djelata. Jah, apa boleh buat. Insja Allah S.W.T. Bapak akan memberi sedikit wedjangan. Bapak memang selalu berkata, bukan rakjat untuk Sukarno, tetapi Sukarno untuk rakjat. Malahan inipun sudah tempo hari saja katakan, kalau saja sudah berhadapan dengan rakjat djelata jang beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, beratur-ratus ribu, malahan berhadapan dengan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi jang matanja bersinar-sinar, ja, jang matanja bersinar-sinar memandang kepada saja laksana sinarnja bintang di langit jang abadi, saja merasa mendjadi segar kembali.

Ja, memang saja sedang didalam perdjalanan, anak-anakku. Tanggal 1 September pergi ke Atjeh, ke Kutaradja, ke Meulaboh, ke Medan di daulat oleh rakjat dua kali. Kemarin ke Tandjung Pinang di Riau. Tadi pagi berangkat ke Bandjarmasin. Saudara-Saudara dan anak-anak sekalian bisa membayangkan, bahwa badan saja agak terasa letih. Tetapi sekarang sesudah berhadap-hadapan muka dengan Saudara-Saudara sekalian dan anak-anak, saja lupa akan letih saja. Djiwa mulai hidup kembali, berkobar-kobar, menjala-njala, saja merasa muda kembali, lebih muda daripadamu.

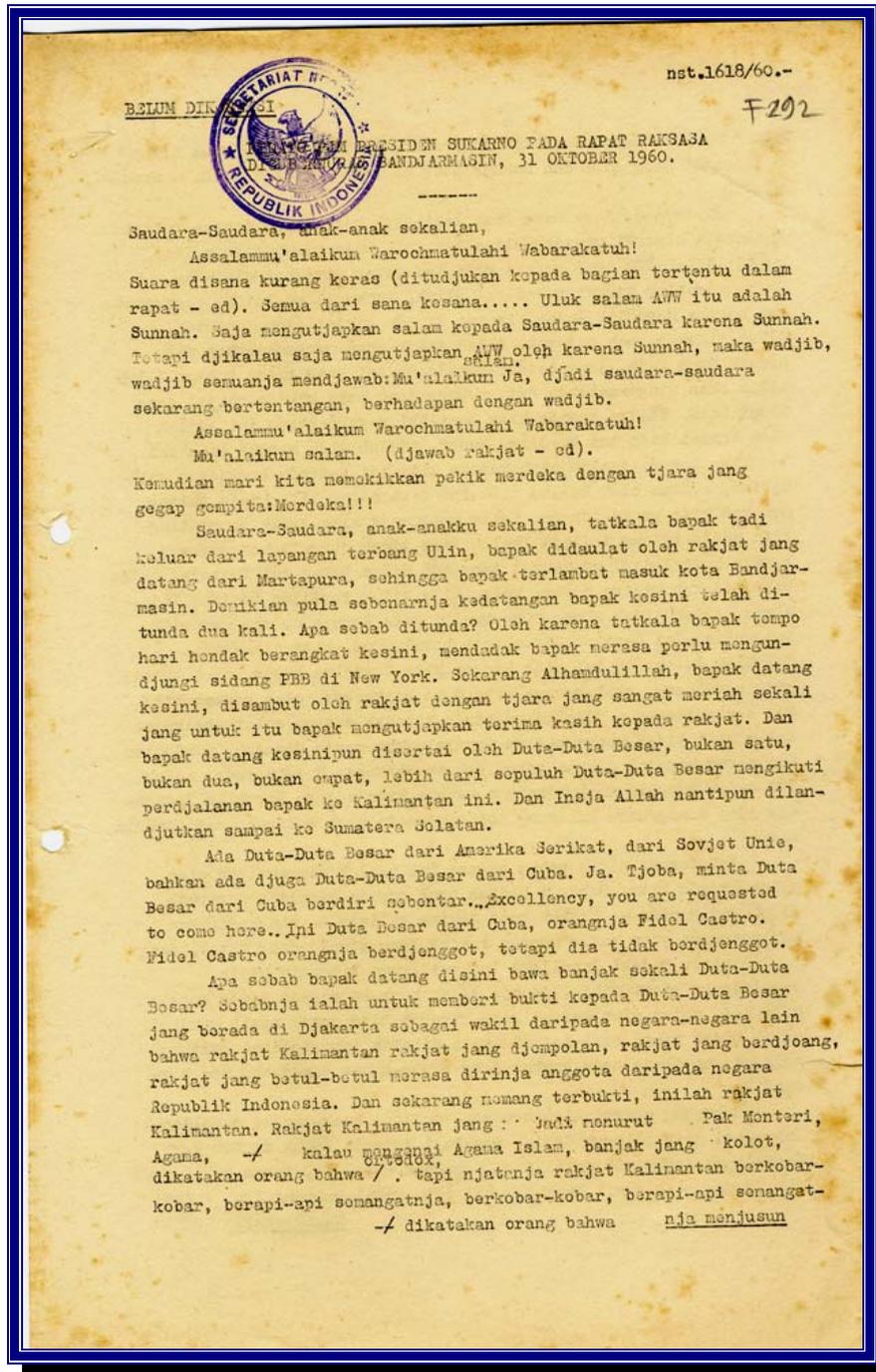
Berulang-ulang tadi Bapak Maladi dan Bapak Prijo, mentjeriterakan kepadamu tentang hal kembali kita kepada UUD'45: Bahwa pada tanggal 5 Djuli jang lalu oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dinjatakan bahwa kita kembali kepada UUD '45. Bahkan UUD '45 itu dinamakan UUD proklamasi.

Barangkali diantara Saudara-Saudara ada jang bertanja, proklamasi diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945, masakan mendadak sekonjong-konjong, tiba-tiba hari itu djuga sudah lahir pula UUD. daripada negara jang baru jaitu negara Republik Indonesia? Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 laksana baji lahir daripada haribaan ibu. Apakah UUD. djuga begitu, lahir, - kata orang Djawa adalah perotjot -,bersama-sama dengan sang baji itu?

Anak-anakku

Bagian awal dari Pidato Presiden Soekarno pada rapat raksasa
di Banjarmasin,
7 September 1959.

ANRI : Pidato Presiden 114



Bagian awal Pidato Presiden Sukarno pada rapat raksasa di Gubernuran Banjarmasin, 31 Oktober 1960.

ANRI : Pidato Presiden 232

Perekonomian

PRESIDIUM KABINET
DWIKORA.-

LEGGER

643/10/66
Djakarta, 5 Djuni 1966. -

No. : *Es/ 1198/e.6/1966*
Lampiran : -
Perihal : Mohon sebagian iuran revolusi jang didapat di Kal. Selatan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan . -

K e p a d a
Jth. Gubernur/Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan
di
BANDJARMASIN.-

Menunjuk surat Saudara kepada Presidium Kabinet Dwikora tanggal 12 April 1966 No. VI.A.371-1-1 perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan hormat bersama ini dijelaskan sbb. :

1. U.U. Perimbangan Keuangan telah memerintji setjara limitatif dari penerimaan Pemerintah berapa jang diberikan kepada Pusat dan berapa jang diberikan kepada Daerah, sehingga permohonan Sdr. Gubernur tersebut diatas disesuaikan dengan Undang2 itu .
2. Dalam hal ada keperluan jang njata penting dan sangat mendesak jang tidak dapat dibiajai dari Anggaran belandja Daerah maka hal jang demikian dapat dikemukakan menurut prosedur jang sudah ada .

WAKIL PERDANA MENTERI
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.
u.b.
Sekretaris,
(Selo Soemardjan) .-

*Regger ke bal. ke
Dj. Dj. Ek. Dj. W. De
ka kl. 6
5/7/66*

CC.: 1. J.M. Menteri Dalam Negeri
2. Jth. Deputy Menteri Keuangan .-

SELESAT DISIAPAN (PERSIAPAN)	TGL: <i>5/7-66</i> PARAP: <i>10</i>
SELESAT DIKIRIM (PELAKSANAAN)	TGL: PARAP:

Surat dari Sekretaris Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tentang permohonan agar sebagian iuran revolusi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, disertai lampiran
5 Juli 1966.

ANRI : Waperdam Ekubang 170

Afschrift

Separate - Artikelken.

N: 15

1.

Aangenomen in het
jongst genoemde
contract van vreed,
jehup tusjchen den
Sultaan Tamdjidulla
la, den Pangerang
Ratoe anison en de
verdere grooten van
Borngemaasjong aan
de eene en de Neder,
landjche oost Indi,
sche compagnie aan
de andere zijde, onder
den 10 Mei deses jaars
1747 enige notable
veranderingen zijn
gevraacht zoo wel
ten opzichte van den
prijs van de peper als
andere wares, dewelke
hetzelve soude kunnen
doen aanvullen als
een nieuw contract,
tegen de intentie der
contracterende partijen
zoo snerdig gevorderd
by

Kontrak antara Sultan Tamdjidulla dan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) mengenai perubahan harga lada, 10 Mei 1747.

ANRI : Kontrak Borneo 10



Pasar Baru Banjarmasin,
± 1920.
ANRI : KIT 147/1



Pedagang martabak di Pasar Belintang, Martapura,
Kalimantan Selatan
19 April 1951.

ANRI : Kempen 512505



Suasana Pasar Babiri, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan,
8 Juli 1952.

ANRI : Kempen K520708 LL 8-11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.182 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pertanian kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1953 No.7900/Um;
b. Peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tentang larangan menangkap ikan sepat-siam tanggal 22 Djuni 1953 No. 3 tahun 1953;
c. surat bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September dan tanggal 6 Oktober 1953 No. Des 9/65/5 dan No.9233/M.;
- Menimbang : a. bahwa Menteri Pertanian sangat berkeberatan terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tersebut, yang mewajibkan djuga kepada Kantor Perikanan Darat dan Mantri-mantri Perikanan Darat untuk menjelidiki dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-daerah ini, karena pegawai-pegawai termaksud terutama hanja mempunjai tugas memberikan penerangan seperlunja;
b. bahwa berhubung dengan itu pasal 4 ayat (2) dari peraturan-daerah termaksud perlu ditiadakan, untuk perubahan peraturan-daerah mana diperlukan waktu sekadarnja;
c. bahwa oleh karena itu waktu 3 bulan untuk pengesahan termaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.22 tahun 1948 perlu diperpanjang dengan 3 bulan;
- Mengingat : pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1948 dan pasal 35 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Waktu untuk mengesahkan peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tentang larangan menangkap ikan sepat-siam tanggal 22 Djuni 1953 No.3/1953 mulai dengan tanggal 27 September 1953 diperpanjang dengan 3 bulan.

SALINAN

Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1953 tentang Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan No.3/1953 tanggal 22 Juni 1953 mengenai larangan menangkap ikan sepat-siam, 27 Oktober 1953.

ANRI : Setkab Keppres 864

PRESIDIUM KABINET
DWIKORA

LEGGER
532/4/66

No. : *Es/1108/H3/1966.* Djakarta, 23 Juni 1966.-

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Penjaluran barang2 jang tertumpuk di Gudang Pelabuhan Sampit.-

K e p a d a
J.M. Menteri Perhubungan
di DJAKARTA.-

Menarik surat kawat dari Penguasa Pelabuhan Sampit jang ditunjukan kepada Presidium Kabinet No. 67/R/66, jang bersama ini kami sampaikan djuga salinannya, kami sangat mengharapkan kesediaan Jang Mulia untuk mengusahakan agar barang2 jang tertumpuk dipelabuhan sebagaimana disebutkan dalam surat kawat itu segera disalurkan kealamat jang semestinya.-

WAKIL PERDANA MENTERI
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
u.b.
Sekretaris,
(Selo Soemardjan).-

*pesan kembali ke
Kaj. Dep. Ek. Dji. Dep.
deke Tel. 6. 19/66*

C.C. : P.T. Deputy Menteri Perhubungan
laut di Djakarta.-

SELESAI DISIAPKAN (PERSIAPAN)	TGL: <i>23/6-66</i>
SELESAI DIKIRIM (PELAKSANAAN)	TGL: <i>23/6-66</i>

SSL/nt.

Surat dari Sekretaris Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Selo Soemardjan kepada Menteri Perhubungan tentang penyaluran barang-barang yang tertumpuk di gudang Pelabuhan Sampit, 23 Juni 1966.

ANRI : Waperdam Ekubang 480

Hukum

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 78 TAHUN 1953.

TENTANG

PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI BANDJARMASIN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan
Tentara di Bandjarmasin;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950
(Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan
dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan
peradilan ketentaraan" ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun
1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Ten-
tara di Bandjarmasin :

Kapten S U N A R S O

Kepala Bagian V Res. Inf. 22 T.T.VI.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Mei 1953.

R. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.
MENTERI PERTAHANAN R.I.,

Wilopo
WILOPO.
MENTERI KEHAKIMAN,

Loekman Wiradinata
LOEKMAN WIRIADINATA.

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1953
tentang pengangkatan Kapten Sunarso sebagai Hakim Perwira
pada Pengadilan Tentara di Banjarmasin,
12 Mei 1953.

ANRI : Setkab Keppres 764



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 114 TAHUN 1953

TENTANG

PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI BANDJARMASIN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin :

KAPTEN H A R T A D I

Kepala Bagian V Res. Inf. 21 Terr. VI.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 27 Djuni 1953.

P. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN A.I.

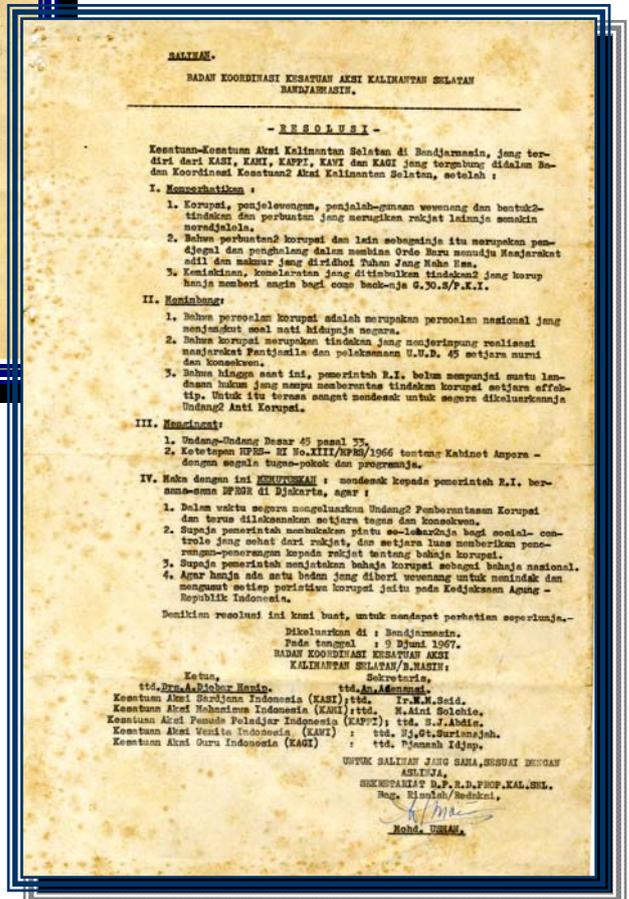
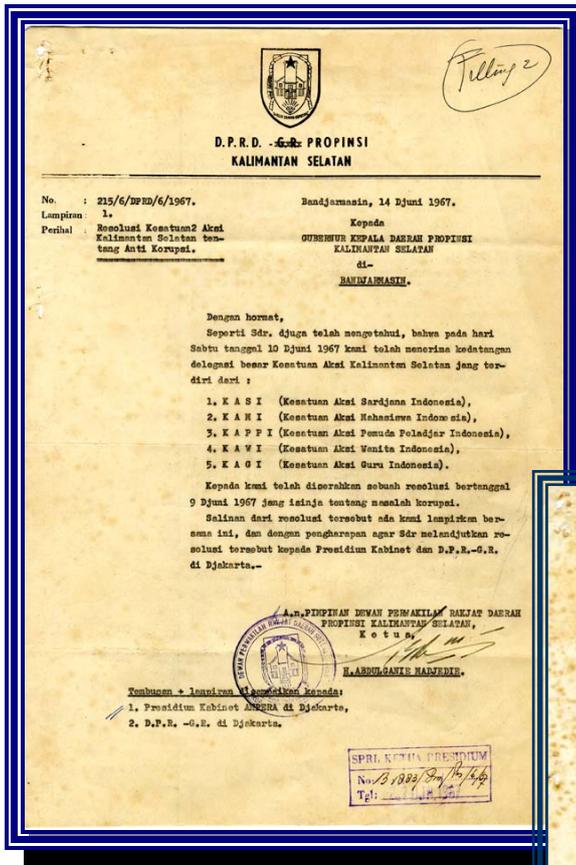
WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

LOEKMAN WIRADINATA.

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1953
tentang pengangkatan Kapten Hartadi sebagai Hakim Perwira
pada Pengadilan Tentara di Banjarmasin,
27 Juni 1953.

ANRI : Setkab Keppres 797



Resolusi dari Badan Koordinasi Kesatuan Aksi Kalimantan Selatan tentang desakan untuk segera mengeluarkan UU Pemberantasan Korupsi, disertai surat pengantar dari pimpinan DPRD kepada gubernur Kalimantan Selatan, 9 Juni 1967.

ANRI: Sekretariat Kabinet 6



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Januari 1978.

Nomor 145/13/1/1978.

Lampiran :

Perihal : Akhli Waris dari Pahlawan Nasional, almarhum Pangeran Hidayatullah.

Kepada

Yth. Sdri. Ratu Jus Roostianah
d/a. KPAD. Jln. Sriwijaya 61A

Cianjur

JAWA BARAT.

Cimahi

Berkenaan dengan surat Saudara tanggal 13 Juni 1977 yang dialamatkan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden perihal sebagai tertera di atas, dengan ini kami permaklumkan sebagai berikut :

1. Setiap regalia (atribut Kerajaan) pelbagai bekas kerajaan lokal/swapraja di Indonesia dahulu yang dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dinyatakan sebagai milik Pemerintah Hindia Belanda.
2. Demikian juga dengan tanahnya seperti halnya dengan Kerajaan Banjarmasin yang dihapuskan oleh Pemerintah Belanda sekitar tahun 1865, menjadi tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Belanda (Negara) di waktu itu.
3. Dengan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dari Pemerintah Negara Belanda kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia, maka baik regalia maupun tanah-tanah bekas kerajaan lokal/swapraja Banjarmasin dengan sendirinya telah turut diserahkan dan berada di bawah penguasaan Negara Republik Indonesia.
4. Dengan demikian Desa Riam Kanan dan Desa Naga Sari dengan sendirinya termasuk tanah yang dikuasai oleh Negara Republik Indonesia.

Demikianlah agar menjadikan maklum.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Wakil Presiden RI up. Sekretaris sehubungan dengan suratnya tanggal 15-8-1977 No.B-363/WK. Pres/Sek/VIII/77.
2. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai laporan.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Inspektur Jendral,



Soedharmo Djajadiwangsa.

15/Jan/1978

Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Ratu Jus Roostianah, ahli waris pahlawan nasional almarhum Pangeran Hidayatullah yang berjuang di daerah Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan, tentang status kepemilikan tanah Desa Riam Kanan dan Desa

Naga Sari,
7 Januari 1978.

ANRI : Setwapres SS HB IX 786

Pertambangan



Mencuci dan mencari butiran intan
yang bercampur dengan pasir di Martapura,
23 Desember 1947.

ANRI : Kempen 71223 LL 75



Perusahaan penggosokan intan di Martapura,
27 Januari 1953.

ANRI : Kempen 530127 LL 4-1



9 MEI 1966
0961 1311 6

TANDA TERIMA
TANGGAL: 997/14/66.
No: AGENON:

REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN

BANDJARMASIN
Djalan Tugu 9 Tilpon 27 & 30

BANDJARBARU
Taman Murtjani Tilpon 65 & 66

No. ; III-2-4-80. Bandjarmasin, 22 April 1966.-
Lampiran : -
Perihal : Sekitar penambangan
bahan galian.-

Kepada
J.M. Menteri Pertambangan
dan Gas Bumi Republik Indonesia
di
DJAKARTA.-

Dengan hormat.

Dengan ini diharap perhatian Jang Mulia terhadap soal-soal jang berikut :

I. D A S A R.

1. Undang2 No. 37 Prp tahun 1960, L.N.No.11 tahun 1960.
2. Keputusan Wakil Panglima Besar III Komando Tertinggi Operasi Ekonomi nomor : kpts 20/WPB-KOTOE TAHUN 1965, tanggal 22 Maret 1965.
3. Surat keputusan Menteri Pertambangan No. 206/M/Pertam/65, tanggal 29 September 1965.
4. Keputusan Presiden No. 311 tahun 1965, tanggal 19 Oktober 1965.
5. Surat keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta selaku Badan Penguasa Produksi Pertambangan Emas dan Perak No. 232/M/Pertamb/65, tanggal 27 Oktober 1965. No. 29/Kep/MUPBAS/65
6. Instruksi Bersama Menteri/Badan Penguasa Produksi Pertambangan Emas dan Perak dan Menteri Dalam Negeri No. 1/Inst/BP3EP/65 tanggal 30 Oktober 1965. No.42/1965
7. Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah.

II. PENAMBAHAN.

Dalam soal penambangan perlu sekali dipisahkan antara:

1. Penambangan jang berupa suatu Perusahaan.
2. Penambangan Rakyat.

Terhadap

Surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan kepada Menteri Pertambangan dan Gas Bumi tentang sikap terhadap penambangan bahan galian antara perusahaan dan penambangan rakyat
22 April 1966.

ANRI : Waperdam Ekubang 732

Perindustrian

Rechtsin de L. & K. v. Borneo (Oorlogjaar 1842)

Project van bevoording tot een Taal met een voorraad van drie Maanden;

Opvoeding	bedrafft van een Jaar in de taal 3 Maanden	bedrafft van een Jaar 1842	ongev. aantal van uitwendig gebruik	Totaal	gevoording tot een Jaar 1842	bevoording van de taal in de taal 1842	Totaal	Project van 1842 van de taal	Aanmerkingen;
400	1120	680	100	780	380	520	1400	900	(onder het restant van het jaer 1842 is bevoording, de aanvoren in het taal jaer / de eerste helft / van 400 bevoording, welke om de project om te maken voording; -

Aanwijzingen den 23^{de} Decembar 1842;
De Revers van L. & K. v. Borneo
Aanvoording

Rencana kebutuhan garam untuk satu tahun,
23 Desember 1842.
ANRI : Borneo Zuid en Oosterafdeling 50-1



Gubernur Kalimantan memberikan sambutan pada upacara
pembukaan pabrik es di Amuntai, Kalimantan Selatan.
1 Pebruari 1953.

ANRI : Djapenprokal No.Pav/166/V/565



Tempat pembakaran batu bata sebagai salah satu
usaha rakyat di Martapura,
4 Juli 1953

ANRI : Kempen 530704 LL 1-1



Menteri Pertanian meninjau pabrik kertas DUVRI di Martapura yang sedang dalam taraf pembangunan gedungnya, 25 Juli 1961.

ANRI : Kempen 610725 LL 2



DEWAN KERAJINAN NASIONAL
INDONESIA NATIONAL CRAFTS COUNCIL

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM DEWAN KERAJINAN NASIONAL
Nomor : 003/DEKRAN/SK/III/86

T E N T A N G

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

KETUA UMUM DEWAN KERAJINAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 10 (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional serta disebabkan beberapa pengurus lama telah pindah/ alih tugas ke daerah lain, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali susunan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 85/M/SK/3/1980 - 072b/P/1980 tanggal 3 Maret 1980 jo. No. 310/M/SK/8/1983 tanggal 13 Agustus 1983 ; 0341/P/1983
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional yang ditetapkan tanggal 29 Januari 1981;
3. Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional No. 05/DEKRAN/SK/III/84 tanggal 23 Maret 1984
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 537/5038/Sospol tanggal 15 Desember 1981 ; perihal : Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Daerah ;
2. Surat Dewan Kerajinan Nasional Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 01/DEKRAN/FS/I/86 tanggal 16 Januari 1986.

Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional No.003/DEKRAN/SK/III/86 tentang susunan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, 31 Maret 1986.

ANRI : Setwapres Umar Wirahadikusuma 331



Kerajinan pot di Megara Kampung Besar
sebelah barat Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
tanpa tanggal.

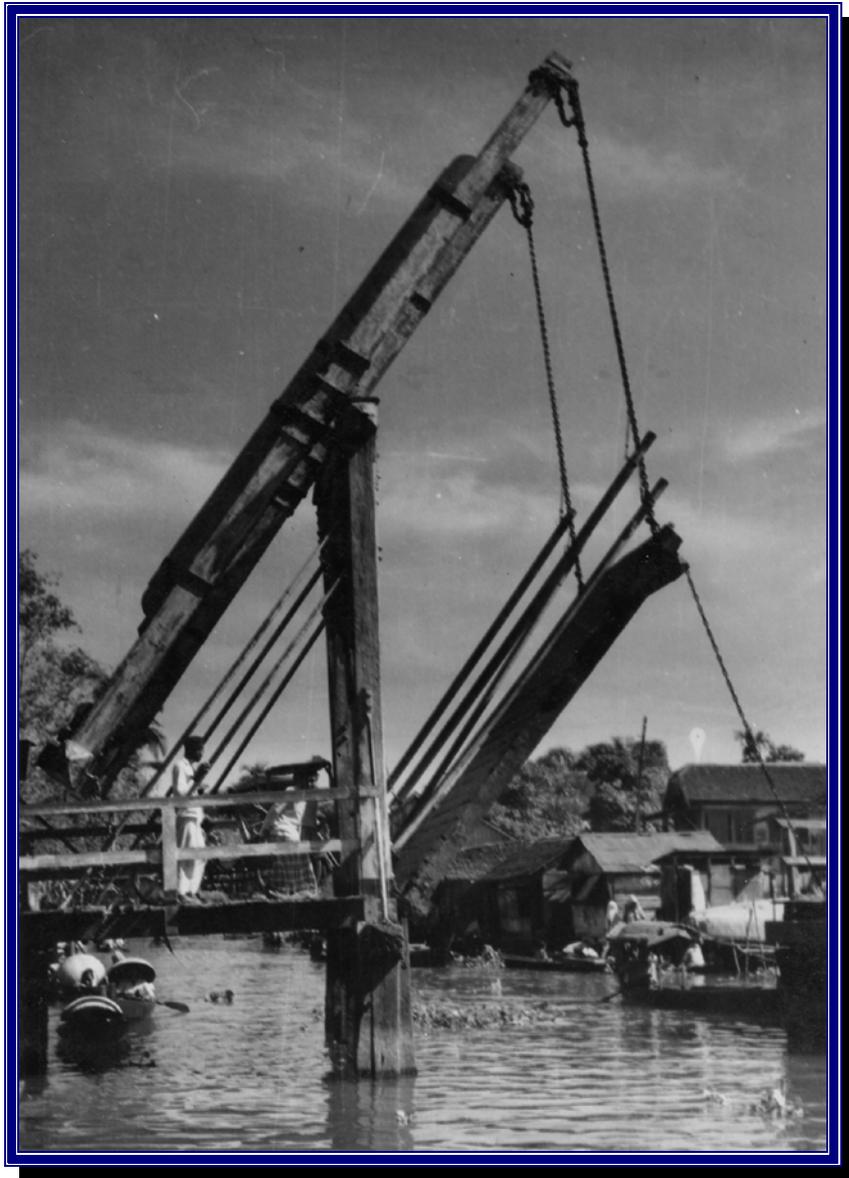
ANRI : KIT 1091/681.

Transportasi



Pemandangan Sungai Martapura di Banjarmasin,
1946.

ANRI : NIGIS A27064



Jembatan yang dapat membuka dan menutup di atas muara
Sungai Barito dan Martapura, Banjarmasin,
7 Juli 1948.

ANRI : Kempen 80704 LL 24



Gerobak lembu di Belintang Martapura, Kalimantan Selatan.
19 April 1951.

ANRI : Kempen 512520



Jembatan lalu lintas di atas Sungai Komseeing di Martapura,
19 April 1951.

ANRI : Kempen 512499



Suasana di depan stasiun kereta api Martapura,
19 April 1951.

ANRI : Kempen 512519



Percobaan hubungan udara oleh AURI di Kalimantan dengan menggunakan pesawat jenis Twin Otter "Barito", 1961.

ANRI : Kempen K610722 LL 1-6



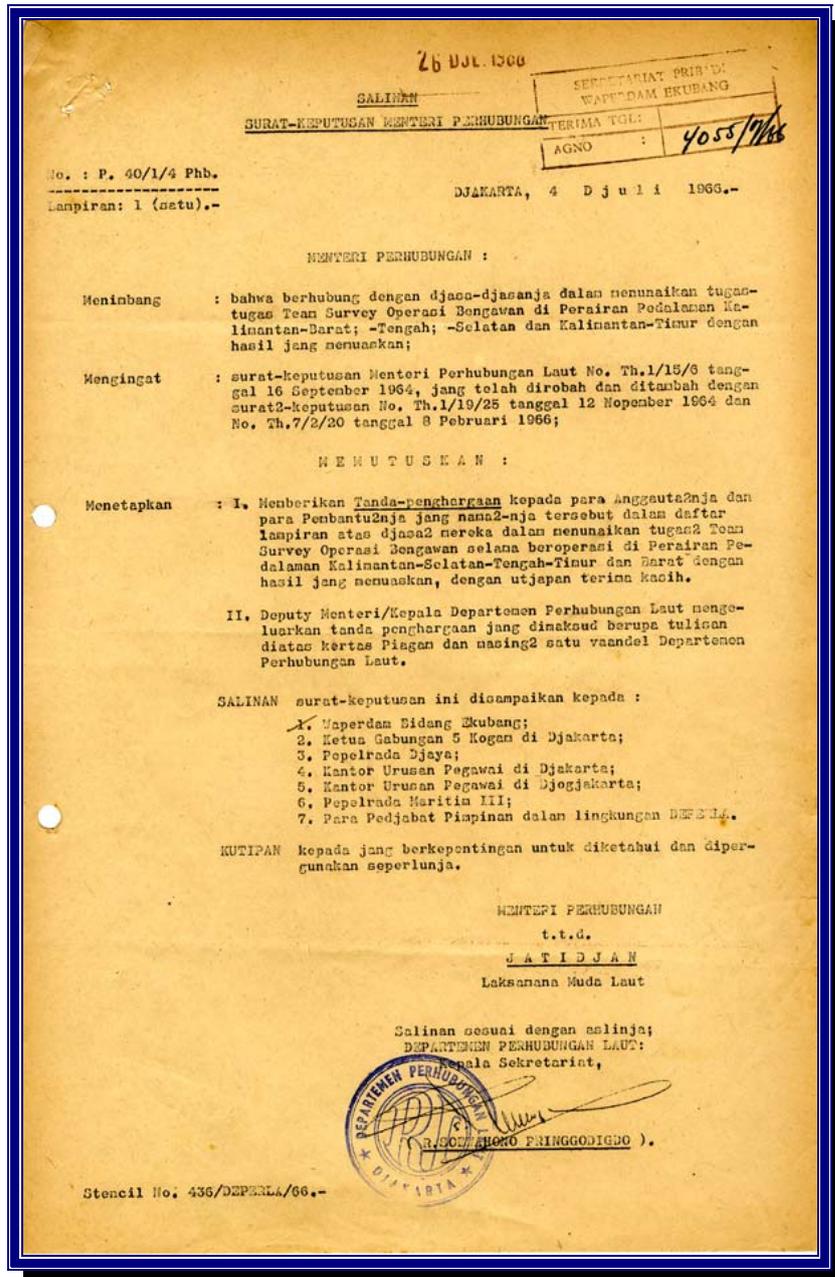
Rombongan Menteri Pertanian Brigjen Dr. Azis Saleh,
tiba di lapangan terbang Ulin Banjarmasin,
22 Juli 1961.

ANRI : Kempen K 610722 LL 1-10



Rombongan Menteri Pertanian Brigjen Dr. Azis Saleh melintasi jembatan Sandang Pangan, di Karang Intan, Banjarmasin yang panjangnya 110 m, 25 Juli 1961.

ANRI : Kempen K610725 LL 3-3



Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.P.40/1/4/Phb tentang pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan para pembantu Tim Survey Operasi Bengawan di perairan pedalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur,
4 Juli 1966.

ANRI : Waperdam Ekubang 482



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

SURAT KEPUTUSAN

No.: 8 / DPRD / KPT / 1975.—

tentang

TERIMA KASIH KEPADA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGE-
RUKAN AMBANG SUNGAI BARITO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Pengerukan Ambang Sungai Barito merupakan harapan seluruh Rakyat Kalimantan Selatan selama bertahun-tahun.
2. Bahwa Pengerukan Ambang Sungai Barito telah dimulai dan pengresmiannya dilakukan pada tanggal 21 Agustus 1975 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan pelaksana Japan Industrial Land Development Corporation Limited.
3. Bahwa DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama seluruh Rakyat Kalimantan Selatan perlu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tanggal 11 Maret 1974. (REPELITA II NASIONAL).
3. Resolusi D P R D Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Oktober 1967 No. 28 / DPRD / RES / 1967.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan No. III-2-1-01/1974 tanggal 28 Maret 1974 (REPELITA II DAERAH).
5. Peraturan tata-tertib D P R D Tingkat I Kalimantan Selatan (Keputusan D P R D Propinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 1971 tanggal 8 Desember 1971).
- MENDENGAR** : Musyawarah DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Sidang ke - II Tahun 1975—1976 rapat ke - 12 tanggal 21 Agustus 1975.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia, atas dilaksanakannya harapan Rakyat Kalimantan Selatan mengenai Pengerukan Ambang Sungai Barito.—

Ditetapkan di : Banjarmasin.

Pada tanggal : 21 Agustus 1975.



GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

Subardjo



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

Ketua,

Aris Kartadipura

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
8. Panulima Daerah Militer X/Lambung Mengkurat di Banjarmasin.
9. Kepala Daerah Kepolisian XIII Kalimantan Tenggara di Banjarmasin.
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
11. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan/Tengah/Timur di Banjarmasin.
12. Kepala Daerah Pelayaran V di Banjarmasin.
13. Administratur Pelabuhan di Banjarmasin.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 8/DPRD/KPT/1975 tentang ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia atas pengerukan ambang Sungai Barito,
21 Agustus 1975.

ANRI : Setwapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX 309

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PIMPINAN WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN
Jalan Tarakan - Gelung Nurul Islam - Banjarmasin.

PERNYATAAN SYUKUR
NOMOR : 1465/PEM/09/KI/1976

Tentang

PERESMIAN ALUR PELAYARAN AMBANG BARITO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Selatan,

dengan penuh khidmat menyatakan :

1. Memanjatkan segala puji dan sepenuh syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa serta menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Soeharto atas pengresmian alur pelayaran Ambang Barito pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 1976.
2. Mengharpakan dengan pemanfaatan alur pelayaran Ambang Barito meningkatkan pula alur kegiatan pembangunan dan pengembangan daerah pedalamannya oleh segala pihak serta memerlukan kelanjutan pemanfaatan dan penerusan pemeliharaannya oleh yang bersangkutan.
3. Mengkaitkan kenyataan Pemanfaatan alur pelayaran Ambang Barito, P.D.T.A. Riam Kanan, Proyek Pengembangan Pertanian Pasang Surut dan berhasilnya berbagai Proyek Pembangunan lainnya, mengesankan bertam bahnya kepercayaan dan harapan kelanjutan pembangunan bertahap dan berencana bersangkutan dengan Proyek Sungai Barito (Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Barito), yang semuanya diharapkan akan makin mengembangkan pembangunan disegala bidang.
4. Mengingat bahwa Ambang Barito merupakan gerbang masuk, diharapkan dengan terbuka alur pelayarannya makin meningkatkan volume keluar masuknya segala yang baik untuk kemajuan dan pembangunan daerah ini, antaranya masuknya tenaga "Babat Alas Mertani", yang berarti makin meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
5. Akhirnya, selalu memanjatkan doa dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bagi keselamatan Bapak Presiden Soeharto dan ternindar dari segala usaha jahat.

Wabillahittaufig wal hidayah. Banjarmasin, 13 Dzulhijdah 1396 H
5 Nopember 1976 M.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Dewan Pimpinan Wilayah
Kalimantan Selatan
PIMPINAN WILAYAH

Ketua,

H. Abdulganie Madjidie

Sekretaris,

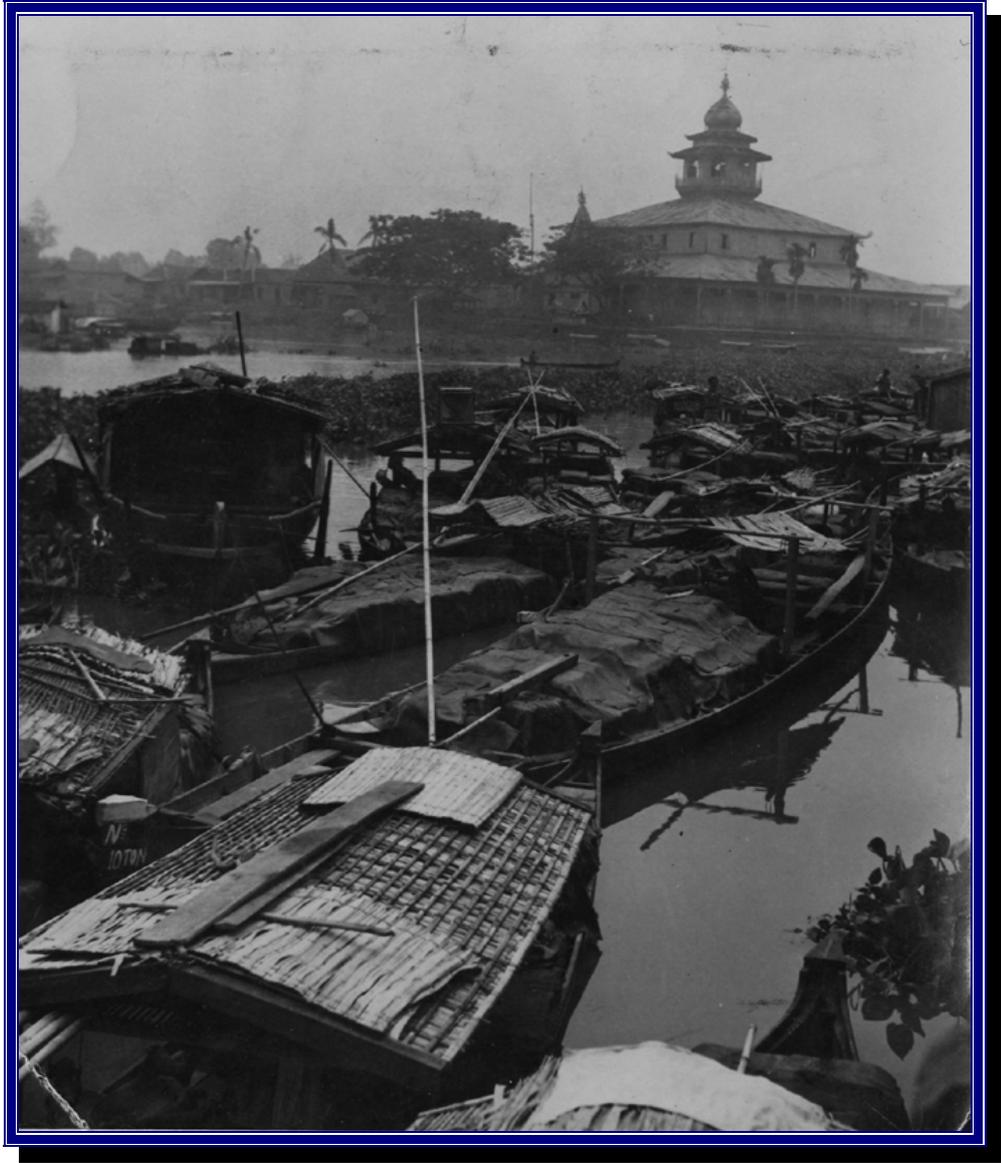
H. Abdul Hamid

PERNYATAAN SYUKUR INI DISAMPAIKAN DENGAN HORMAT KEPADA :
Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

TEMBUSAN

Pernyataan Syukur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan
Pembangunan Kalimantan Selatan tentang peresmian alur
pelayaran Ambang Barito,
5 November 1976.

ANRI : Setwapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX 312



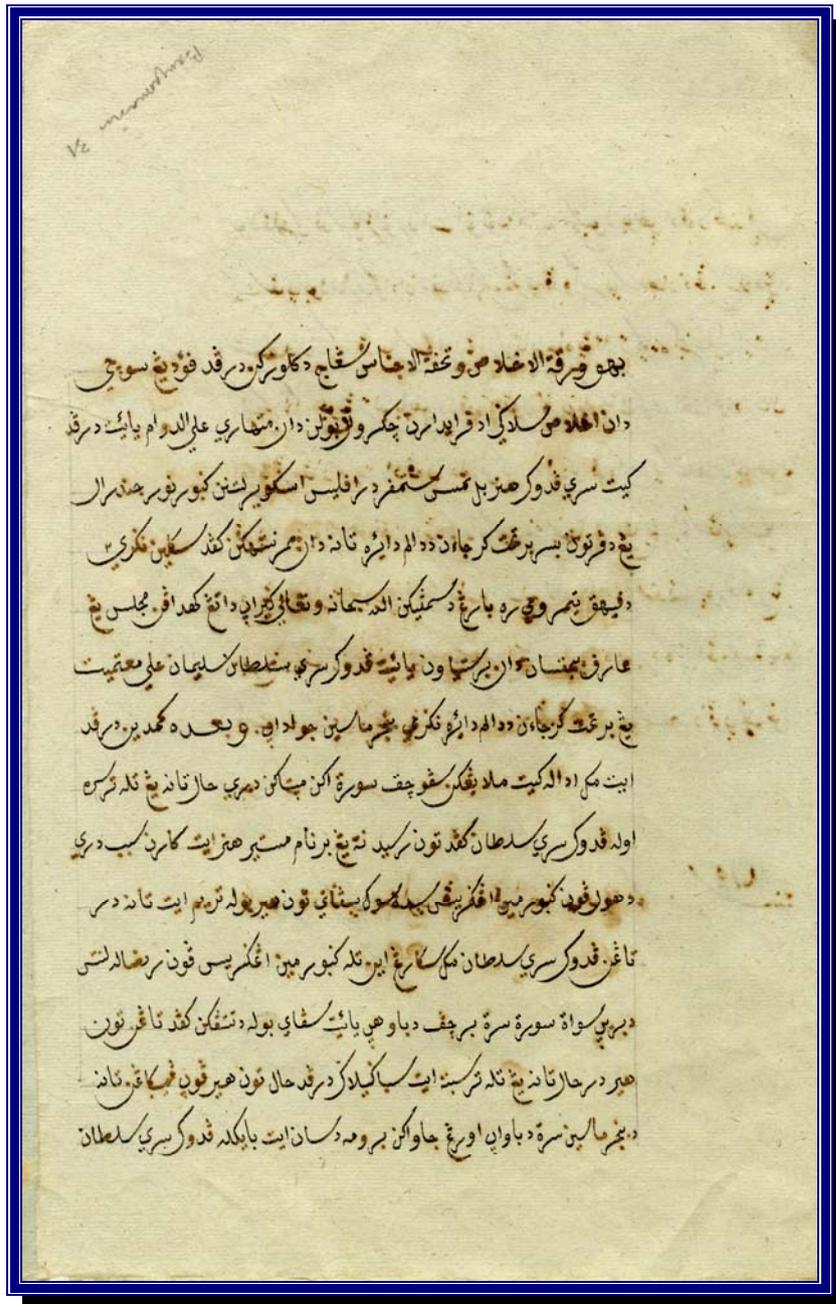
Perahu sebagai alat transportasi sungai di Banjarmasin,
1940

ANRI : Kempen A27076



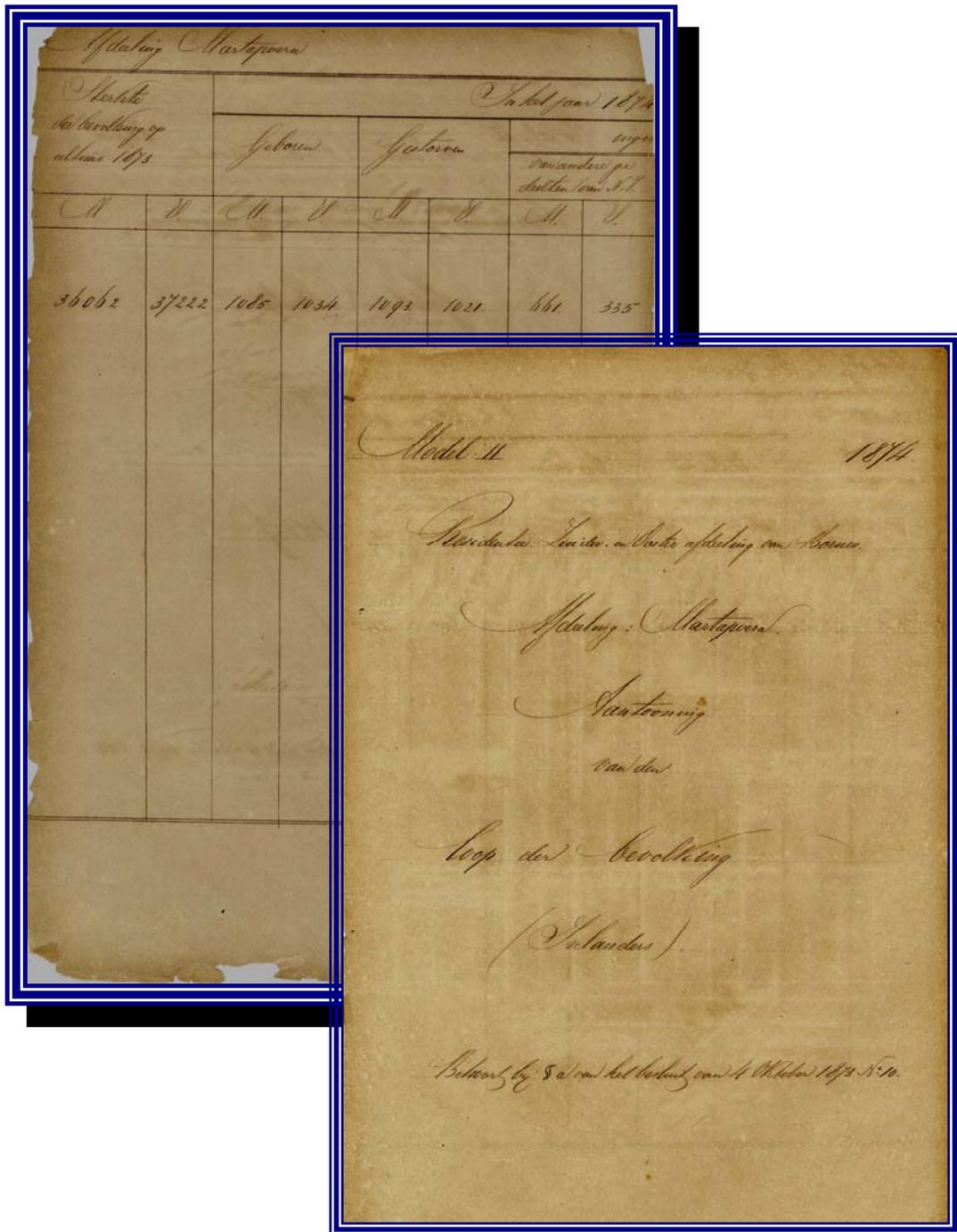
Pelabuhan Banjarmasin,
1940
ANRI : KIT 147/3

Transmigrasi dan Kependudukan



Surat permohonan dari Sultan Sulaiman Ali, mu'tamir di Banjar kepada Raffles tentang orang-orang Jawa yang diperbolehkan bermukim di Banjar, 1815.

ANRI: Koleksi Khusus 16



Jumlah penduduk pribumi afdeeling Martapura,
1874.

ANRI : Borneo Zuid en Oosterafdeling, 9/6

PROYEK TRANSMIGRASI PASANG SURUT
BARAMBAI (KALSSEL)

I. L O K A S I

- L e t a k : Daerah Proyek Barambai terletak dalam wilayah :
Kampung : Barambai
Kecamatan : Rantau Bedauh/Gampa
Kabupaten : Barito Kuala/Marabahan
Propinsi : Kalimantan Selatan
- Batas2 : Utara : Sungai Barambai
Timur : Sungai Barito
Selatan : Kec.Belawang
Barat : Sejauh + 6 Km Kepadala-
man sejajar dengan Su -
ngai Barito.
- Fisiografi : Daerah Proyek merupakan daerah Datar yang terjadi dari sediman alluvial dengan lapisan atas terdiri dari gambut/veen/sepuk.Letak dataran tersebut diperkirakan pada ketinggian 1 meter dari permukaan laut.
- Hidrografi : Pengaruh Pasang Surut tidak dapat masuk kepedalaman, karena pada musim hujan air rawa meluap dan mendesak air pasang (menahan air sungai) yang masuk, sedangkan pada musim kemarau permukaan air sungai menurun sehingga tidak mampu menyerok kepedalaman.
- I k l i m : Curah hujan banyak/tinggi dimulai bulan Nopember s/d bulan Mei dengan curah hujan maxsemen rata2 338,9 mm. per tahun.
Curah hujan terendah dimulai bulan Juni s/d bulan Oktober dengan curah hujan rata2 71,50 mm.
- L u a s : Luas Proyek adalah 2.000 ha (surat Gubernur Propinsi Kalsel.No.111-3-3512 tgl. 17 - 9 - 1969).

II. Keadaan

Ikhtisar Proyek Transmigrasi Pasang Surut Barambai
di Kalimantan Selatan dari Direktorat Jenderal Transmigrasi,
30 Nopember 1974.

ANRI : Setwapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX 840

Pertanian Perkebunan dan Pernakan



Seorang penyadap karet sedang menorehkan pisau
ke pohon karet untuk diambil getahnya,
1946.

ANRI : Kempen A27067



Pelantikan anggota-anggota Yayasan Karet
oleh Gubernur Kalimantan di Gubernuran, Banjarmasin.
10 Januari 1953.

ANRI : Kempen I, 12

PRESIDIUM KABINET
Dwikora.

LEGGER

469/K/66.

No. : *Es/1024/H.4/1966* Djakarta, 17 Djuni 1966.-

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Tataniaga Karet-Rakjat
di Kalimantan Selatan.-

K e p a d a
J.M. Menteri Pertanian
di D J A K A R T A . -

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan No. II-2-B-466 tertanggal 21 April 1966, perihal tersebut dalam pokok surat ini, yang ditunjukkan kepada Pengandahan Kalimantan dan Pepelradahan Kalimantan Selatan beserta pendapat dari Bagian Pertanian dari Biro Ekubang, untuk mendapat perhatian dari Jang Mulia.-

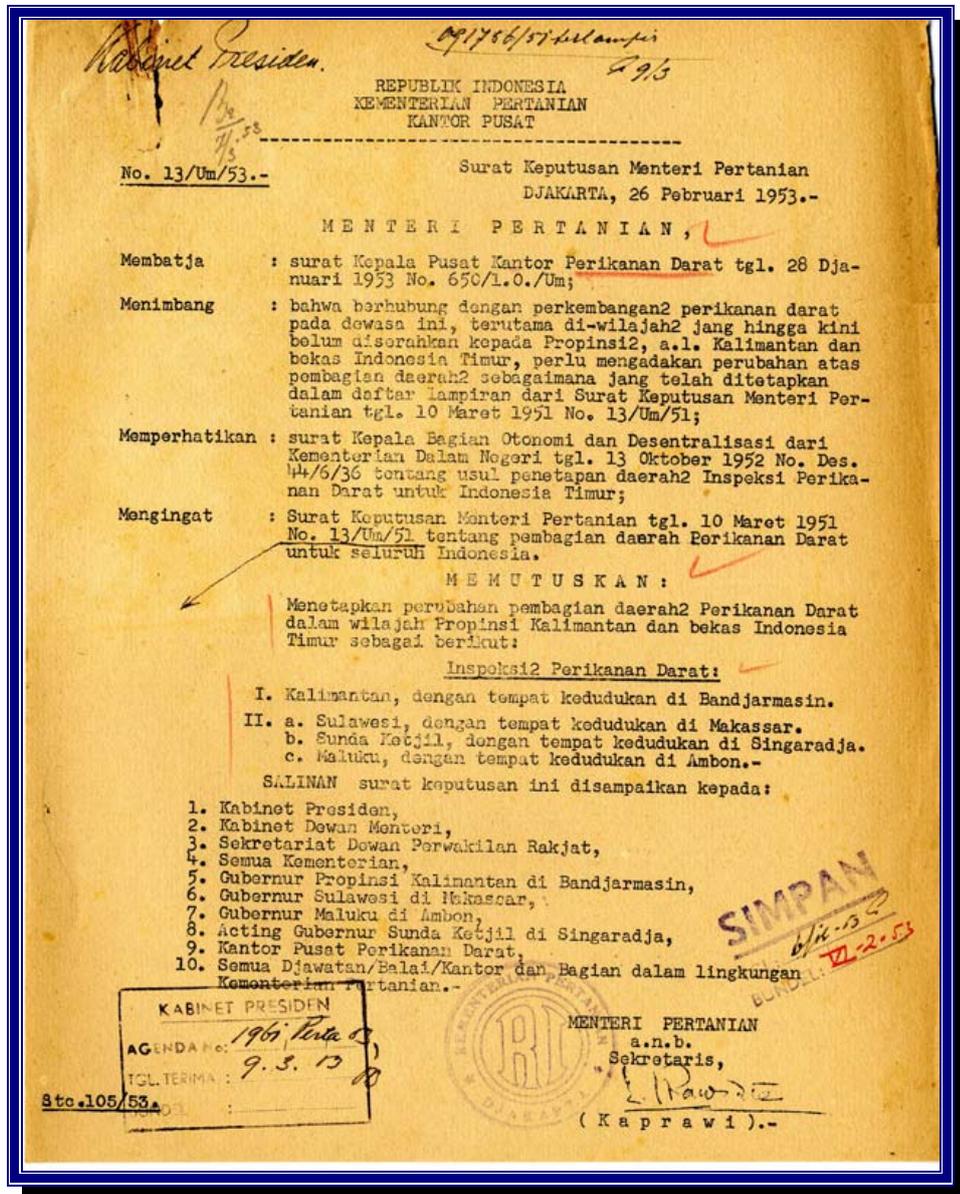
WAKIL PERDANA MENTERI
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
u.b.
Sekretaris,
(Selo Soemardjan) .-

SELESAI DISIAPKAN (PERSIAPAN)	PARAF: <i>[Signature]</i>
SELESAI MEN/nta KIRIM (PELAKSANAAN)	PARAF: <i>[Signature]</i>

Legger kembali ke...

Surat dari Sekretaris Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Selo Soemardjan kepada Menteri Pertanian tentang sikap Gubernur Kalimantan Selatan terhadap tata niaga karet rakyat di Kalimantan Selatan, 17 Juni 1966.

ANRI : Waperdam Ekubang 600



Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.13/UM/52 tentang perubahan pembagian daerah-daerah perikanan darat dalam wilayah Propinsi Kalimantan dan bekas Indonesia Timur, 26 Pebruari 1953.

ANRI: Kabinet Presiden 2163



Usaha pemeliharaan ternak pemerintah di Banjarmasin
"pemeliharaan sapi-sapi asing",
April 1953

ANRI : Djapenprokal 13



Tanaman nenas dan karet dengan sistem jarak pagar di kebun percobaan Tungkep, Banjarmasin
27 Juni 1955.

ANRI : Kempen K550627 LL 5-i



Pintu air untuk mengairi sawah-sawah di Belandaran,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
24 Juli 1961.

ANRI : Kempen 610724 LL 25

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/PROYEK TRIWULAN

FORMULIR

I. DATA UMUM :					II. DATA KEUANGAN :		
					(dalam ribuan rupiah)		
Triwulan	V				Jumlah dalam DIP.	Rp.	135.000,-
Nama	Proyek Pembangunan Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan.-				Sumber-Sumber lain :		
Nomor Kode	01.1.02.15579.18.05.15.-				1. Bantuan Luar Negeri	Rp.	---
Departemen/Lembaga	PERTANIAN.-				2. Dana-dana Daerah	Rp.	---
Propinsi	Kalimantan Selatan.-				3. Dana-Dana lain	Rp.	---
Kab. (Dati II)					Jumlah	Rp.	135.000,-

III. DAFTAR SASARAN-SASARAN USAHA *) DAN TOLOK UKUR **) YANG PENTING
(Menurut DIP yang disetujui pada tahun yang sedang berjalan)

A. Peningkatan Produksi Ternak Potong (non PUTP) :	T R I W U L A N				KETERANGAN
	I (%)	II (%)	III (%)	IV (%)	
1. Pengadaan obat-obatan 5 paket/unit	0	9,82	66,270		
2. Pengadaan Liquid Nitrogen 4.350 liter	11,11	17,778	24,444		330 liter
3. Pengadaan bahan vaksinasi	0	0	66,6		
4. Pengadaan obat-obatan untuk ternak lain	0	24,777	60,615		
5. Pengadaan ternak sapi ex Sul-Sul/HTP : 660 ekor	0	49,24	100		660 ekor
6. Pengadaan alat-alat IB 9 unit	8	100	100		
7. Pengadaan Container IB-16 : 2 buah	0	0	100		
8. Pengadaan Field Container : 10 buah	0	0	100		
9. Pengadaan peralatan operasional Demonstrator	0	0	40		
10. Pengadaan peralatan vaksinasi	0	0	0		
11. Pengadaan peralatan laboratorium Diagnostik	0	0	3,454		
12. Pembangunan Sub Sentra AI	0	0	100		
13. Pengiriman Liquid Nitrogen	0	30,810	37,285		
14. Pertemuan dengan Organisasi Peternak	0	0	75		
15. Operasional vaksinasi AE : 5.000 dosis	12,06	58,50	100		5.000 dosis
SE : 15.000 dosis	10,49	26,64	100		15.000 dosis
Anthrax : 5.000 dosis	0	36,80	66,7		3.335 dosis
16. Operasional Laboratorium Kesehatan Hewan 1.250 sample	1,2	36,72	75,84		948 sample
17. Operasional petugas IB	1,87	13,671	24,507		
B. RENCANA USAHA TERNAK POTONG (PUTP) :					
1. Pengadaan mesin tik 2 buah	100	100	100		
2. Pengadaan sepeda motor 2 buah	0	0	0		
3. Pengawasan ke lokasi proyek	16,67	49	57,167		
4. Persiapan dropping ternak	0	66,67	100		
5. Bimbingan / Penyuluhan	0	63,02	79,344		
6. Latihan Kader PUTP : 20 orang	100	100	100		
7. Rapat Bapem / Bapel	0	8,333	25		
8. Pelaporan	25	39,69	75		
9. Operasional Bapem/Bapel/PPS/PPH	25	50	57,994		
C. PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK UNGGAS (non BIMAS) :					
1. Pengadaan obat-obatan	0	50	54,4		
2. Pengadaan alat-alat vaksinasi	0	0	0		
3. Pembantuan kandang ayam percontohan	0	0	0		
4. Operasional Pembinaan/Penyuluhan	0	42,50	54,579		
5. Latihan Kader Ternak Unggas	0	100	100		
6. Feasibility Study Binas Ayam	0	20	20		
7. Operasional vaksinasi ND : K : 350.000 dosis	13,33	42,97	92,234		322.820 dosis
F : 150.000 dosis	17,14	37,36	88,809		133.213 dosis
D. PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM :					
1. Gaji / Upah	25	50	75		
2. Perjalanan ke lokasi proyek	0	14,84	41,219		
3. Komunitas ke Pusat	0	33,33	66,67		
4. Pengendalian ke Daerah	16,67	39,93	62,667		
5. Mengikuti Kursus : Inseminator	0	100	100		
6. Pengiriman petugas dalam rangka Pasoran Ternak	0	100	100		
7. Pasoran Ternak	0	100	100		
8. Eksploitasi kendaraan bermotor	12,72	36,62	58,321		
9. Laporan, Evaluasi dan Administrasi	23,97	37,42	51,438		
E. BALAI PEMERINTAH TERNAK DAN ELJAWAN MAKANAN TERNAK :					
1. Pembukaan tanah	0	75	100		
2. Pengadaan bibit rumput	0	0	0		
3. Pengadaan pupuk	0	100	100		
4. Pengadaan traktor mini	0	100	100		
5. Pengadaan alat-alat kebun	0	100	100		
6. Pembantuan master plan UPT oleh Toan Gana	0	0	0		

**) Benchmark.

Laporan dari Inspektorat Dinas Peternakan Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Program/Triwulan Proyek Pembangunan Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan, 17 Desember 1979.

ANRI : Setwapres Adam Malik 1020

Bangunan



Makam Sultan Sepuh di Pasir, Banjarmasin.

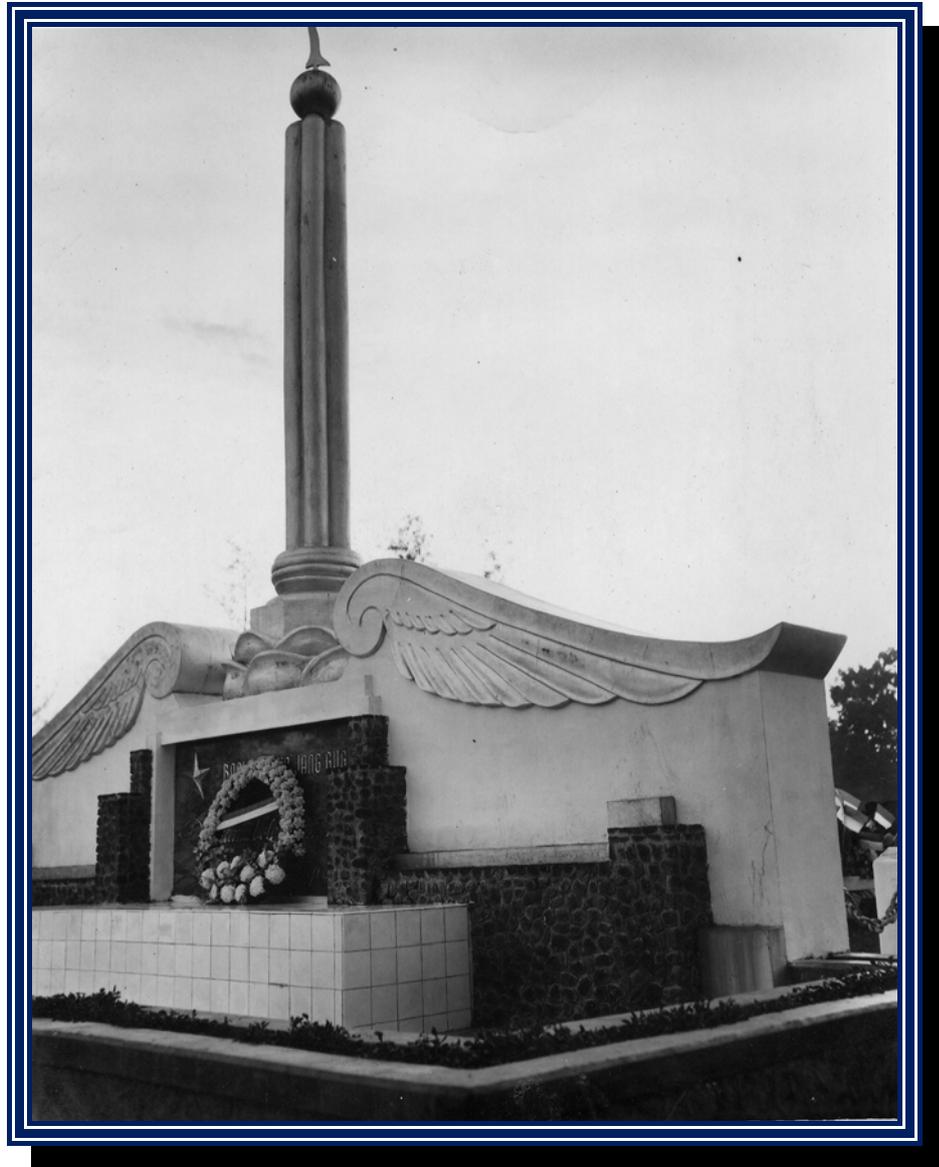
± 1910

ANRI : KIT 817/12



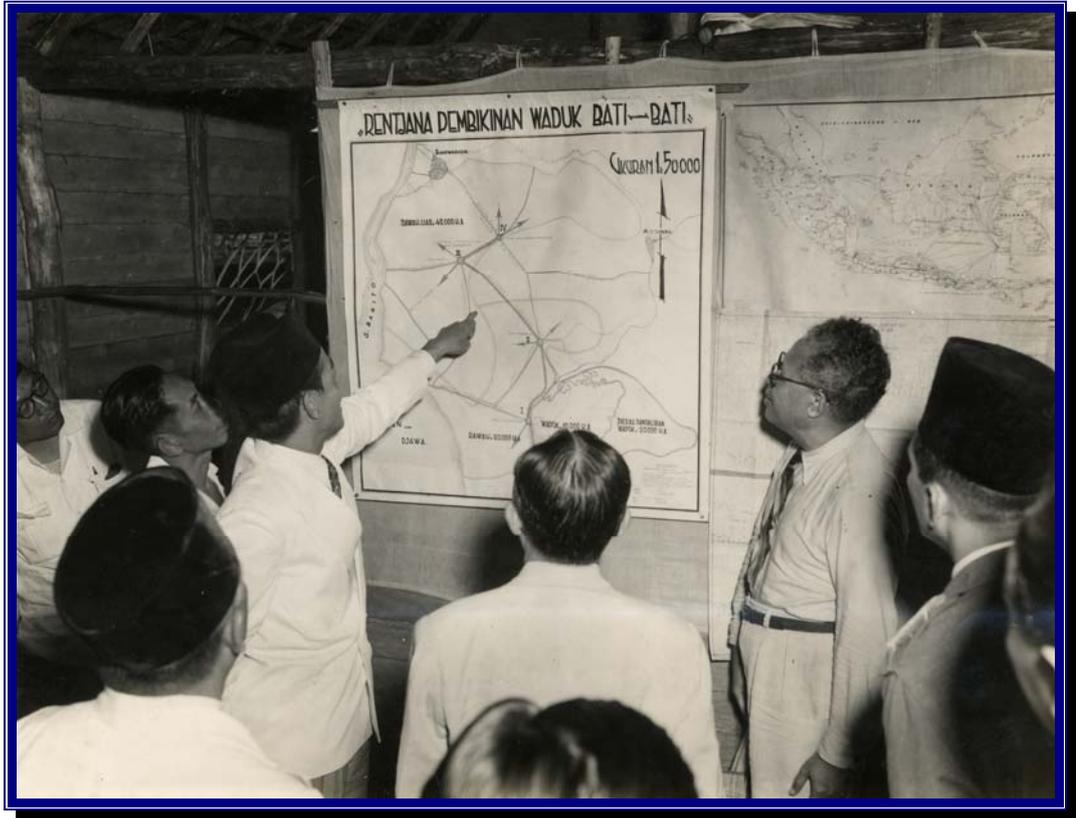
Makam Dayak kuno di Patung, Banjarmasin,
9 Juli 1952

ANRI : Kempen 520709LL1



Tugu pahlawan di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kalimantan Selatan
9 Juli 1952.

ANRI : Kempen 520709 LL 2-1



Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah melihat rencana pembangunan waduk Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 11 Juli 1952

ANRI : Kempen 520711 LL 4

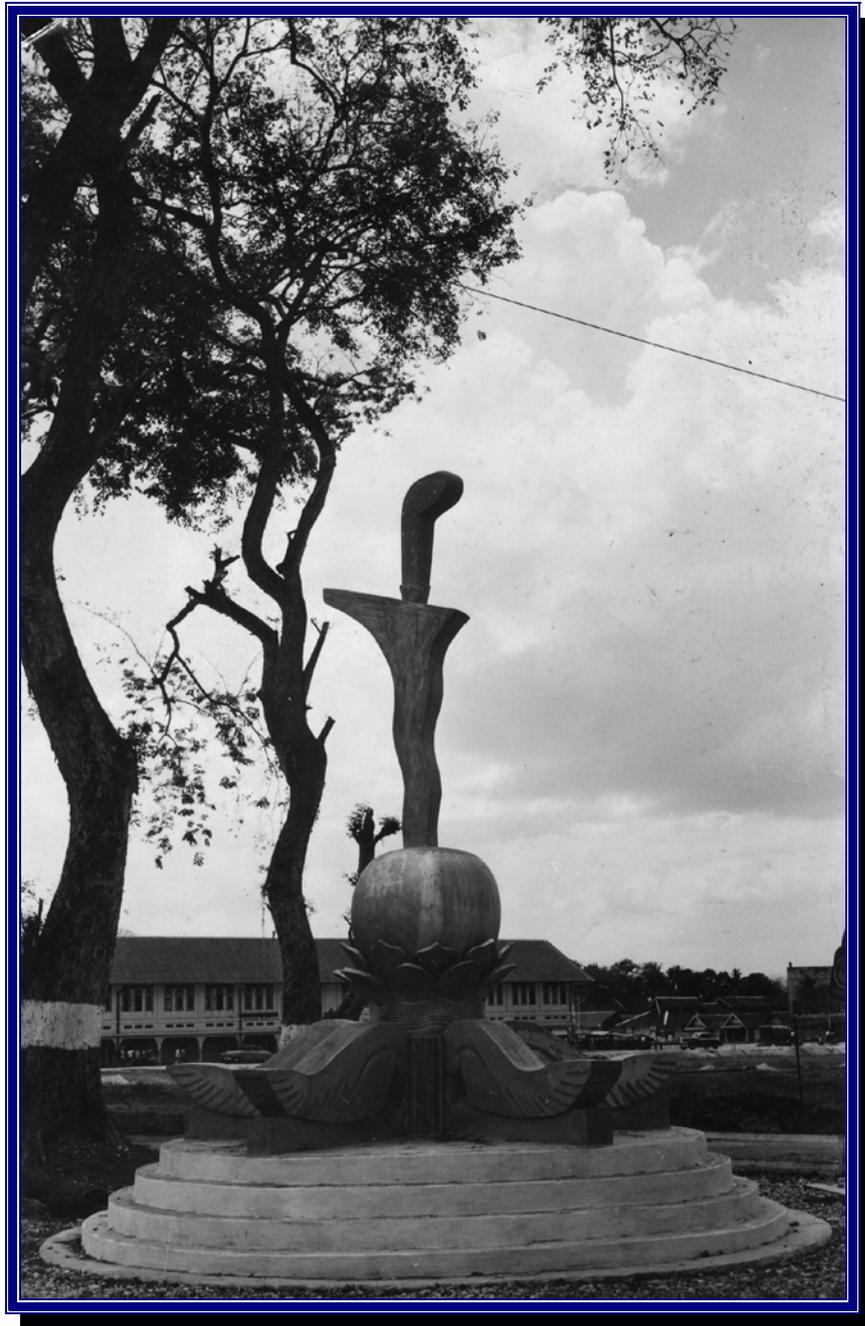


Jawatan Saluran Air Minum dari Kementerian Pekerjaan Umum
di Banjarmasin,
1 Juli 1953.

ANRI : Kempen 2530715FG 1-2

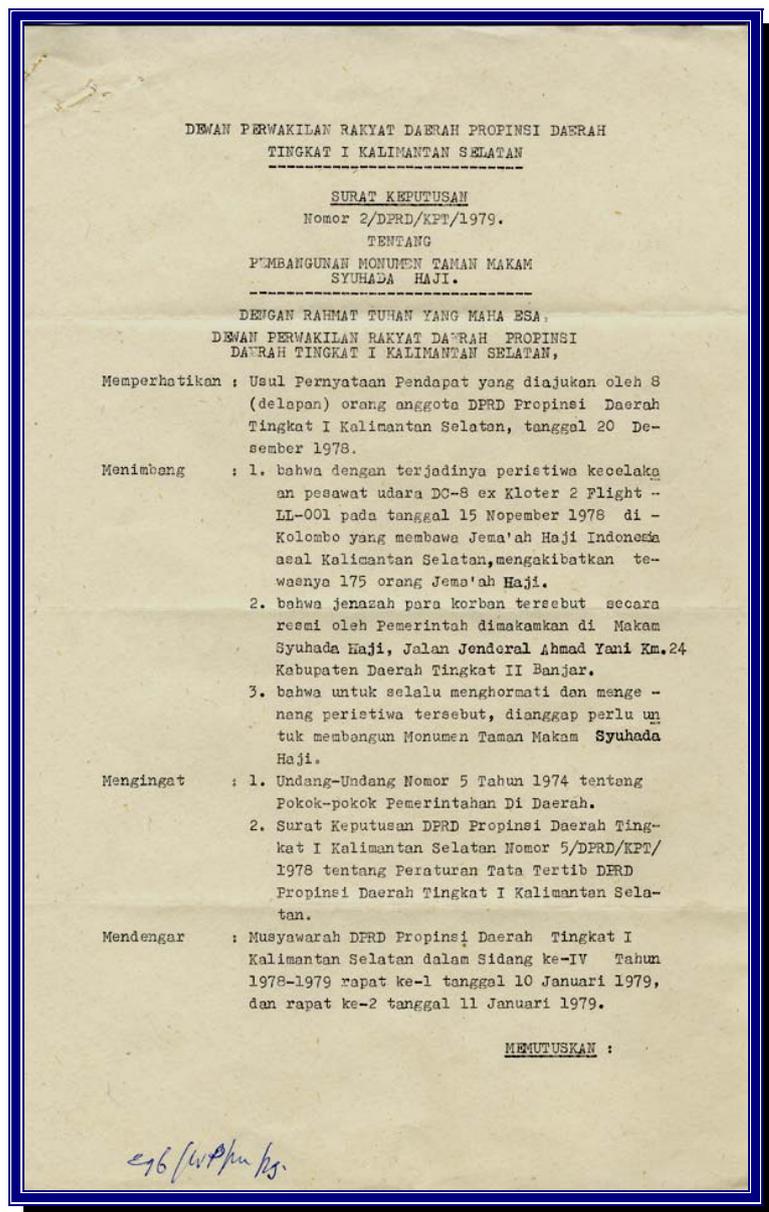


Pembangunan kantor Jawatan Penerangan
Propinsi Kalimantan di Banjar Baru,
Januari 1957
ANRI : Kempen



Tugu Martapura, di Kabupaten Banjarmasin
1961.

ANRI : Kempen 610725 LL 12



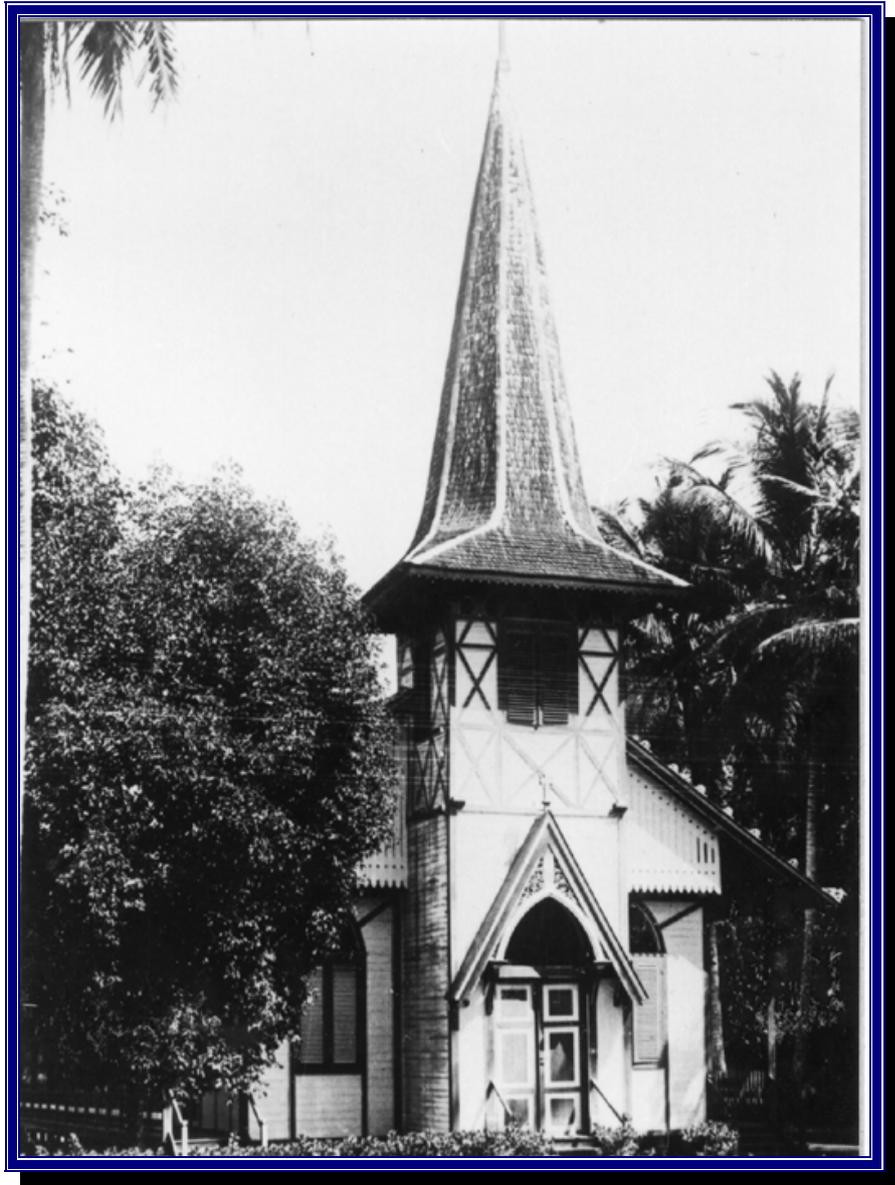
Surat Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No.2/DPRD/Kpt/1979 tentang usulan untuk membangun Taman Makam Syuhada Haji di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.24 Kabupaten Banjar, sehubungan dengan peristiwa kecelakaan pesawat udara DC-8 ex kloter 2 Flight LL-001 pada tanggal 15 Nopember 1978 di Kolombo yang membawa jemaah haji Indonesia asal Kalimantan Selatan, 11 Januari 1979.

ANRI : Setwapres Adam Malik 696

keagamaan



Mesjid Martapura.
± 1920
ANRI : KIT 147/19



Gereja Houten zendings di Banjarmasin
1925.

ANRI : KIT 809/54

Romp. (pro. 91/60/br.)
19. 11. 52

PENETAPAN MENTERI AGAMA NO: 19 TAHUN 1952:

tentang

Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum dari Kerapatan-Kerapatan Qadi disebagian daerah Kalimantan-Selatan.

MENTERI AGAMA:

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan pembagian daerah di Kalimantan-Selatan, perlu ditentukan kembali tempat kedudukan Kerapatan-Kerapatan Qadi di Kalimantan-Selatan serta daerah hukumnya masing-masing.
- Mengingat : 1. Peraturan Peradilan Agama disebagian daerah Kalimantan-Selatan (Stbl.1937 No. 638 serta Peraturan Penjelenggaraannya) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo. No. 8 Tahun 1950 ;
3. Instruksi Pemerintah No. 1 Tahun 1950 ;
4. Penetapan Menteri Agama No. 3 Tahun 1950 ;
5. Penetapan Menteri Agama No.16 Tahun 1952 ;
6. Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: tempat kedudukan Kerapatan-Kerapatan Qadi dan daerah hukumnya masing2 sebagai berikut :

Pasal I.

Tempat kedudukan Kerapatan-Kerapatan Qadi jaitu di:
Bandjarmasin, Martapura, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tandjung.

Pasal II.

Daerah hukum dari Kerapatan-Kerapatan Qadi di Bandjarmasin, Martapura, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tandjung adalah seperti dibawah ini :

- a. Bandjarmasin: meliputi 1. Kota Besar Bandjarmasin,
2. Kewedanan Barito Kuala (dahulu termasuk dalam wilajah Kerapatan Qadi di Bandjarmasin),
3. Kewedanan Marabahan (dahulu termasuk dalam wilajah Kerapatan Qadi di Marabahan).
- b. Martapura: meliputi 1. Kewedanan Martapura,
2. Kewedanan Pleihari (dahulu termasuk dalam wilajah Kerapatan Qadi di Pleihari).
- c. Kandangan : meliputi 1. Kewedanan Amandit,
2. Kewedanan Tapin (dahulu termasuk dalam wilajah Kerapatan Qadi di Rantau),
3. Kewedanan Negara (dahulu termasuk dalam wilajah Kerapatan Qadi di Negara).
- d. Barabai : meliputi Kewedanan Barabai.
- e. Amuntai : meliputi 1. Kewedanan Amuntai,
2. Kewedanan Alabio (dahulu termasuk dalam wilajah Kerapatan Qadi di Amuntai),
3. Kewedanan Balangan (dahulu termasuk dalam wilajah Kerapatan Qadi di Amuntai).
- f. Tandjung : meliputi 1. Kewedanan Tabalong (dahulu onderafdeeling Tandjung),
2. Ketjaman.....

Penetapan Menteri Agama No.19 Tahun 1952 tentang tempat kedudukan dan daerah hukum dari kerapatan-kerapatan qadi (hakim yang mengadili perkara yang berkaitan dengan Islam) di sebagian daerah Kalimantan Selatan,
1 Oktober 1952.

ANRI : Kabinet Presiden 169



Masjid di tepi Sungai Nagara, Banjarmasin,
26 Januari 1953.

ANRI : Kempen K530126 LL2-i



Pemandangan sekitar kedatangan jemaah haji yang pertama
di Banjarmasin,
Oktober 1953.

ANRI : Djapenprokal

Pendidikan dan Kebudayaan



Sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)
yang dibangun pemerintah di Banjarmasin,
± 1920
ANRI : KIT 353/32



Tari Mandau dari Kalimantan Selatan,
17 Agustus 1953
ANRI : Kempen 530817FG 3-20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH No. 34 TAHUN 1953

TENTANG

PENAMBAHAN DALAM KETENTUAN TENTANG TUGAS DAN URUSAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH OTONOM KABUPATEN DAN YANG SETINGKAT DENGAN ITU DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menambah tugas dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada daerah otonom tingkat Kabupaten dalam Propinsi Kalimantan;

Mengingat : 1. Pasal 39 dan 45 Undang-undang Darurat No.3 tahun 1953 (Lembaran Negara No.9 tahun 1953);
2. Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta);

Mengingat pula : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 26 pada tanggal 10 Agustus 1951;

M e n u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN DALAM KETENTUAN TENTANG TUGAS DAN URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN DILAFANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAJAAN.

BAB I.

TENTANG DJENIS TUGAS DAN URUSAN.

Pasal 1.

Kepada Daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan diserahkan pula tugas dan urusan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan seperti berikut :

A. Tugas untuk :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (P.B.H.) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
2. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum (K.P.U.) tingkat A dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
3. Mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakjat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan sematjam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
4. Memimpin dan memajukan kesenian daerah;
5. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengandjurkan didirikannya kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan daerah.

B.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953 tentang Penambahan dalam Ketentuan tentang Tugas dan Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang diserahkan kepada Daerah Otonom Kabupaten dan yang setingkat dengan itu dalam lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan, 7 September 1953.

ANRI : Setkab PP 1950-1960, 189



Asrama dan perumahan pelajar Mulawarman di Banjarmasin,
27 Juni 1955.

ANRI : Kempen K550627 LL 4-2



Presiden Soekarno dan rombongan mengunjungi Sekolah Kepandaian Putri dan Sekolah Guru B di Banjarmasin, 10 Desember 1955.

ANRI : Kempen 551210 LL 24



Kunjungan Presiden dan rapat umum
di Perkampungan Pelajar Mulawarman, Banjarmasin
15 Juli 1957.

ANRI : Kempen 570715 LL 3-1



SIKAS DIKOREKSI

nst.1106/59.

TJERAMAH PRESIDEN PADA MAHASISWA-MAHASISWA UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT DI BANJARMASIN PADA TANGGAL 7-9-59.

Saudara-Saudara sekalian, terutama sekali mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, saja diminta memberi tjeramah kepada Saudara-Saudara.

Saudara-Saudara mengetahui bahwa kita ini, menurut istilah, sekali lagi menurut istilah, sedjak 17 Agustus '45 berada dalam revolusi. Sebenarnja kita sudah lama didalam revolusi Saudara-Saudara, bukan henja sedjak 1945, maka oleh karena itulah, menurut istilah, kita berada dalam revolusi sedjak tanggal 17 Agustus 1945. Sebab apa saja berkata bahwa sebenarnja kita telah lama berada didalam revolusi? Apa arti perkataan revolusi? Perkataan "evolusi" berarti "evolusi jang tjepat". Biasanja orang membuat perbedaan antara perkataan evolusi dan perkataan revolusi. Tetapi sebenarnja 2 hal itupun tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tjontoh jang paling populer mengenai hal ini ialah: ajam bertelor, sitelor itu dikerami oleh siajam. Didalam kulit telor itu terdjadilah proses evolusi - dari zat putih telor dan kuningnja, lambat laun lambat laun setjara evolusioner terdjadilah anak ajam, tetapi nanti datanglah satu saat, jang kulit telor itu dipetjahkan oleh anak ajam itu dan si-anak ajam itu keluar dari dalam kulit telor. Lantas orang berkata ^{apa} saat pemetjahan kulit telor oleh anak ajam didalamnja itulah saat revolusi.

Tetapi/Saudara-Saudara dapat memisahkan 2 proses ini, 1 dari jang lain? Sebenarnja pemetjahan kulit telor oleh si-anak ajam itu adalah sekadar satu kelanjutan daripada proses jang telah lama berdjalan, jaitu proses siputih telor dan sikuning telor, dikerami oleh induk ajam dan oleh hangat badannja siinduk ajam itu siputih telor dan sikuning telor itu lambat-laun mendjadi anak ajam, kemudian petjah kulit telornja dan si-anak ajam keluar.

Djikalau Saudara memikirkan akan hal ini, maka mengertilah Saudara-Saudara bahwa kita ini sudah lama dalam revolusi; tjuma, ja, memang sebagaimana kulit telor dipetjahkan oleh si-anak ajam, demikian pula kita pada tanggal 17 Agustus 1945 memetjahkan sesuatu hal. Sebagaimana pada saat petjahnja kulit telor itu kita berkata, ada revolusi telor, kita pada tanggal 17 Agustus 1945 mengalami 1 revolusi. Tetapi djikalau kita bertanja apa arti revolusi, jah, katakanlah bahwa revolusi adalah 1 evolusi jang tjepat. Evolusi jang amat tjepat.

Kalau Saudara-Saudara mahasiswa bertanja kepada ahli sosiologi jang termasyhur jaitu Prof. Bluntschli, Prof. Bluntschli akan mendjawab bahwa revolusi itu adalah ^{satu} perobahan dari dasar sama sekali. "Eine Revolution ist eine Umgestaltung von Grund aus". = satu revolusi adalah satu perobahan dari bawah sama sekali.

Kalau

Bagian awal dari Ceramah Presiden Soekarno pada mahasiswa-mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, 7 September 1959.

ANRI : Pidato Presiden 112



nst.1589/60.-

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA UPATJARA
PENEGARAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT;
BANDJARMASIN, 1 NOVEMBER 1960.

Saudara-Saudara sekalian,

Assalammu'alaikum Waroohmatulahi Wabarakatuh!

Pada hari jang penting ini, penting oleh karena kita baru sadja menjaksikan penegerian Universitas Lambung Mangkurat, -- mungkin djuga tepat dinamakan penegeraan -- Universitas Lambung Mangkurat, saja sebagai Presiden diminta untuk memberi doa restu umum. Sesudah kita mendengar uraian-uraian dari pembitjara-pembitjara jang terdahulu, sekarang saja hendak memberi sedikit pandangan dan amanat.

Lebih dahulu saja hendak menjambung perkataan J.M.Menteri Agama, bahwa memang benar menjetudju digantinya nama Islamologie mendjadi nama Fakultas Sjareah Islam, sebab perkataan Islamologie mempunjai rasa jang tidak enak. Perkataan Islamologie mengandung rasa bahwa Islam dipeladjadi tidak untuk kepentingan agama Islam tetapi untuk kepentingan lain. Dan memang didalam djaman kolonial dahulu, spesial agama Islam itu dipeladjadi oleh pihak Belanda bukan untuk kepentingan agama Islam, tetapi untuk mempergunakan agama Islam itu bagi pendjadjahan. Kita mengenal nama profesor-profesor jang termasjhur didalam lapangan Islamologie. Prof.Dr. Snouck Hourgronje misalnja Gembong Islamologie; Prof.Dr.de Goeje, gembong Islamologie. Mereka mempeladjadi agama Islam itu bukan untuk agama Islam, tetapi untuk bisa meng-erèh, bisa mendjalakan pendjadjahan daripada negeri Belanda kepada bangsa Indonesia jang untuk sebagian terbesar terdiri daripada orang-orang jang beragama Islam. Di Djerman kita mengenal namanja Prof.Dr.Hartmann, mengenal nama Prof.Dr.Becker, Islamoloog jang termasjhur, tetapi mereka mempeladjadi agama Islam itu bukan untuk agama Islam, melainkan untuk mendjadjah bangsa-bangsa jang beragama Islam. Karena itu, tatkala J.M.Menteri Agama datang kepada saja untuk membitjarakan hal ini, dengan sekaligus saja memufakati agar supaja nama Islamologie diganti sadja dengan nama lain jaitu Fakultas Sjareah Islam.

Saja menjambung utjapan Prof.Dr.Priyono, J.M.Menteri PP & K jang menanjakan pendirian saja dan minta persetudjuan saja agar supaja science, ilmu pengetahuan ditaruh paling atas. Setudju, setudju sdr.Priyono, science, ilmu pengetahuan ditaruh paling atas, tetapi -- nah, ini tetapinja -- djangan science untuk science,

tetapi ilmu

Bagian awal dari Pidato Presiden Sukarno pada upacara kenegaraan di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin 1 November 1960.

ANRI : Pidato Presiden 233

Kesehatan

Algemeen Verslag Over de VACCINE
2. Semester 1837

Het genoeglyk en aangenaam is het met om de heilzame
Wetgeving welke men door de VACCINE bedooft de
gewenschte gevolgen welke de Koepot in ontling op deze
Rijst Landen tusschen die jaar heeft opgevoerd te
maken; met zekerheid mag men thans verhalen dat de
bewoners dezer Residentie Zuid en Oost Rijk Borneo
naar het Rijk der Rijstwerking onderworpen te hebben
zich thans veel gelustiger als vroeger achten, en nu niet
eigen wil alles tot de verdere voorplanting der bovenge-
melde Koepot in ontling aanwenden; Sedert die tyd
hebben de Nat van de Spokken Ziekte ook byna op
geen plaats of district waar de VACCINATIE was
ingevoerd geopend.

Daar tegen heeft de Variol. in de binnen Landen veel
verwoestingen onder de Dayakische populatie veroor-
zaakt, Zoo dat er gedurende dit jaar veel ongelukkigen
door die vernielende ziekte met vrede maar het graf zijn
gesliept; velen zijn ook van Schrik gedurende die Epidemie
voor eenige tyd in de boschen en wildernissen gevlugt ind-
hoop om die ziekte die ganse tusschen te ontloo-
pen. Door de al te voren afstand van deze hoofplaatsen
was de VACCINE aldaar nimmer ingevoerd geweest, met
te quest aarde de opbrengst der VACCINE met de groote
medewerking van de Heer Resident alle pogingen door
het zenden van een plaatselijke VACCINATOR met de
nodige VACCINE tot tusschen gaasp mede genomen.
Jete derwaarts gezonden heeft alle die pogingen zijn
ochter vruchteloos gebleven, door diende mede genomen
Koepot tot door de langdurige reis in des tyd
de

Laporan pelaksanaan vaksinasi semester II tahun 1837
di Banjarmasin
Januari 1838.

ANRI : Borneo Zuid en Oosterafdeling 36/2



Perlombaan bayi sehat memperingati Seperempat Abad Gerakan Wanita Indonesia bertempat di Kantin Tentara Banjarmasin Desember 1953

ANRI : Kempen WO 1077/C/Z

Daftar Arsip Citra Kalimantan selatan dalam arsip

DAFTAR ARSIP CITRA KALIMANTAN SELATAN DALAM ARSIP

A. GEOGRAFIS

1. Peta Banjarmasin, South East Borneo (Kalimantan Tenggara. 1945.
ANRI : Topografi 2417/sheet No.60/XXVIII/131
2. Peta Boemiratan, Binoeng, Matraman, Soengkai, Tatakan, Pengaran, Borneo/1946.
ANRI : Topografi 2422/sheet No.61/XXVIII/131
3. Peta Kalimantan Selatan, 2001
ANRI : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

B. PEMERINTAHAN

4. Surat dari Sultan Adam al Watsiq Billah bin Sulaiman Al Mu'tadi dari Kerajaan Banjar kepada pemerintah Hindia Belanda mengenai ucapan terima kasih atas kiriman benang, perak, kuningan Eropa yang dibawa oleh John Hendrik Tobias, 6 Oktober 1823.
1 lembar
ANRI: Khusus 10
5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1951 tanggal tentang pengangkatan Dr. Murdjani sebagai Gubernur Kalimantan terhitung tanggal 1 Juli 1950, 19 April 1951. 2 lembar
ANRI : Setkab Keppres 1950 1960, 284
6. Pelantikan Residen Koordinator Kalimantan Selatan Zainal Abidin Gelar Sutan Komla Pontas bertempat di Gubernuran Banjarmasin, 6 Februari 1952.
ANRI : Kempen G-1

7. Konferensi Pembukaan Kalimantan bertempat di Gubernuran, Banjarmasin, 24 Februari 1952.
ANRI : Kempen Japenprokal, 117/2
8. Surat dari Dewan Pembangunan Ekonomi tentang pembukaan Kalimantan selaku perwujudan kemakmuran raksasa, 4 Agustus 1952. 20 lembar.
ANRI : Kabinet Presiden 849
9. Surat dari Dr. Moerdjani, Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan kepada Presiden tentang resolusi konperensi Jawatan-jawatan Kemakmuran Propinsi Kalimantan yang diadakan pada tanggal 10–11 April 1953 dalam usahanya membantu pelaksanaan pembukaan Kalimantan, 27 April 1953. 3 lembar
ANRI : Kabinet Presiden 613
10. Jawatan Penerangan Kabupaten Kandungan menggunakan penerangan secara tertulis (slogan) dalam memberikan pengertian bagaimana susunan pemerintahan daerah, 16 Juni 1952.
ANRI : Kempen 160652
11. Pertemuan Mohammad Hatta dengan masyarakat Amuntai, dalam rangka kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Banjarmasin, Amuntai, Negara, Danau Panggan, dan Babiri, Kalimantan Selatan. 8 Juli 1952.
ANRI : Kempen 520708 LL 3
12. Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/ Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan beserta penjelasannya, 7 Januari 1953. 27 lembar
ANRI : Setkab UU Darurat, 88

13. Pertemuan Presiden Soekarno dengan para Pamong praja, anggota Angkatan Perang, dan Wakil-wakil Organisasi/Partai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka kunjungan Presiden Soekarno ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan persatuan Indonesia. 10 Desember 1955.
ANRI : Kempen 551210 LL 38
14. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, beserta memori Penjelasan, 29 November 1956. 38 lembar
ANRI : Setkab UU 1950-1960, 199
15. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1956 tentang pemakaian lambang Kota Besar Banjarmasin yang gambarnya disahkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS), 14 Desember 1956. 1 lembar
ANRI : Setkab Keppres, 1358
16. Lambang Kota Besar Banjarmasin yang gambarnya disahkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS), 14 Desember 1956. 1 lembar
ANRI : Setkab Keppres, 1358
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo kepada Direktur Kabinet Presiden tentang pembagian Kalimantan dalam 3 Propinsi otonom terhitung tanggal 1 Januari 1957 dan pengangkatan Sjarkawi bin Achmad Dahlan sebagai Residen pemangku jabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 5 Pebruari 1957. 4 lembar
ANRI : Kabinet Presiden 901

18. Sjarkawi bin Achmad Dahlan Pemangku Jabatan Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Selatan bersama para tamu di depan Kantor Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 5 Mei 1957.
ANRI : Kempen Japenprokal, 10
19. Undang Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, beserta penjelasannya, 7 Mei 1957. 4 lembar
ANRI : Setkab UU Darurat, 145
20. Surat dari Mr. Soedardjo Sekretaris Menteri Kehakiman kepada Direktur Kabinet Presiden tentang pengundangan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dengan lampiran, 2 Juli 1958. 7 lembar
ANRI : Kabinet Presiden, 262
21. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai undang-undang, 26 Juni 1959. 18 lembar
ANRI : Setkab Undang-Undang, 314
22. Pelantikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Abrani Sulaeman oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Ipiq Gandamana di Banjarmasin, 26 September 1963.
ANRI : Kempen 11978

C. POLITIK DAN KEAMANAN

23. *Positive Orders*, perintah pimpinan tertinggi Hindia Belanda di Batavia sehubungan dengan berdirinya cabang VOC di Banjarmasin, 1742-1762. 18 lembar
ANRI : Borneo Zuid en Oostkust/105
24. Pembaharuan kontrak Sultan Banjarmasin, Sultan Adam, mengenai perbatasan, 13 September 1824. 17 lembar
ANRI : Kontrak Borneo 20
25. Surat dari Sultan Sulaiman kepada Residen Banjarmasin mengenai pembicaraan antara pihak Kompeni dan masyarakat Dayak, 1823. 5 lembar
ANRI : Kontrak Borneo 62
26. Catatan sejarah pemberontakan di Banjarmasin, Mei 1859. 46 lembar
ANRI : Borneo Zuid en Oostkust 136/16
27. Laporan Komandan Pasukan di Kalimantan Selatan dan Pesisir Timur tentang situasi dan perang yang terjadi di sana, 14 Juni 1861.
ANRI : Kontrak Borneo 70
28. Skets Pangeran Antasari, Pimpinan Perang Banjar 1856-1905
ANRI : P01-383
29. Skets Pangeran Hidajat dari Kesultanan Banjar bersama dengan Pangeran Antasari memimpin Perang Banjar 1856-1905
ANRI : P04-391
30. Berkas organisasi Gerakan Rahasia Bandjar Hulu Sungai yang berpusat di Harujan Barabai Kalimantan Selatan yang ingin menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desember 1945. 32 lembar
ANRI : Djogja Documenten 226

31. Presiden Soekarno saat pidato pada "Rapat Raksasa" di Hulu Sungai, 15 September 1950.
ANRI : Kempen 501312
32. Pidato Presiden pada rapat raksasa di Banjarmasin, 7 September 1959. 4 lembar
ANRI : Pidato Presiden 114
33. Pembukaan Kursus Pengetahuan Umum Kandangan dengan peserta pemimpin dan pengurus cabang Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Sjiuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Partai Inonesia Raya (Parindra), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan beberapa organisasi lainnya, 24 Februari 1951
ANRI : Kempen 240251
34. Kunjungan Presiden Soekarno ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, tampak para pelajar sedang menyanyikan Indonesia Raya, 10 Desember 1955
ANRI : Kempen 551210 LL 25
35. Pidato Presiden Sukarno pada rapat raksasa di Gubernuran Banjarmasin, 31 Oktober 1960. 11 lembar.
ANRI : Pidato Presiden 232

D. PEREKONOMIAN

36. Surat dari Sekretaris Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tentang permohonan agar sebagian iuran revolusi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, disertai lampiran, 5 Juli 1966. 6 lembar
ANRI : Waperdam Ekubang 170
37. Kontrak antara Sultan Tamdjidulla dan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) mengenai perubahan harga lada, 10 Mei 1747. 5 lembar
ANRI : Kontrak Borneo 10

38. Pasar Baru, Banjarmasin, ± 1920.
ANRI : KIT 147/1
39. Pedagang martabak di Pasar Belintang, Martapura, Kalimantan Selatan, 19 April 1951.
ANRI : Kempen 512505
40. Suasana Pasar Babiri Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, 8 Juli 1952.
ANRI : Kempen K520708 LL 8-11
41. Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1953 tentang Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan No.3/1953 tanggal 22 Juni 1953 mengenai larangan menangkap ikan sepat-siam. 27 Oktober 1953, 2 lembar
ANRI : Setkab Keppres, 864
42. Surat dari Sekretaris Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Selo Soemardjan kepada Menteri Perhubungan tentang penyaluran barang-barang yang tertumpuk di gudang Pelabuhan Sampit, 23 Juni 1966. 7 lembar
ANRI : Waperdam Ekubang 480

E. HUKUM

43. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1953 tentang pengangkatan Kapten Sunarso sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Banjarmasin, 12 Mei 1953. 1 lembar
ANRI : Setkab Keppres 764
44. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1953 tentang pengangkatan Kapten Hartadi sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Banjarmasin, 27 Juni 1953. 1 lembar
ANRI : Setkab Keppres 797

45. Resolusi dari Badan Koordinasi Kesatuan Aksi Kalimantan Selatan tentang desakan untuk segera mengeluarkan UU Pemberantasan Korupsi, disertai surat pengantar dari pimpinan DPRD kepada Gubernur Kalimantan Selatan, 9 Juni 1967. 2 lembar
ANRI : Sekretariat Kabinet 6
46. Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Ratu Jus Roostianah tentang status kepemilikan tanah ahli waris pahlawan nasional almarhum Pangeran Hidayatullah yang berjuang di daerah Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan yaitu Desa Riam Kanan dan Desa Naga Sari , dengan lampiran, 7 Januari 1978. 4 lembar
ANRI : Setwapres Sultan Hamengku Buwono IX 786

F. PERTAMBANGAN

47. Mencuci dan mencari butiran intan yang bercampur dengan pasir di Martapura, 23 Desember 1947.
ANRI : Kempen 71223 LL 75
48. Perusahaan penggosokan intan di Martapura, 27 Januari 1953.
ANRI : Kempen 530127 LL 4-i
49. Surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan kepada Menteri Pertambangan dan Gas Bumi tentang sikap terhadap penambangan bahan galian antara perusahaan dan penambangan rakyat, 22 April 1966. 2 lembar
ANRI : Waperdam Ekubang 732

G. PERINDUSTRIAN

50. Rencana kebutuhan garam untuk satu tahun, 23 Desember 1842. 1 lembar
ANRI : Borneo Zuid en Oosterafdeling 50-1

51. Gubernur Kalimantan Selatan memberikan sambutan pada upacara pembukaan pabrik es di Amuntai, Kalimantan Selatan, 1 Februari 1953.
ANRI : Djapenprokal No.Pav/166/V/565
52. Tempat pembakaran batu bata sebagai salah satu usaha rakyat di Martapura, 4 Juli 1953
ANRI : Kempen 530704 LL 1-1
53. Menteri Pertanian meninjau pabrik kertas DUVRI di Martapura yang sedang dalam taraf pembangunan gedungnya, 25 Juli 1961.
ANRI : Kempen 610725 LL 2
54. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional No.003/DEKRAN/ SK/III/86 tentang susunan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dengan lampiran, 31 Maret 1986.
3 lembar
ANRI : Setwapres Umar Wirahadikusuma 331
55. Kerajinan pot di Megara Kampung Besar sebelah barat Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanpa tanggal.
ANRI : KIT 1091/68I.

H. TRANSPORTASI

56. Berita tentang keberangkatan kapal-kapal di pelabuhan Banjarmasin, 1790-1795. 5 lembar
ANRI : Borneo Zuid en Oosterafdeling 92
57. Pemandangan Sungai Martapura di Banjarmasin, 1946.
ANRI : NIGIS A27064
58. Jembatan yang dapat membuka dan menutup di atas muara sungai Barito dan Martapura, Banjarmasin, 7 Juli 1948.
ANRI : Kempen 80704 LL 24

59. Gerobak lembu di Belintang Martapura, Kalimantan Selatan, 19 April 1951.
ANRI : Kempen 512520
60. Jembatan lalu lintas diatas Sungai Komseeing di Martapura, 19 April 1951.
ANRI : Kempen 512499
61. Suasana di depan stasiun kereta api Martapura, 19 April 1951.
ANRI : Kempen 512519
62. Percobaan hubungan udara oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di Kalimantan dengan menggunakan pesawat jenis Twin Otter "Barito", 22 Juli 1961
ANRI : Kempen K610722 LL 1-6
63. Rombongan Menteri Pertanian Brigjen Dr. Azis Saleh tiba di lapangan terbang Ulin Banjarmasin, 22 Juli 1961.
ANRI : Kempen K 610722 LL 1-10
64. Rombongan Menteri Pertanian Brigjen Dr. Azis Saleh melintasi jembatan Sandang Pangan di Karang Intan, Banjarmasin, yang panjangnya 110 m, 25 Juli 1961.
ANRI : Kempen K610725 LL 3-3
65. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.P.40/1/4/Phb tentang pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan para pembantu Tim Survey Operasi Bengawan di perairan pedalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, disertai lampiran, 4 Juli 1966. 2 lembar
ANRI : Waperdam Ekubang 482

66. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 8/DPRD/KPT/1975 tentang ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia atas pengerukan ambang Sungai Barito, disertai surat pengantar, 21 Agustus 1975. 5 lembar
ANRI : Setwapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX 309
67. Pernyataan Syukur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan tentang peresmian alur pelayaran Ambang Barito, 5 Nopember 1976. 1 lembar
ANRI : Setwapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX 31
68. Perahu sebagai alat transportasi sungai di Banjarmasin, 1940.
ANRI : Kempen A27076
69. Pelabuhan Banjarmasin, 1940.
ANRI : KIT 147/3

I. TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

70. Surat permohonan dari Sultan Sulaiman Ali, mu'tamir di Banjar kepada Raffles tentang orang-orang Jawa yang diperbolehkan bermukim di Banjar, 1815. 3 lembar
ANRI : Koleksi Khusus 16
71. Jumlah penduduk pribumi afdeeling Banjarmasin, Martapura, Kalimantan Selatan, 1874. 6 lembar
ANRI : Borneo Zuid en Oostkust 9/6
72. Daftar hasil pekerjaan para transmigran dari Waduk Gunung Makmur di Takisung Kabupaten Tanah Laut, 26 Juni 1955.
ANRI : Kempen 550626 LL 2-i

73. Ikhtisar Proyek Transmigrasi Pasang Surut Barambai di Kalimantan Selatan dari Direktorat Jenderal Transmigrasi tanggal 30 Nopember 1974. 6 lembar
ANRI : Setwapres Sri Sultan Hamengku Buwono IX 840

J. PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

74. Seorang penyadap karet yang sedang menorehkan pisau ke pohon karet untuk diambil getahnya, 1946.
ANRI : Kempen A27067
75. Pelantikan anggota-anggota Yayasan Karet oleh Gubernur Kalimantan di Kantor Gubernur, Banjarmasin, 10 Januari 1953.
ANRI : Kempen I No.12
76. Surat dari Sekretaris Waperdam Bidang Ekubang Selo Soemardjan kepada Menteri Pertanian tentang sikap Gubernur Kalimantan Selatan terhadap tata niaga karet rakyat di Kalimantan Selatan, disertai lampiran, 17 Juni 1966. 21 lembar
ANRI : Waperdam Ekubang 600
77. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.13/UM/52 tentang Perubahan Pembagian Daerah-daerah Perikanan Darat Dalam Wilayah Propinsi Kalimantan dan Bekas Indonesia Timur, dengan lampiran. 26 Pebruari 1953. 4 lembar
ANRI : Setkab UU 1950-1960 199
78. Usaha pemeliharaan ternak pemerintah di Banjarmasin "pemeliharaan sapi-sapi asing", April 1953.
ANRI : Djapenprokal 13
79. Tanaman nenas dan karet dengan sistem jarak pagar di kebun percobaan Tungkep Banjarmasin, 27 Juni 1955.
ANRI : Kempen K550627 LL 5-i

80. Pintu air untuk mengairi sawah-sawah Belanderan di Banjarmasin, 24 Juli 1961.
ANRI : Kempen 610724 LL 25
81. Laporan dari Inspektorat Dinas Peternakan Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Program/Triwulan Proyek Pembangunan Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan, 17 Desember 1979. 2 lembar
ANRI : Setwapres Adam Malik 1020

K. BANGUNAN

82. Makam Sultan Sepuh di Pasir, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. ± 1910.
ANRI : KIT 817/12
83. Makam Dayak kuno di Patung, Banjarmasin, 9 Juli 1952
ANRI : Kempen 520709LL1
84. Tugu pahlawan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, 9 Juli 1952.
ANRI : Kempen 520709 LL 2-1
85. Wakil Presiden Hatta tengah melihat rencana waduk Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 11 Juli 1952.
ANRI : Kempen 520711 LL 4
86. Jawatan Saluran Air Minum dari Kementerian Pekerjaan Umum di Banjarmasin, 1 Juli 1953.
ANRI : Kempen LS30715FG 1-2
87. Pembangunan Kantor Jawatan Penerangan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjar Baru, Januari 1957.
ANRI : Kempen

88. Tugu Martapura, Kalimantan Selatan.
25 Juli 1961.
ANRI : Kempen 610725 LL 12
89. Surat Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No.2/DPRD/Kpt/1979 tentang usulan untuk membangun Taman Makam Syuhada Haji di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.24 Kabupaten Banjar, sehubungan dengan peristiwa kecelakaan pesawat udara DC-8 ex kloter 2 Flight LL-001 pada tanggal 15 Nopember 1978 di Kolombo yang membawa jemaah haji Indonesia asal Kalimantan Selatan, 11 Januari 1979. 2 lembar
ANRI : Setwapres Adam Malik 696

L. KEAGAMAAN

90. Mesjid Martapura, Kalimantan Selatan, ± 1920.
ANRI : KIT 147/19
91. Gereja *Houten zendings* di Banjarmasin, 1925.
ANRI : KIT 809/54
92. Penetapan Menteri Agama No.19 Tahun 1952 tentang tempat kedudukan dan daerah hukum dari kerapatan-kerapatan qadi (tokoh masyarakat) di sebagian daerah Kalimantan Selatan, 1 Oktober 1952. 2 lembar
ANRI : Kabinet Presiden 169
93. Masjid di tepi sungai Nagara, Banjarmasin, 26 Januari 1953.
ANRI : Kempen K530126 LL 2-i
94. Pemandangan sekitar kedatangan jemaah haji yang pertama di Banjarmasin, Oktober 1953.
ANRI : Djapenprokal

M. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

95. Sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang dibangun pemerintah di Banjarmasin, ± 1920.
ANRI : KIT 353/32
96. Tari Mandau dari Kalimantan Selatan, 17 Agustus 1953.
ANRI : Kempen 530817FG3-20
97. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953 tentang penambahan dalam ketentuan tentang Tugas dan Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang diserahkan kepada Daerah Otonom Kabupaten yang yang setingkat dengan itu dalam lingkungan daerah Propinsi Kalimantan.
7 September 1953. 4 lembar
ANRI : Setkab PP 1950-1960, 189
98. Asrama dan perumahan pelajar Mulawarman di Banjarmasin, 27 Juni 1955.
ANRI : Kempen K550627 LL 4-2
99. Presiden Soekarno dan rombongan mengunjungi Sekolah Kepandaian Putri dan Sekolah Guru B di Banjarmasin, 10 Desember 1955.
ANRI : Kempen 551210 LL 24
100. Kunjungan Presiden dan rapat umum di Perkampungan Pelajar Mulawarman Banjarmasin, 1957.
ANRI : Kempen 570715 LL 3-1
- 101.** Ceramah Presiden pada mahasiswa-mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, 7 September 1959. 22 lembar
ANRI : Pidato Presiden 112
102. Pidato Presiden Sukarno pada upacara kenegaraan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1 Nopember 1960. 13 lembar
ANRI : Pidato Presiden 233

N. KESEHATAN

103. Laporan pelaksanaan vaksinasi semester II di Banjarmasin, Januari 1838. 8 lembar
ANRI : Borneo Zuid en Oostkust 36/2
104. Perlombaan bayi sehat memperingati Seperempat Abad Gerakan Wanita Indonesia bertempat di Kantin Tentara Banjarmasin, Desember 1953.
ANRI : Kempen WO 1077/C/Z

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional RI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kalimantan Selatan dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan serta disebarluaskan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.